



Analisis Keterkaitan antara IPM dengan APK APM Satuan Pendidikan SD/MI Sederajat Tahun 2024

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
SEKRETARIAT JENDERAL
PUSAT DATA DAN TEKNOLOGI INFORMASI
JAKARTA, 2025

Analisis Keterkaitan antara IPM dengan APK APM SD/MI Sederajat Tahun 2024

Diterbitkan oleh:

Pusat Data dan Teknologi Informasi
Sekretariat Jenderal
Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah

Pengarah:

Drs. L. Manik Mustikohendro, M.Si.

Editor:

Abdul Hakim, S.Kom.

Penyusun:

Friska Amelia Pratiwi, S.Stat., M.S.M
Bintang Akbar Pamungkas, S.Pd.

Desain grafis:

Gunawan Bayu Aji, S.Sn.

© 2025 Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah
Hak cipta dilindungi Undang-Undang.
All rights reserved.

Dilarang memperbanyak buku ini dalam bentuk dan cara apapun tanpa izin tertulis dari penerbit

Kata Pengantar

Aspek penting dalam pembangunan manusia adalah pendidikan untuk mewujudkan kualitas manusia yang tinggi. Pendidikan juga menjadi salah satu tujuan global sesuai dengan agenda Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SDGs*) hingga tahun 2030 yaitu menjamin akses dan pemerataan pendidikan dan meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua. Berbagai program dan kebijakan mengacu pada Sistem Pendidikan Nasional terus dilakukan oleh Indonesia untuk meningkatkan partisipasi maupun kualitas pendidikan. Oleh karena itu, pemerintah terus berupaya agar masyarakat khususnya penduduk usia sekolah dapat masuk dalam Sistem Pendidikan Nasional.

Berdasarkan capaian Angka Partisipasi Kasar (APK) maupun Angka Partisipasi Murni (APM), terdapat peningkatan partisipasi pendidikan pada berbagai jenjang pendidikan di Indonesia. Demikian pula dengan capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang terus meningkat menunjukkan adanya kemajuan pembangunan manusia di Indonesia. Meskipun demikian, perjuangan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa belum usai dan terdapat variasi progres pembangunan manusia antardaerah di Indonesia.

Buku “Analisis Keterkaitan antara IPM dengan APK APM SD/MI Sederajat Tahun 2024” merupakan analisis awal tentang capaian partisipasi penduduk usia 7–12 tahun yang masuk dalam sistem pendidikan, dikaitkan dengan capaian pembangunan kesehatan, pendidikan masyarakat, dan ekonomi di setiap daerah. Dengan demikian, buku ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi pemangku kepentingan dalam melaksanakan perencanaan, penganggaran, implementasi, serta monitoring dan evaluasi terkait kebijakan pendidikan.

Tangerang Selatan, Agustus 2025

Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah



Yudhistira Nugraha, S.T., M.ICT Adv., D.Phil.

Daftar Isi

Kata Pengantar	2
Daftar Isi	3
Daftar Tabel	4
Daftar Grafik	6
Latar Belakang	8
Kajian Pustaka	9
Metodologi	10
Alur Pikir dan Batasan Analisis	13
IPM 2024	15
APK - APM Satuan Pendidikan SD Sederajat Tahun 2024	26
IPM 2024 versus APK-APM SD Sederajat Tahun 2024	38
Rangkuman	46
Daftar Pustaka	47
Lampiran	48

Daftar Tabel

Tabel 1.	Statistik Deskriptif Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota Tahun 2024	20
Tabel 2.	Capaian IPM Kabupaten/Kota Terhadap IPM Nasional Tahun 2024	20
Tabel 3.	Jumlah Kabupaten/Kota menurut Pertumbuhan IPM Terhadap Pertumbuhan IPM Nasional Tahun 2024	21
Tabel 4.	Jumlah Kabupaten/Kota menurut Kelompok Klasifikasi Faktor IPM (Pendidikan, Ekonomi, dan Kesehatan) Tahun 2024	22
Tabel 5.	Jumlah Kabupaten/Kota menurut Kelompok Klasifikasi Faktor IPM (Pendidikan, Ekonomi, dan Kesehatan) Tahun 2024 Tiap Provinsi	24
Tabel 6.	Perkembangan Jumlah Peserta Didik SD Sederajat menurut Bentuk Pendidikan Tahun 2023–2024	28
Tabel 7.	Statistik Deskriptif APK dan APM SD Sederajat menurut Kabupaten/Kota Tahun 2023-2024	33
Tabel 8.	Jumlah Kabupaten/Kota menurut Perubahan APK SD Sederajat Tahun 2023-2024	33
Tabel 9.	Jumlah Kabupaten/Kota menurut Perubahan APK SD Sederajat Tahun 2023–2024 Tiap Provinsi.....	34
Tabel 10.	Jumlah Kabupaten/Kota menurut Kuadran IPM 2024 dengan APM SD Sederajat Tahun 2024.....	39

Daftar Tabel

Tabel 11.	Jumlah Kabupaten/Kota menurut Kuadran IPM 2024 dengan APM SD Sederajat 2024 tiap Provinsi.....	40
Tabel 12.	Jumlah Kabupaten/Kota menurut Kuadran I IPM dengan APM SD Sederajat menurut Klasifikasi Faktor IPM Tahun 2024	42
Tabel 13.	Jumlah Kabupaten/Kota menurut Kuadran II IPM dengan APM SD Sederajat menurut Klasifikasi Faktor IPM Tahun 2024	43
Tabel 14.	Jumlah Kabupaten/Kota menurut Kuadran III IPM dengan APM SD Sederajat menurut Klasifikasi Faktor IPM Tahun 2024	44
Tabel 15.	Jumlah Kabupaten/Kota menurut Kuadran IV IPM dengan APM SD Sederajat menurut Klasifikasi Faktor IPM Tahun 2024	45
Tabel 16.	Jumlah Kabupaten/Kota menurut Kuadran IPM dengan APM SD Sederajat dan Klasifikasi Faktor IPM Tahun 2024	46

Daftar Grafik

Grafik 1.	Perbandingan antara Target Renstra dan Capaian APK SD Tahun 2024	11
Grafik 2.	Perkembangan IPM dan Indikator Penyusunnya Tahun 2021-2024	18
Grafik 3.	Potret Indikator Penyusun Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota Tahun 2024	19
Grafik 4.	Potret Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota Tahun 2024	20
Grafik 5.	Persentase Kabupaten/Kota menurut Capaian IPM terhadap IPM Nasional Tahun 2024	20
Grafik 6.	Potret Pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota Tahun 2024	21
Grafik 7.	Persentase Kabupaten/kota menurut Pertumbuhan IPM terhadap Pertumbuhan IPM Nasional Tahun 2024	21
Grafik 8.	Persentase Kabupaten/Kota Menurut Kelompok Klasifikasi Faktor IPM Tahun 2024	22
Grafik 9.	Komposisi Kabupaten/Kota Menurut Kelompok Klasifikasi Faktor IPM Tahun 2024 Tiap Provinsi	23
Grafik 10.	Perubahan Jumlah Peserta Didik SD Sederajat Menurut Bentuk Pendidikan Tahun 2023–2024	28

Daftar Grafik

Grafik 11.	Komposisi Jumlah Peserta Didik SD Sederajat menurut Bentuk Pendidikan Tahun 2023–2024	28
Grafik 12.	APK SD Sederajat menurut Provinsi Tahun 2024	29
Grafik 13.	APM SD Sederajat menurut Provinsi Tahun 2024	29
Grafik 14.	Sebaran 34 Provinsi menurut Kuadran APK dengan APM SD Sederajat Tahun 2024	30
Grafik 15.	Persentase Kabupaten/Kota Menurut Perubahan APK SD Sederajat Tahun 2023-2024	33
Grafik 16.	Persentase Kabupaten/Kota Menurut Perubahan APK SD Sederajat Tahun 2023-2024 tiap Provinsi	34
Grafik 17.	Gap APK SD Sederajat Kabupaten/Kota Tahun 2024 tiap Provinsi	35
Grafik 18.	Gap APM SD Sederajat Kabupaten/Kota Tahun 2024 tiap Provinsi	35
Grafik 19.	Sebaran Kabupaten/Kota menurut Kuadran APK SD Sederajat Tahun 2023 dengan APK SD Sederajat Tahun 2024	36
Grafik 20.	Sebaran Kabupaten/Kota menurut Kuadran APM SD Sederajat Tahun 2023 dengan APM SD Sederajat Tahun 2024	37
Grafik 21.	Sebaran Kabupaten/Kota menurut Kuadran IPM 2024 dengan APM SD Sederajat 2024	39
Grafik 22.	Persentase Kabupaten/Kota menurut Kuadran IPM 2024 dengan APM SD Sederajat 2024 ...	39

Latar Belakang

- Indonesia memiliki visi menjadi negara yang berdaulat, maju, adil, dan makmur pada tahun 2045. Satu pilar penting dalam mencapai visi Indonesia 2045 adalah pembangunan manusia yaitu meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia yang lebih baik dengan kualitas manusia yang tinggi (Bappenas, 2019).
- Para ahli memperkirakan Indonesia akan menikmati bonus demografi pada tahun 2045, dan menjadi negara dengan perekonomian terbesar keempat dunia pada tahun 2050 (OECD, 2018). Bahkan beberapa sumber menyebutkan bahwa Indonesia akan mengalami puncak bonus demografi pada tahun 2030. Indonesia dapat menikmati bonus demografi jika didukung oleh modal manusia Indonesia yang berkualitas.
- Untuk menyiapkan “Generasi Emas 2045”, pemerintah Indonesia memiliki tiga strategi pembangunan manusia yaitu melalui peningkatan layanan dasar dan perlindungan sosial, peningkatan produktivitas, dan pembangunan karakter. Peningkatan layanan dasar dan perlindungan sosial dilakukan melalui tata kelola kependudukan; perlindungan sosial; kesehatan; pendidikan; pengentasan kemiskinan; dan kualitas anak, perempuan, dan pemuda. Peningkatan produktivitas dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan vokasi; pendidikan tinggi; iptek dan inovasi; dan prestasi olahraga. Pembangunan karakter dilakukan melalui revolusi mental dan pembinaan ideologi pancasila; pemajuan dan pelestarian kebudayaan; moderasi beragama; dan budaya literasi, inovasi, dan kreativitas (Perpres 18/2020).
- Secara global, pendidikan diyakini sebagai jalan menuju keberlanjutan, pengentasan kemiskinan, kesehatan yang lebih baik, perlindungan lingkungan, dan kesetaraan gender (UN, 2016). Pada Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SDGs*) hingga tahun 2030, pendidikan ditetapkan sebagai tujuan dari SDGs yang ke-4 yaitu menjamin akses dan pemerataan pendidikan dan meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua.
- Pemenuhan akses pendidikan untuk semua di Indonesia masih perlu perhatian khususnya bagi penyandang disabilitas, penduduk perdesaan, dan juga penduduk dari rumah tangga berpenghasilan rendah (BPS, 2023). Jumlah dan sebaran satuan pendidikan, serta sarana dan prasarana yang memadai belum merata khususnya pada daerah tertinggal, terdepan dan terluar (Kemendikbudristek, 2024).

Kajian Pustaka

- Modal manusia (*human capital*) diartikan sebagai tingkat pengetahuan, kesehatan, maupun kapasitas manusia lainnya yang dikaitkan dengan produktivitas ekonomi (Todaro & Smith, 2012). Modal manusia merupakan proses akumulasi, dan jika dianalogikan dengan investasi fisik pada proses produksi konvensional, maka untuk meningkatkan produktivitas dan hasil diperlukan pula investasi pada manusia.
- Fokus utama investasi pada modal manusia adalah fasilitas dan layanan kesehatan, pendidikan, pelatihan, migrasi, dan memperoleh informasi tentang sistem ekonomi sehingga akan meningkatkan produktivitas dan penghasilan individu (Schultz, 1961; Becker, 1962).
- Pembangunan manusia (*human development*) merupakan proses meluaskan kebebasan masyarakat dalam memilih (*freedom*) dan membentuk maupun memanfaatkan kemampuan (*capability*) mereka. Dari sekian banyak pilihan, pada hakikatnya terdapat tiga pilihan mendasar masyarakat yaitu hidup sehat dan umur panjang, memperoleh pengetahuan, dan dapat menikmati hidup yang layak (UNDP, 1990; UNDP, 2023).
- Ukuran yang umum digunakan untuk melihat capaian pendidikan adalah Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM) karena biasanya datanya tersedia dan mudah diperoleh, menjadi salah satu ukuran standar yang digunakan oleh UNDP dan World Bank, dan merupakan indikator terbaik dalam pengukuran kuantitas (Sitanggang & Jasmina, 2023).
- Beberapa literatur menyebutkan bahwa ada keterkaitan antara pendidikan dan kesejahteraan, maupun antara pendidikan dan kesehatan. Penduduk dengan pendidikan yang lebih tinggi cenderung memiliki pendapatan yang lebih tinggi, sebaliknya penduduk yang memiliki pendapatan lebih tinggi cenderung dapat mencapai pendidikan yang lebih tinggi (Arsani et al., 2020; Septadarma & Rambe, 2024; Rakasiwi & Kautsar, 2021).
- Menjaga stabilitas ekonomi dan meningkatkan belanja pemerintah bidang pendidikan signifikan dalam meningkatkan nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang (Nurlina et. al, 2023).

Metodologi

Data

Data yang digunakan dalam Analisis Keterkaitan antara IPM dengan APK APM SD Sederajat Tahun 2024 ini yaitu:

1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Data IPM yang digunakan adalah tahun 2023 dan 2024 yang bersumber dari Badan Pusat Statistik. IPM merupakan indikator komposit dari tiga dimensi yaitu:

- Kesehatan (Umur Harapan Hidup)
- Pendidikan (Harapan Lama Sekolah dan Rerata Lama Sekolah)
- Ekonomi (Pengeluaran Riil per Kapita per Tahun yang Disesuaikan)

2. Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM)

Data APK dan APM yang digunakan adalah tahun 2023 dan 2024 yang bersumber dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. APK dan APM 2023 merupakan data *cut off* pada tanggal 30 November 2023, sedangkan APK dan APM 2024 merupakan data *cut off* pada tanggal 30 November 2024.

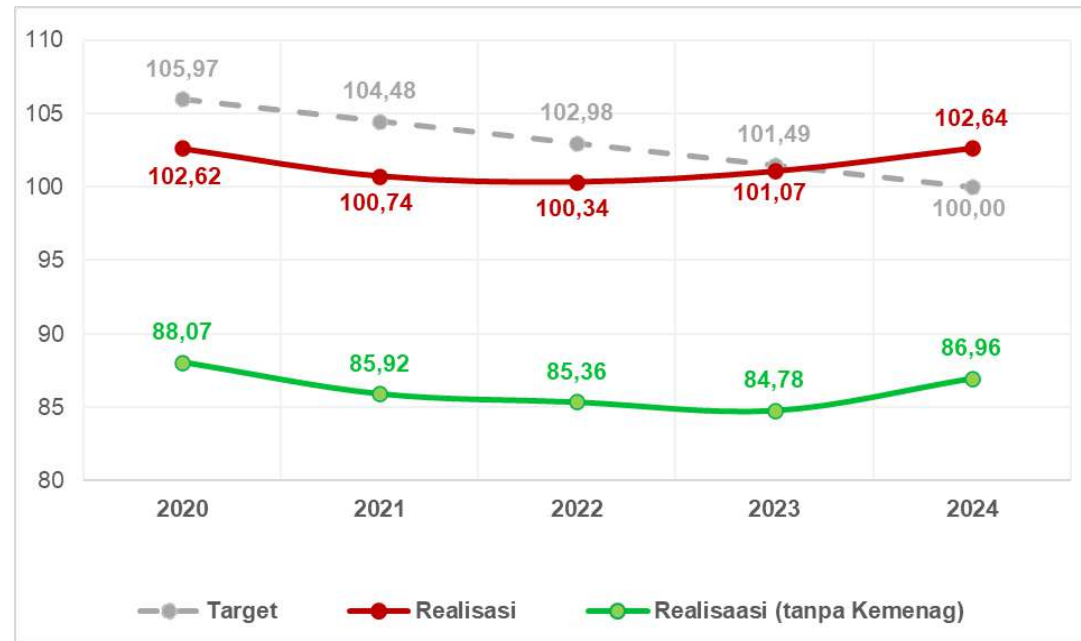
Metode Analisis

Analisis IPM terhadap APM SD Sederajat menggunakan metode analisis kuadran capaian IPM terhadap capaian APM dari 514 kabupaten/kota di Indonesia pada tahun 2024. Pembentukan kuadran dilakukan berdasarkan capaian IPM nasional dan capaian APM nasional pada tahun 2024. Adapun definisi dari masing-masing kuadran yang terbentuk sebagai berikut:

Kuadran I	kabupaten/kota yang capaian IPM 2024 dan capaian APM 2024 di atas IPM dan APM Nasional
Kuadran II	kabupaten/kota yang capaian IPM 2024 di bawah IPM Nasional dan capaian APM 2024 di atas APM Nasional
Kuadran III	kabupaten/kota yang capaian IPM 2024 dan capaian APM 2024 di bawah IPM dan APM Nasional
Kuadran IV	kabupaten/kota yang capaian IPM 2024 di atas IPM Nasional dan capaian APM 2024 di bawah APM Nasional

Partisipasi Peserta Didik

Grafik 1. Perbandingan antara Target Renstra dan Capaian APK SD Tahun 2020–2024

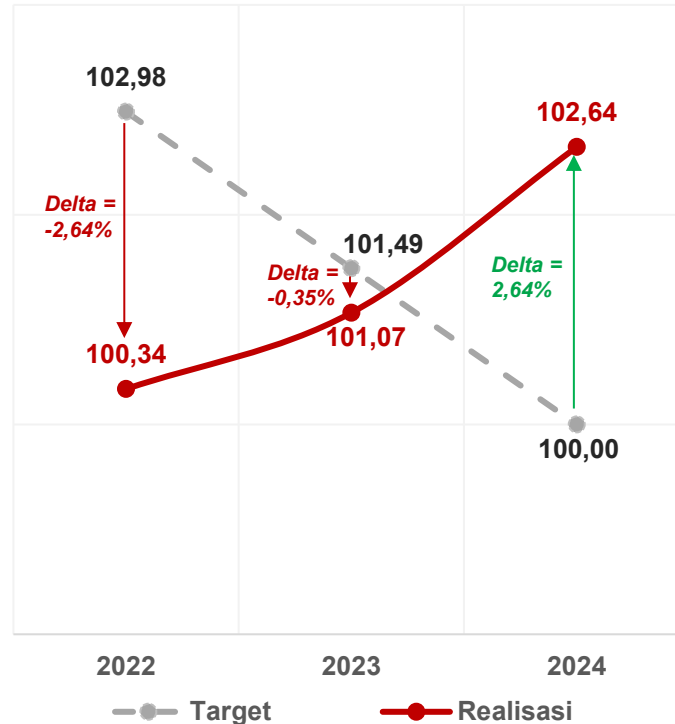


Dalam Rencana Strategis 2020 – 2024, Kemendikbudristek menetapkan target APK SD pada tahun 2020 sebesar 105,97% dan 100% pada tahun 2024. Pada tahun 2020 hingga 2023, realisasi APK SD masih di bawah target yang ditetapkan, namun berhasil tercapai pada tahun 2024.

Realisasi APK SD tahun 2024 sebesar 102,64%, meningkat dari APK SD tahun 2023 dengan realisasi 101,07%. Jika tanpa memperhitungkan peserta didik pada satuan pendidikan Kementerian Agama, realisasi APK SD (tanpa Kemenag) tahun 2024 mengalami sedikit peningkatan, dari 84,78% pada tahun 2023 menjadi 86,96% pada tahun 2024.

Partisipasi Peserta Didik

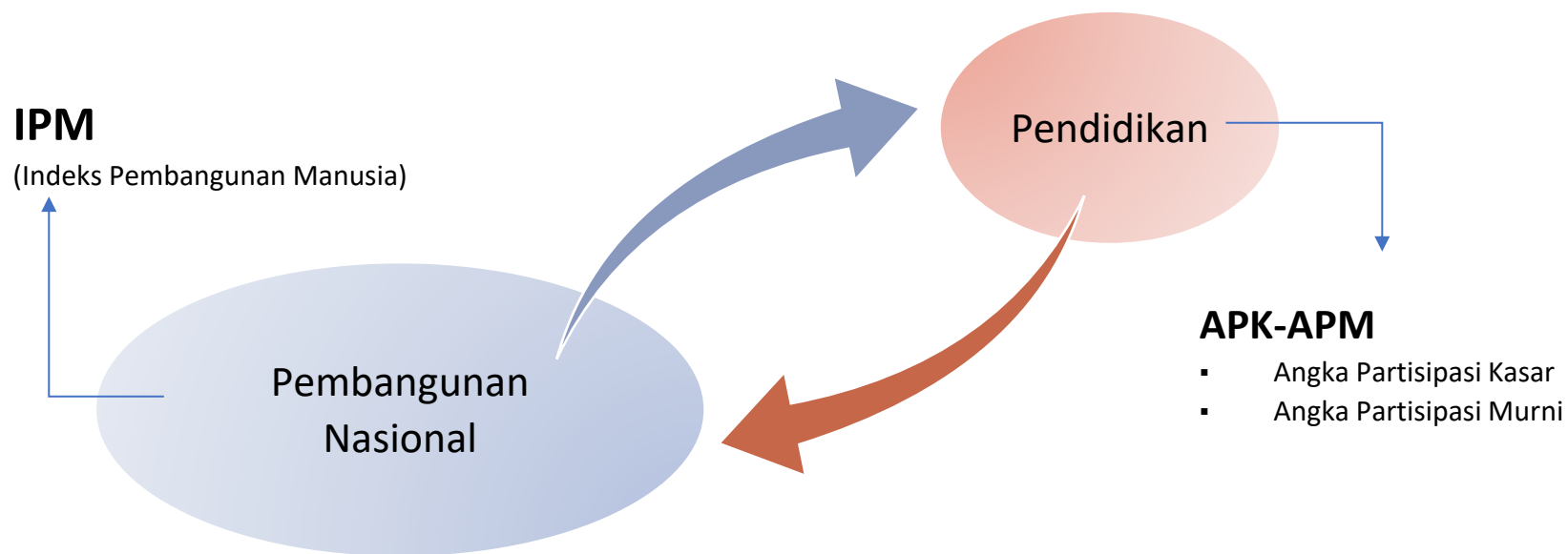
**Grafik 2. Gap Target dan Capaian
APK SD Sederajat Tahun 2020–2024**



Berdasarkan *gap* antara target dan realisasi, *gap* APK SD pada tahun 2022 dan 2023 bernilai negatif dengan delta yang semakin menurun dari tahun ke tahun, namun pada tahun 2024 sudah bernilai positif dengan delta sebesar 2,64%.

Target realisasi renstra untuk APK SD dari tahun ke tahun semakin kecil mendekati 100% karena nilai APK SD yang selalu di atas 100% di mana artinya banyak siswa SD yang bersekolah namun tidak sesuai rentang usia (7-12 tahun).

Alur Pikir dan Batasan Analisis (1)



Dari skema di atas, dapat dilihat bahwa terdapat hubungan timbal balik antara capaian pembangunan dengan capaian pengelolaan dan pembinaan pendidikan. Hasil dari proses pembangunan, selanjutnya dapat sebagai acuan/pijakan dalam perencanaan pembangunan sektor pendidikan, dan sebaliknya kondisi capaian sektor pendidikan diharapkan dapat menggerakkan pembangunan, dan secara tidak langsung akan menggerakkan sektor lain.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah salah satu indikator makro yang menggambarkan kondisi pembangunan manusia suatu wilayah, untuk mencapai kondisi tersebut dengan menggunakan Indeks Pembangunan Manusia, yang terdiri dari tiga dimensi, yaitu Dimensi Ekonomi, Dimensi Kesehatan dan Dimensi Pendidikan. Angka Partisipasi Kasar – Angka Partisipasi Murni (APK-APM) merupakan salah satu indikator makro pendidikan yang menggambarkan partisipasi penduduk usia sekolah yang masuk dalam Sistem Pendidikan (Formal ataupun Non Formal), di mana penduduk usia sekolah tercatat dalam salah satu Satuan Pendidikan.

IPM dan APK/APM merupakan indikator makro jika disandingkan dapat menunjukkan gambaran umum suatu wilayah, yang selanjutnya dapat digunakan sebagai acuan atau *background* untuk melakukan perencanaan dan pembinaan pendidikan (khusus untuk sektor pendidikan), untuk lebih mengetahui secara detail permasalahan di proses belajar di setiap satuan pendidikan atau kewilayahan dengan menggunakan indikator-indikator pendidikan lainnya.

Alur Pikir dan Batasan Analisis (2)

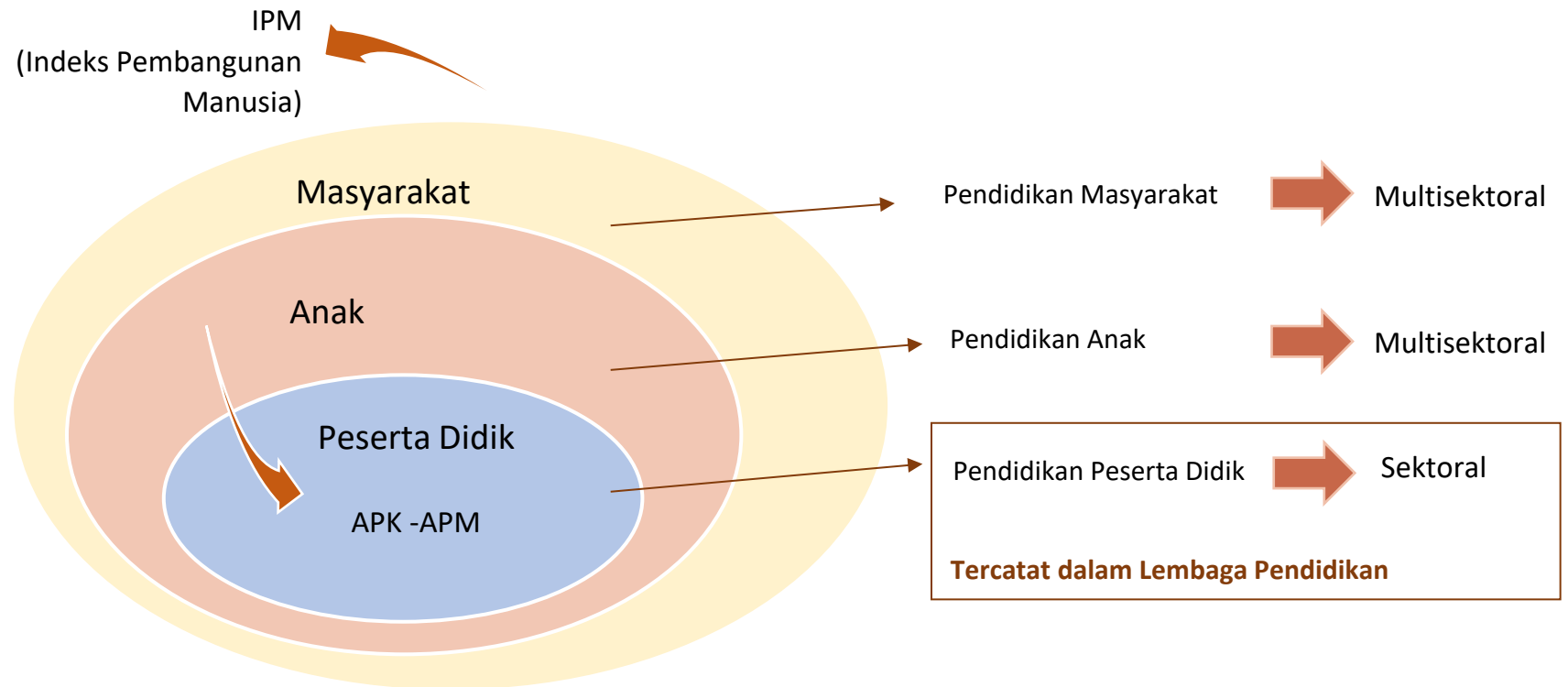


Diagram Venn

Kelompok Peserta Didik merupakan bagian (*Subset*) dari Kelompok Anak-anak, dan kelompok Anak-anak merupakan bagian (*Subset*) dari Masyarakat.

Pendidikan Peserta Didik tidak lepas dari kondisi pendidikan anak-anak secara umum, dan pendidikan anak-anak tidak lepas dari kualitas pendidikan masyarakat, maka secara konsep ada hubungan antara pendidikan masyarakat, pendidikan anak dan pendidikan peserta didik.

IPM 2024

INDEKS
PEMBANGUNAN
MANUSIA

PENDIDIKAN

EKONOMI

KESEHATAN

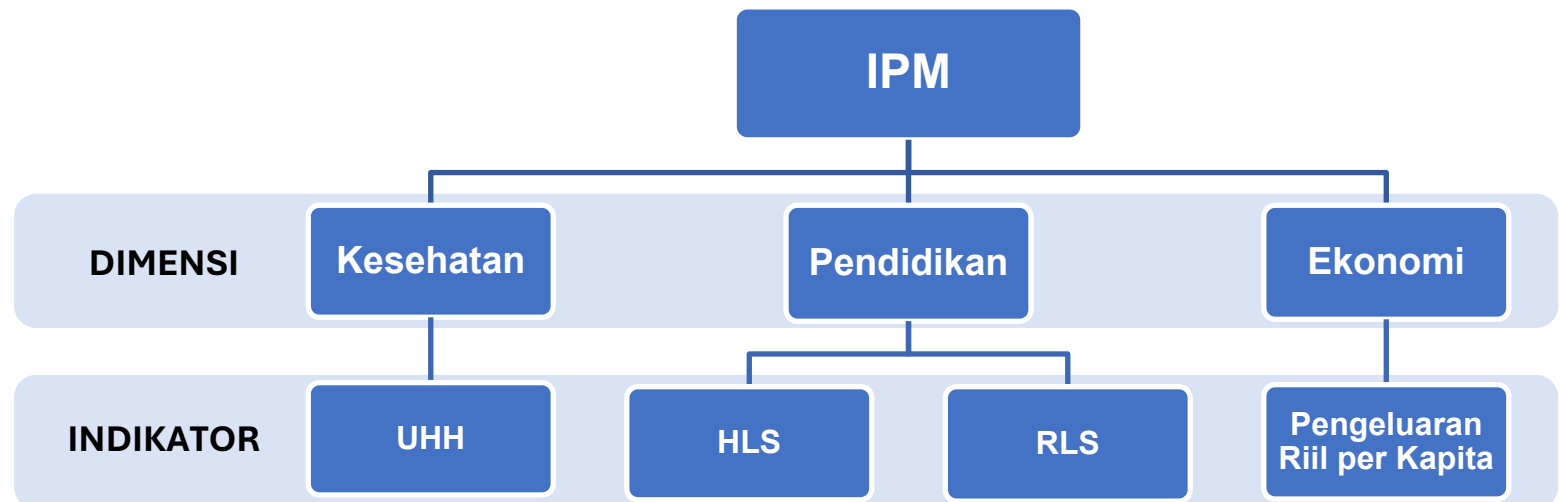
IPM 2024
75,02

INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM)

Definisi

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah indeks komposit yang dikembangkan oleh UNDP untuk mengukur capaian rata-rata dari tiga dimensi dasar pembangunan manusia yaitu umur panjang dan hidup sehat (kesehatan), pengetahuan (pendidikan), dan standar hidup layak (ekonomi).

Dimensi kesehatan diproksi menggunakan indikator Umur Harapan Hidup saat lahir (UHH), dimensi pendidikan diproksi menggunakan indikator Harapan Lama Sekolah (HLS) penduduk usia 7 tahun ke atas dan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) penduduk usia 25 tahun ke atas, dan dimensi ekonomi diproksi menggunakan indikator pengeluaran riil per kapita per tahun yang disesuaikan.



Status Pembangunan Manusia

Capaian pembangunan manusia di suatu wilayah pada waktu tertentu dapat dikelompokkan ke dalam empat kategori. Pengelompokan ini bertujuan untuk mengorganisasikan wilayah-wilayah menjadi kelompok-kelompok yang sama dalam hal pembangunan manusia. Pembangunan manusia di suatu wilayah sangat tinggi apabila capaian IPM bernilai 80 atau lebih, dan berkategori rendah apabila capaian IPM kurang dari 60.

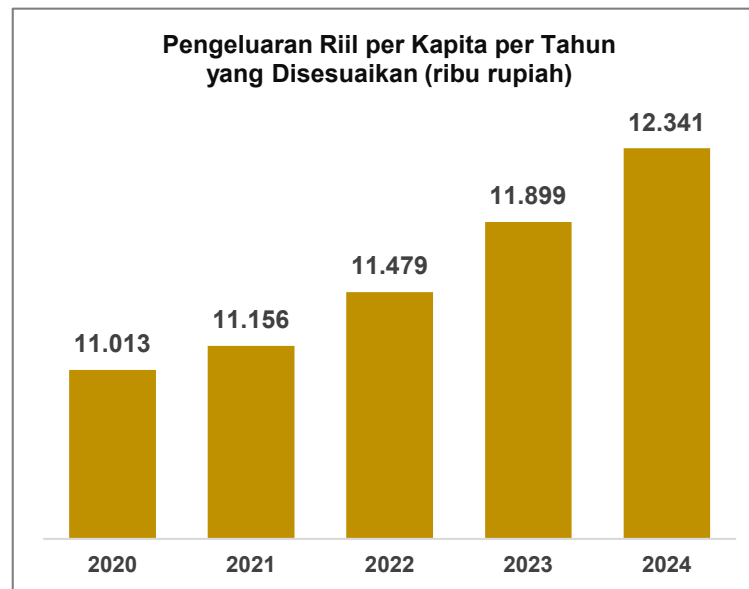
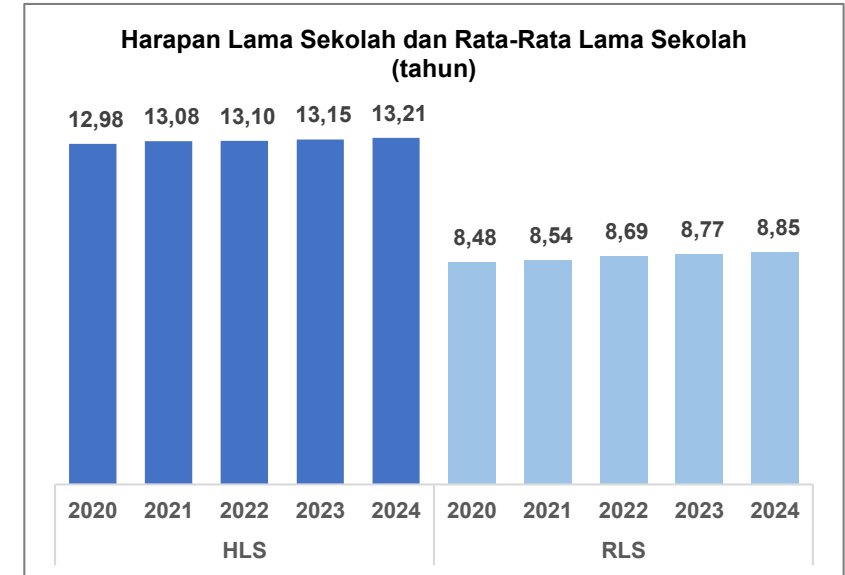
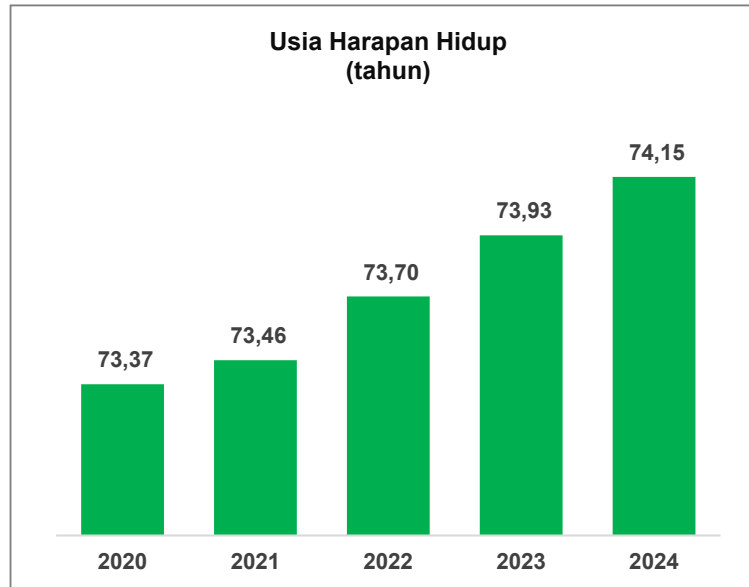
Capaian IPM	Kategori
$IPM \geq 80$	Sangat Tinggi
$70 \leq IPM < 80$	Tinggi
$60 \leq IPM < 70$	Sedang
$IPM < 60$	Rendah

Manfaat

Indeks Pembangunan Manusia menjadi salah satu indikator yang penting dalam melihat sisi lain dari pembangunan. Manfaat penting IPM antara lain sebagai berikut:

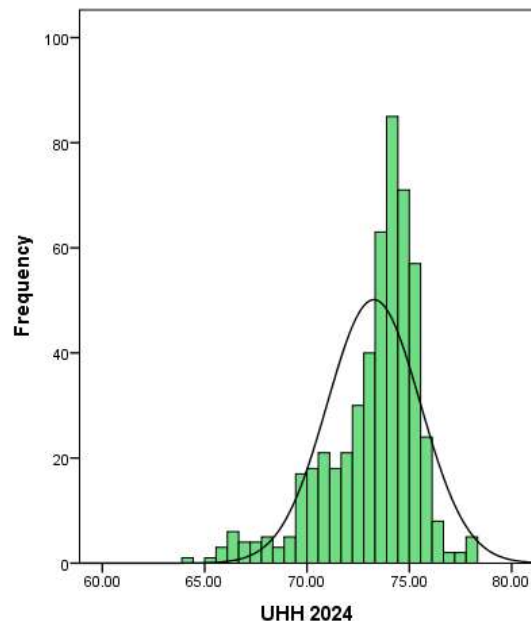
- IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk);
- IPM dapat menentukan peringkat atau level pembangunan suatu wilayah/negara;
- Bagi Indonesia, IPM merupakan data strategis karena selain sebagai ukuran kinerja Pemerintah, IPM juga digunakan sebagai salah satu klasifikasi penentuan dana alokasi umum (DAU).

Grafik 3. Perkembangan IPM dan Indikator Penyusunnya Tahun 2020–2024

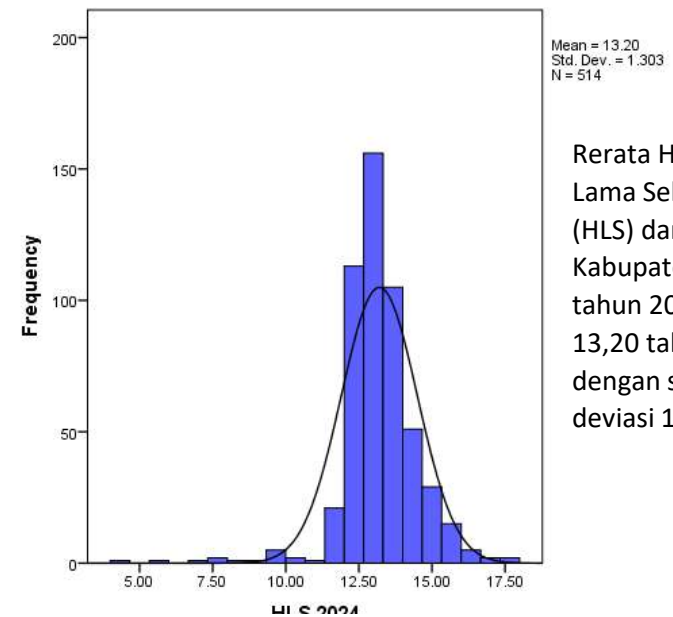


Sumber: Badan Pusat Statistik (diolah)

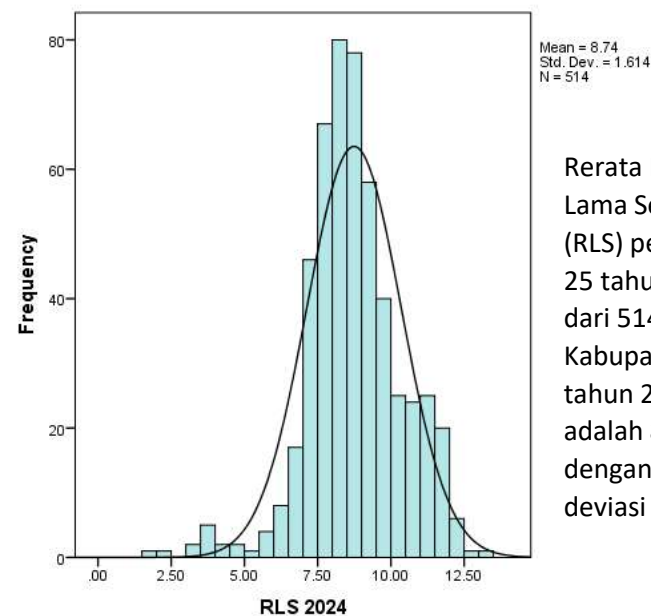
Grafik 4. Potret Indikator Penyusun Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota Tahun 2024



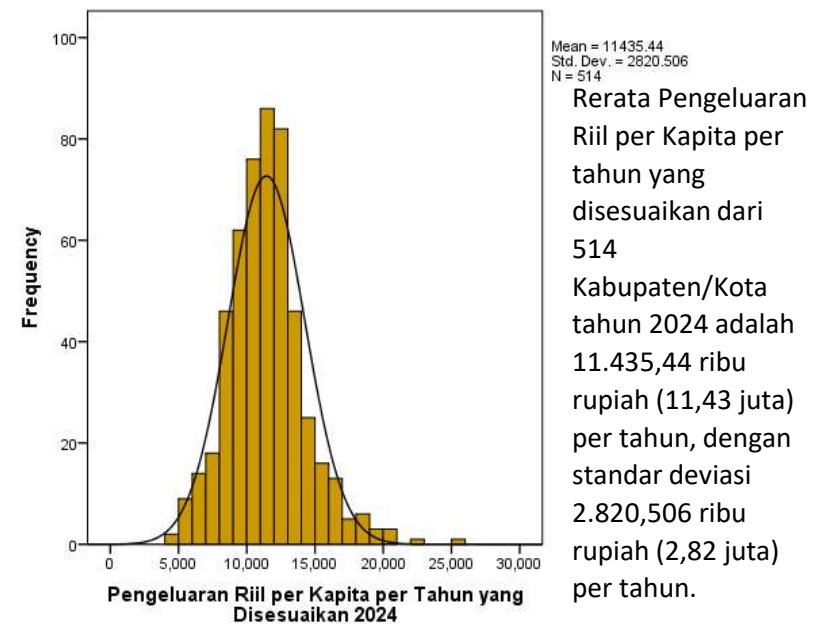
Rerata Umur Harapan Hidup (UHH) dari 514 Kabupaten/Kota tahun 2024 adalah 73,27 tahun dengan standar deviasi 2,272.



Rerata Harapan Lama Sekolah (HLS) dari 514 Kabupaten/Kota tahun 2024 adalah 13,20 tahun dengan standar deviasi 1,303.

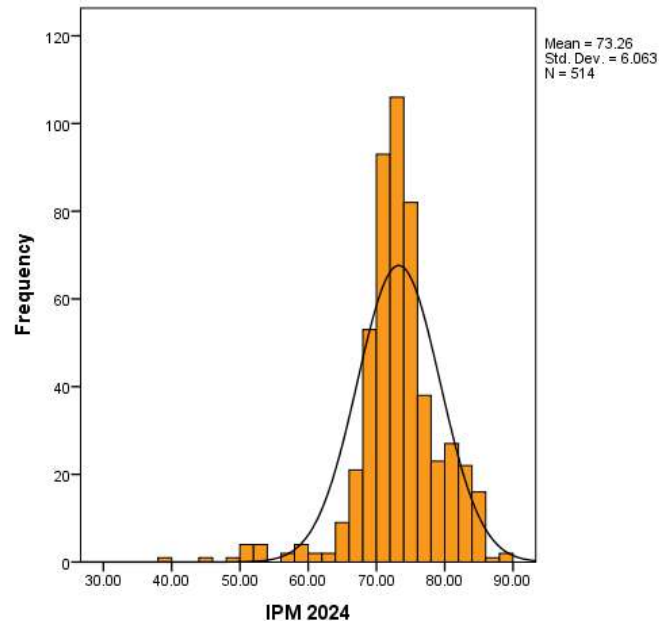


Rerata Rata-rata Lama Sekolah (RLS) penduduk 25 tahun ke atas dari 514 Kabupaten/Kota tahun 2024 adalah 8,74 tahun dengan standar deviasi 1,614.



Rerata Pengeluaran Riil per Kapita per tahun yang disesuaikan dari 514 Kabupaten/Kota tahun 2024 adalah 11.435,44 ribu rupiah (11,43 juta) per tahun, dengan standar deviasi 2.820,506 ribu rupiah (2,82 juta) per tahun.

Grafik 5. Potret Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota Tahun 2024

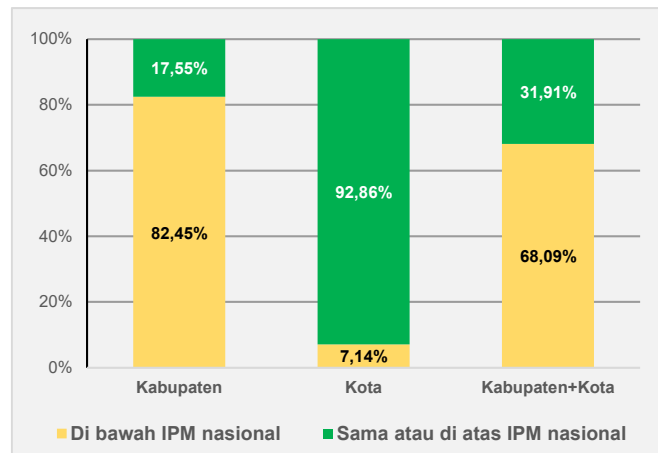


Tabel 1. Statistik Deskriptif Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota Tahun 2024

	UHH (tahun)	HLS (tahun)	RLS (tahun)	Pengeluaran (ribu rupiah)	IPM
N	514	514	514	514	514
Minimum	63,90	4,45	1,92	4.597	38,88
Maximum	78,27	17,94	13,10	25.573	89,10
Mean	73,27	13,20	8,74	11.435,44	73,26
Std. Deviation	2,27	1,30	1,61	2.820,51	6,06

Rerata capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dari 514 Kabupaten/Kota tahun 2024 adalah 73,26 dengan standar deviasi 6,06. Capaian IPM tertinggi adalah 89,10 dan capaian IPM terendah adalah 38,88.

Grafik 6. Persentase Kabupaten/Kota menurut Capaian IPM terhadap IPM Nasional Tahun 2024



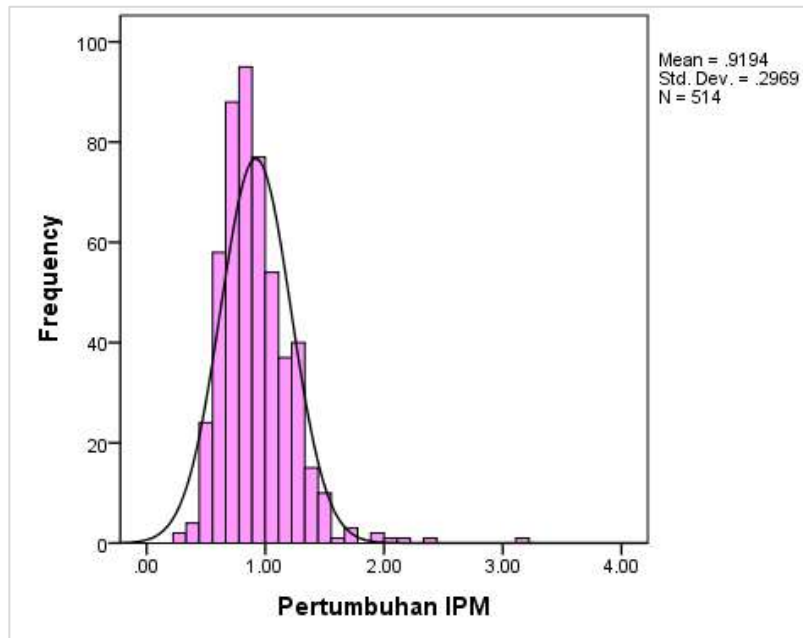
Sumber: Badan Pusat Statistik (diolah)

Tabel 2. Capaian IPM Kabupaten/Kota terhadap IPM Nasional Tahun 2024

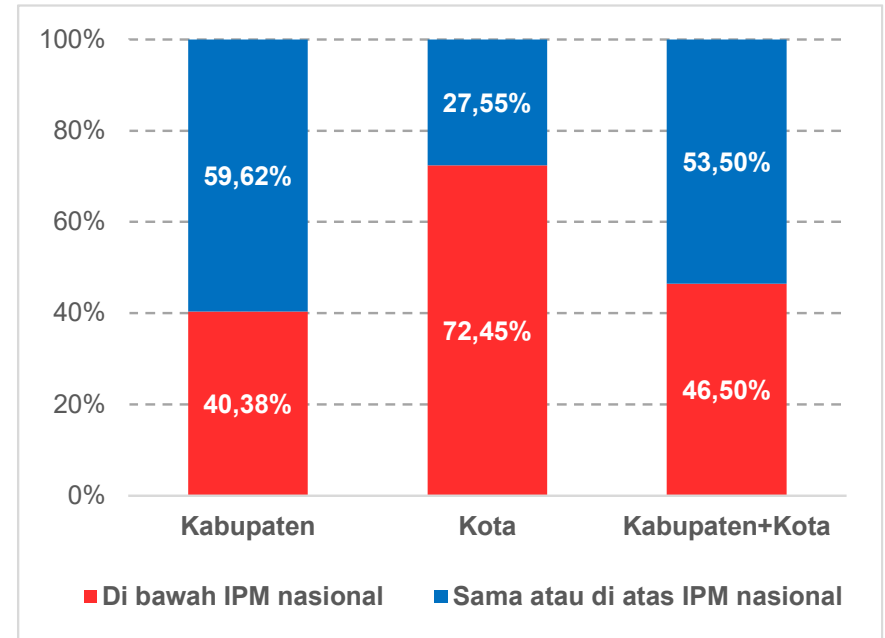
Capaian IPM Kabupaten/Kota	Kabupaten		Kota		Kabupaten+Kota	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
Di bawah IPM nasional	343	82,45%	7	7,14%	350	68,09%
Sama atau di atas IPM nasional	73	17,55%	91	92,86%	164	31,91%
Total	416	100,00%	98	100,00%	514	100,00%

Dari total 416 kabupaten di Indonesia, terdapat 343 kabupaten (82,45%) yang capaian IPM di bawah capaian IPM nasional. Dari total 98 kota di Indonesia, terdapat 7 kota (7,14%) yang capaian IPM di bawah capaian IPM nasional. Secara keseluruhan, terdapat 350 kabupaten/kota (68,09%) yang capaian IPM di bawah capaian IPM nasional.

Grafik 7. Potret Pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota Tahun 2024



Grafik 8. Persentase Kabupaten/Kota menurut Pertumbuhan IPM terhadap Pertumbuhan IPM Nasional Tahun 2024



Tabel 3. Jumlah Kabupaten/Kota menurut Pertumbuhan IPM terhadap Pertumbuhan IPM Nasional Tahun 2024

Pertumbuhan IPM Kabupaten/Kota	Kabupaten		Kota		Kabupaten+Kota	
	Jumlah	Persentase	Jumlah	Persentase	Jumlah	Persentase
Di bawah IPM nasional	168	40,38%	71	72,45%	239	46,50%
Sama atau di atas IPM nasional	248	59,62%	27	27,55%	275	53,50%
Total	416	100,00%	98	100,00%	514	100,00%

Sumber: Badan Pusat Statistik (diolah)

Rerata pertumbuhan IPM dari 514 kabupaten/kota adalah 0,91% dengan standar deviasi 0,29% (Grafik 6). Dari total 416 kabupaten di Indonesia, terdapat 168 kabupaten (40,38%) dengan pertumbuhan IPM di bawah pertumbuhan IPM nasional. Dari total 98 kota di Indonesia, terdapat 71 kota (72,45%) dengan pertumbuhan IPM di bawah pertumbuhan IPM nasional. Secara keseluruhan, terdapat 239 (46,50%) kabupaten/kota dengan pertumbuhan IPM di bawah pertumbuhan IPM nasional.

Tabel 4. Jumlah Kabupaten/Kota menurut Kelompok Klasifikasi Faktor IPM (Pendidikan, Ekonomi, dan Kesehatan) Tahun 2024

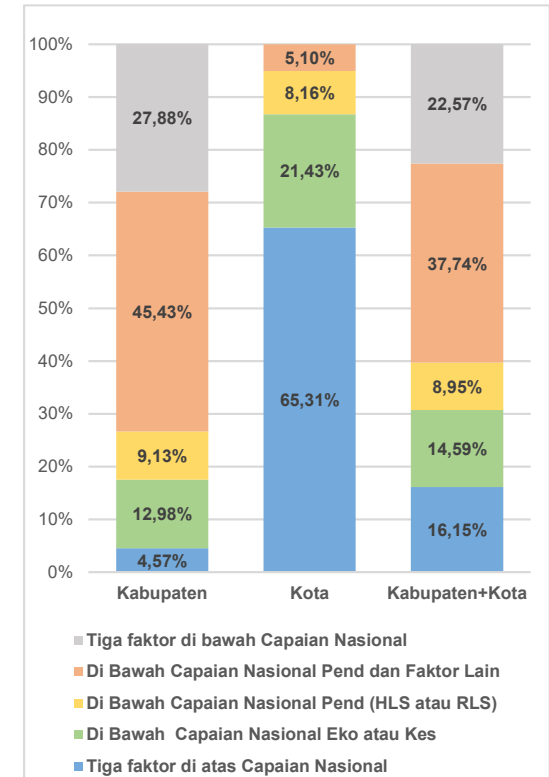
No	Klasifikasi Daerah Menurut Faktor-Faktor di IPM	Kabupaten		Kota		Kabupaten+Kota	
		Jumlah	Persentase	Jumlah	Persentase	Jumlah	Persentase
1	Tiga faktor di atas Capaian Nasional	19	4,57%	64	65,31%	83	16,15%
2	di bawah capaian nasional eko	8	1,92%	6	6,12%	14	2,72%
3	di bawah capaian nasional kes	5	1,20%	10	10,20%	15	2,92%
4	di bawah capaian nasional eko dan kes	41	9,86%	5	5,10%	46	8,95%
	Di Bawah Capaian Nasional Eko atau Kes	54	12,98%	21	21,43%	75	14,59%
5	di bawah capaian nasional pend (RLS)	8	1,92%	-	-	8	1,56%
6	di bawah capaian nasional pend (HLS)	11	2,64%	7	7,14%	18	3,50%
7	di bawah capaian nasional pend	19	4,57%	1	1,02%	20	3,89%
	Di Bawah Capaian Nasional Pend (HLS atau RLS)	38	9,13%	8	8,16%	46	8,95%
8	di bawah capaian nasional pend (RLS), eko, dan kes	49	11,78%	1	1,02%	50	9,73%
9	di bawah capaian nasional pend (RLS) dan kes	3	0,72%	-	-	3	0,58%
10	di bawah capaian nasional pend (RLS) dan eko	17	4,09%	2	2,04%	19	3,70%
11	di bawah capaian nasional pend (HLS), eko, dan kes	32	7,69%	-	-	32	6,23%
12	di bawah capaian nasional pend (HLS) dan kes	7	1,68%	-	-	7	1,36%
13	di bawah capaian nasional pend (HLS) dan eko	4	0,96%	2	2,04%	6	1,17%
14	di bawah capaian nasional pend dan eko	59	14,18%	-	-	59	11,48%
15	di bawah capaian nasional pend dan kes	18	4,33%	-	-	18	3,50%
	Di Bawah Capaian Nasional Pend dan Faktor Lain	189	45,43%	5	5,10%	194	37,74%
16	Tiga faktor di bawah Capaian Nasional	116	27,88%	-	-	116	22,57%
	Total	416	100,00%	98	100,00%	514	100,00%

Sumber: Badan Pusat Statistik (diolah)

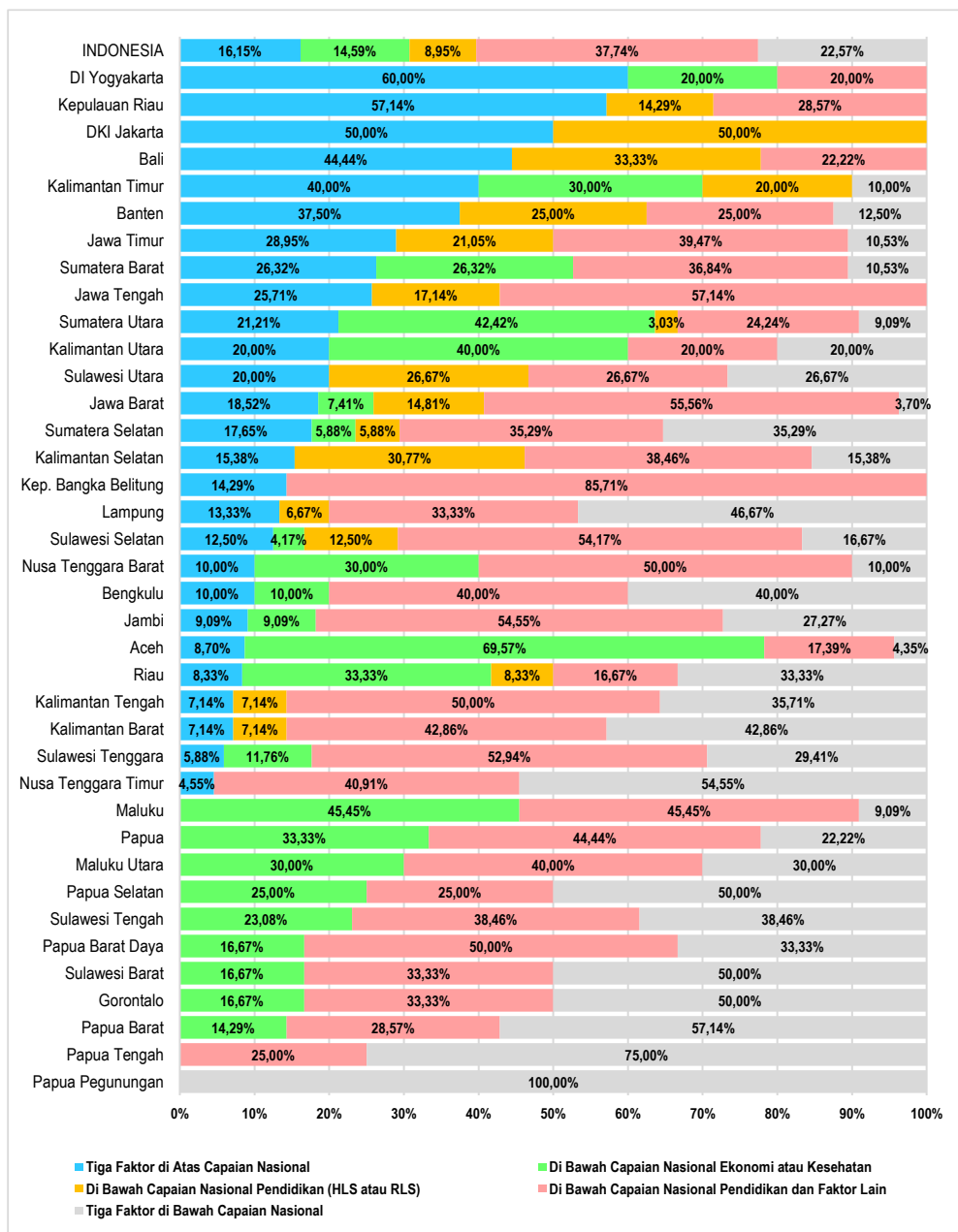
Berdasarkan kelompok klasifikasi faktor RLS IPM, terdapat variasi pembangunan manusia antara kabupaten dan kota. Pada tahun 2024, sebagian besar kota berada pada kelompok dimana capaian ketiga faktor IPM-nya (pendidikan, ekonomi, kesehatan) di atas capaian nasional yaitu sebanyak 64 kota (65,31%). Sementara itu pada daerah kabupaten sebagian besar berada pada kelompok dimana capaian faktor IPM-nya di bawah capaian nasional pendidikan dan faktor lain yaitu sebanyak 189 kabupaten (45,43%), bahkan terdapat 116 kabupaten (27,88%) yang capaian ketiga faktor IPM-nya di bawah capaian nasional.

Dari 514 kabupaten/kota, terdapat 46 kabupaten/kota (8,95%) yaitu 38 kabupaten dan 8 kota yang berada pada kelompok dimana capaian faktor pendidikannya di bawah capaian pendidikan (HLS atau RLS) nasional. Lebih rinci, pada daerah kabupaten terdapat 8 kabupaten dengan permasalahan RLS, 11 kabupaten dengan permasalahan HLS, dan 19 kabupaten dengan permasalahan HLS dan RLS. Sedangkan pada daerah kota, 7 kota dengan permasalahan HLS, dan 1 kota dengan permasalahan HLS dan RLS.

Grafik 9. Persentase Kabupaten/Kota menurut Kelompok Klasifikasi Faktor IPM Tahun 2024



Grafik 10. Komposisi Kabupaten/Kota menurut Kelompok Klasifikasi Faktor IPM Tahun 2024 tiap Provinsi



Sebanyak 16,15% dari 514 kabupaten/kota di Indonesia yang capaian ketiga faktor IPM (pendidikan, ekonomi, dan kesehatan) di atas capaian faktor IPM nasional, dan 22,57% kabupaten/kota yang capaian ketiga faktor di bawah capaian faktor IPM nasional.

Jika dikelompokkan berdasarkan provinsi, terdapat tiga provinsi dimana lebih dari atau sama dengan 50% dari kabupaten/kotanya dengan kondisi ketiga faktor IPM di atas capaian faktor IPM nasional yaitu DI Yogyakarta, Kepulauan Riau, dan DKI Jakarta.

Provinsi dengan permasalahan terbesar pada faktor kesehatan atau ekonomi adalah Provinsi Aceh dimana sebanyak 69,57% dari kabupaten/kotanya memiliki capaian faktor ekonomi atau faktor kesehatan di bawah capaian nasional.

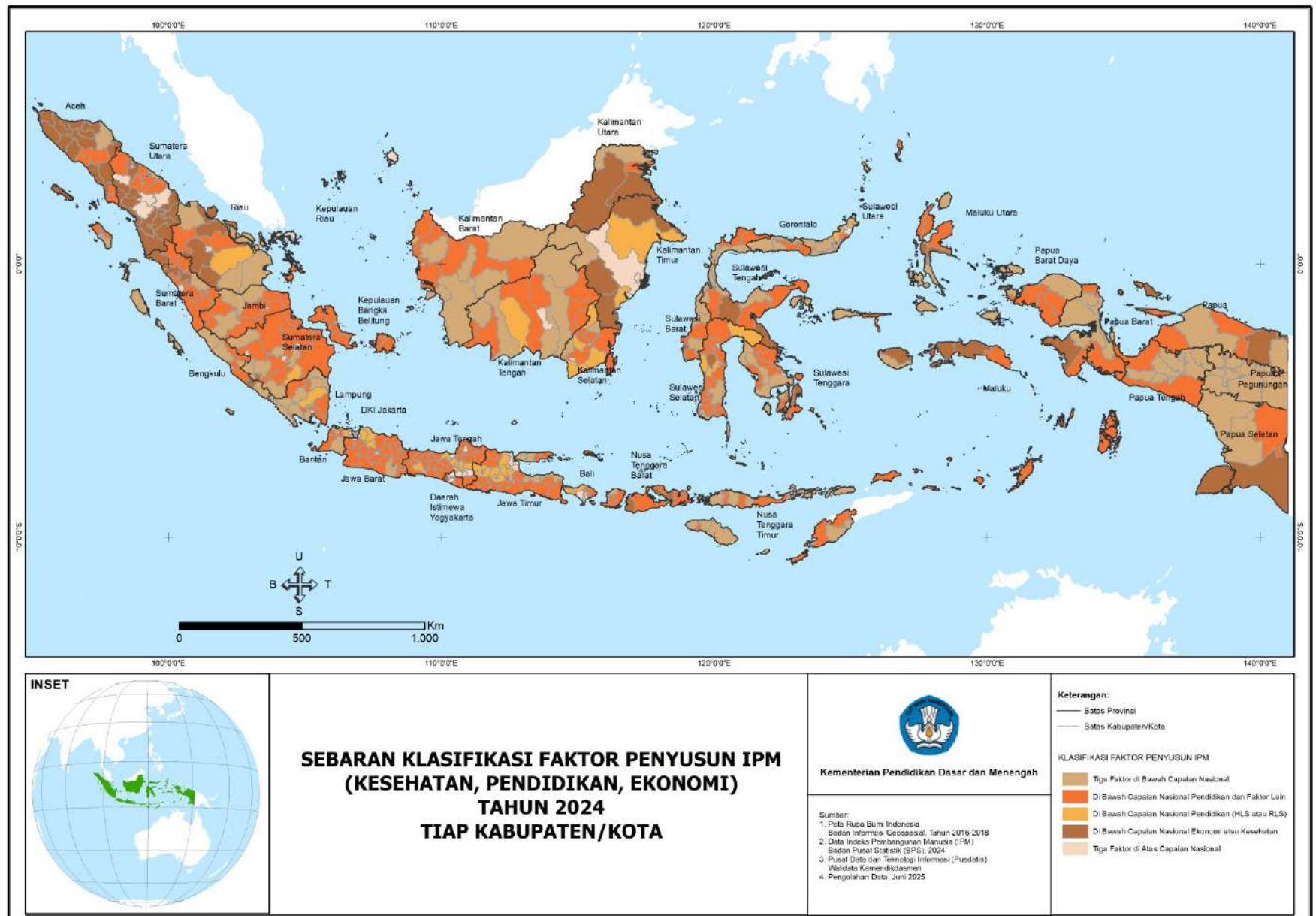
Provinsi dengan permasalahan terbesar pada faktor pendidikan adalah Provinsi DKI Jakarta dimana sebanyak 50% dari kabupaten/kotanya memiliki capaian faktor pendidikan (HLS atau RLS) di bawah capaian nasional.

Terdapat sembilan provinsi dimana lebih dari atau sama dengan 50% dari kabupaten/kotanya memiliki capaian faktor pendidikan dan faktor kesehatan atau faktor ekonomi di bawah capaian nasional yaitu Papua Barat Daya, Sulawesi Tenggara, Kalimantan Tengah, Jambi, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Selatan, Kep. Bangka Belitung, Jawa Barat, dan Jawa Tengah.

Terdapat tujuh provinsi dimana lebih dari atau sama dengan 50% dari kabupaten/kotanya dengan capaian ketiga faktor IPM di bawah capaian nasional yaitu Papua Pegunungan, Papua Tengah, Papua Barat, Gorontalo, Sulawesi Barat, Papua Selatan, dan Nusa Tenggara Timur.

**Tabel 5. Jumlah Kabupaten/Kota menurut Kelompok Klasifikasi Faktor IPM
(Pendidikan, Ekonomi, dan Kesehatan) Tahun 2024 tiap Provinsi**

No	Provinsi	Tiga Faktor di Atas Capaian Nasional	Di Bawah Capaian Nasional Ekonomi atau Kesehatan	Di Bawah Capaian Nasional Pendidikan (HLS atau RLS)	Di Bawah Capaian Nasional Pendidikan dan Faktor Lain	Tiga Faktor di Bawah Capaian Nasional	Total
1	Aceh	2	16	-	4	1	23
2	Sumatera Utara	7	14	1	8	3	33
3	Sumatera Barat	5	5	-	7	2	19
4	Riau	1	4	1	2	4	12
5	Jambi	1	1	-	6	3	11
6	Sumatera Selatan	3	1	1	6	6	17
7	Bengkulu	1	1	-	4	4	10
8	Lampung	2	-	1	5	7	15
9	Kep. Bangka Belitung	1	-	-	6	-	7
10	Kepulauan Riau	4	-	1	2	-	7
11	DKI Jakarta	3	-	3	-	-	6
12	Jawa Barat	5	2	4	15	1	27
13	Jawa Tengah	9	-	6	20	-	35
14	DI Yogyakarta	3	1	-	1	-	5
15	Jawa Timur	11	-	8	15	4	38
16	Banten	3	-	2	2	1	8
17	Bali	4	-	3	2	-	9
18	Nusa Tenggara Barat	1	3	-	5	1	10
19	Nusa Tenggara Timur	1	-	-	9	12	22
20	Kalimantan Barat	1	-	1	6	6	14
21	Kalimantan Tengah	1	-	1	7	5	14
22	Kalimantan Selatan	2	-	4	5	2	13
23	Kalimantan Timur	4	3	2	-	1	10
24	Kalimantan Utara	1	2	-	1	1	5
25	Sulawesi Utara	3	-	4	4	4	15
26	Sulawesi Tengah	-	3	-	5	5	13
27	Sulawesi Selatan	3	1	3	13	4	24
28	Sulawesi Tenggara	1	2	-	9	5	17
29	Gorontalo	-	1	-	2	3	6
30	Sulawesi Barat	-	1	-	2	3	6
31	Maluku	-	5	-	5	1	11
32	Maluku Utara	-	3	-	4	3	10
33	Papua	-	3	-	4	2	9
34	Papua Barat	-	1	-	2	4	7
35	Papua Selatan	-	1	-	1	2	4
36	Papua Tengah	-	-	-	2	6	8
37	Papua Pegunungan	-	-	-	-	8	8
38	Papua Barat Daya	-	1	-	3	2	6
Indonesia		83	75	46	194	116	514

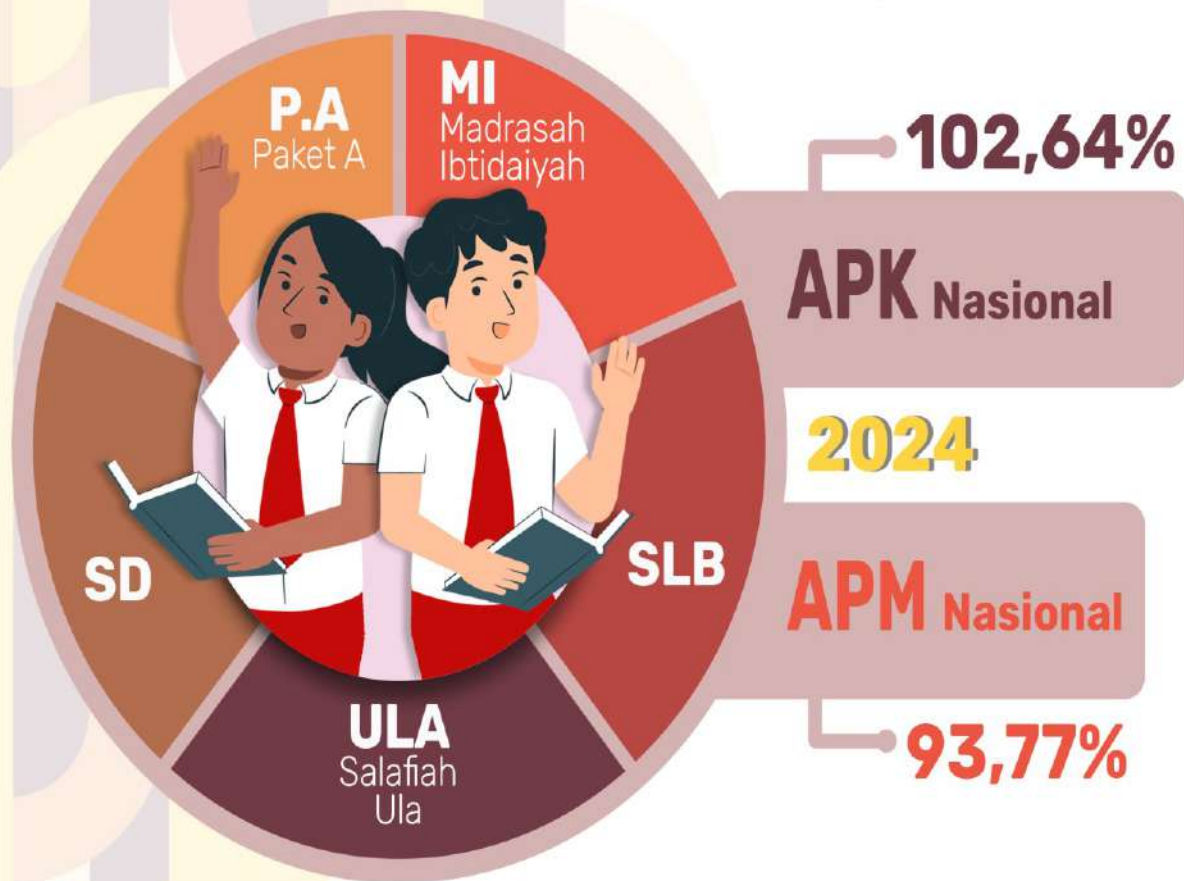


Sumber: Badan Pusat Statistik (diolah)

APK APM

ANGKA
PARTISIPASI
KASAR

ANGKA
PARTISIPASI
MURNI



APK - APM

Angka Partisipasi Kasar – Angka Partisipasi Murni

“Keberhasilan pembangunan suatu wilayah ditentukan oleh sumber daya manusia yang berkualitas. Pendidikan merupakan salah satu cara meningkatkan kualitas SDM tersebut. Oleh karena itu peningkatan mutu pendidikan harus terus diupayakan, dimulai dengan membuka kesempatan seluas-luasnya kepada penduduk (khususnya usia sekolah) untuk mengenyam pendidikan, hingga pada peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pendidikan. Untuk mengetahui seberapa banyak penduduk yang memanfaatkan fasilitas pendidikan dapat dilihat dari persentase penduduk menurut usia sekolah yang berada disekolah. Untuk melihat partisipasi sekolah dalam suatu wilayah biasa dikenal beberapa indikator, antara lain: Angka Partisipasi Sekolah (APS), Angka Partisipasi Kasar (APK), serta Angka Partisipasi Murni (APM).”

ANGKA PARTISIPASI KASAR (APK)

Definisi: Perbandingan antara siswa pada jenjang pendidikan tertentu dengan penduduk usia sekolah dan dinyatakan dalam persentase.

Rumus:

$$APK_j = \frac{\text{Jumlah Siswa}_j}{\text{Jumlah Penduduk}_i} \times 100$$

j = jenjang pendidikan tertentu

i = usia sesuai jenjang pendidikan tertentu

Kriteria: Semakin tinggi APK berarti makin banyak anak usia sekolah yang bersekolah di jenjang pendidikan tertentu atau banyak anak di luar usia sekolah.

Kegunaan: Untuk mengetahui jumlah siswa yang bersekolah pada jenjang pendidikan tertentu.

ANGKA PARTISIPASI MURNI (APM)

Definisi: Perbandingan antara siswa usia sekolah tertentu pada jenjang pendidikan dengan penduduk usia yang sesuai dan dinyatakan dalam persentase.

Rumus:

$$APM_j = \frac{\text{Jumlah Siswa}_{j,i}}{\text{Jumlah Penduduk}_i} \times 100$$

j = jenjang pendidikan tertentu

i = usia sesuai jenjang pendidikan tertentu

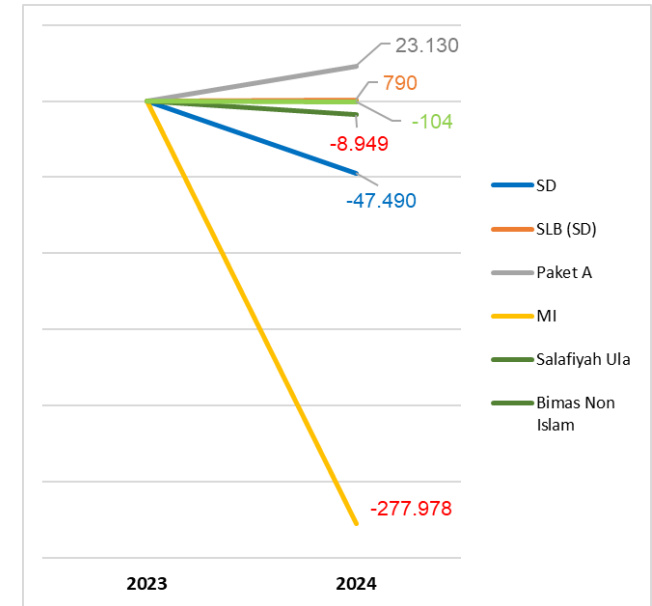
Kriteria: Semakin tinggi APM berarti semakin banyak anak usia sekolah yang bersekolah sesuai usia resmi di jenjang pendidikan tertentu.

Kegunaan: Untuk mengetahui jumlah anak usia sekolah yang bersekolah pada jenjang yang sesuai.

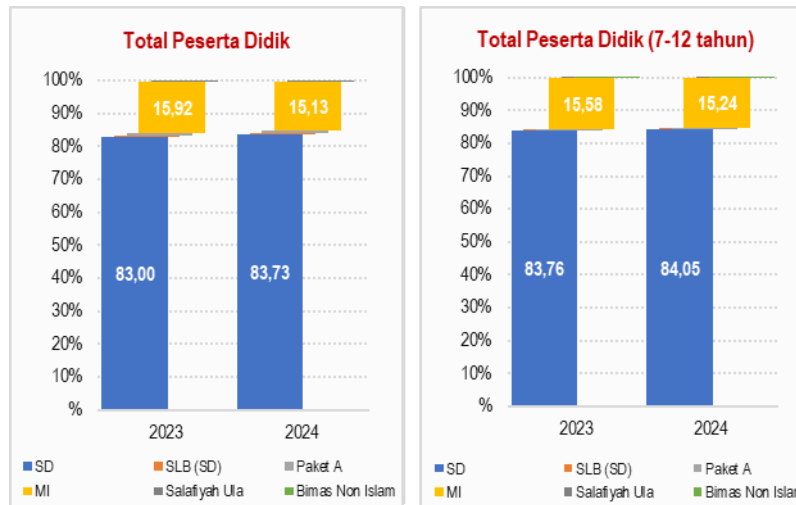
Tabel 6. Perkembangan Jumlah Peserta Didik SD Sederajat Menurut Bentuk Pendidikan Tahun 2023–2024

Jenis Satuan Pendidikan	Total Peserta Didik						
	Peserta Didik		Delta 2023 - 2024		Komposisi Menurut Jenis		
	2023	2024	Jumlah	%	2023	2024	Delta
SD	24.064.711	24.017.221	-47.490	-0,20	83,00	83,73	0,73
SLB (SD)	83.494	84.284	790	0,95	0,29	0,29	0,01
Paket A	175.348	198.478	23.130	13,19	0,60	0,69	0,09
MI	4.617.347	4.339.369	-277.978	-6,02	15,92	15,13	-0,80
Salafiyah Ula	48.574	39.625	-8.949	-18,42	0,17	0,14	-0,03
Bimas Non Islam	5.516	5.412	-104	-1,89	0,02	0,02	-0,00
SD Sederajat	28.994.990	28.684.389	-310.601	-1,07	100,00	100,00	
Penduduk 7 - 12	28.689.290	27.945.378					
Jenis Satuan Pendidikan	Peserta Didik 7 - 12 Tahun						
	Peserta Didik		Delta 2023 - 2024		Komposisi Menurut Jenis		
	2023	2024	Jumlah	%	2023	2024	Delta
SD	22.109.900	22.024.156	-85.744	-0,39	83,76	84,05	0,29
SLB (SD)	59.830	61.766	1.936	3,24	0,23	0,24	0,01
Paket A	78.956	90.815	11.859	15,02	0,30	0,35	0,05
MI	4.113.533	3.994.207	-119.326	-2,90	15,58	15,24	-0,34
Salafiyah Ula	30.615	28.474	-2.141	-6,99	0,12	0,11	-0,01
Bimas Non Islam	4.865	4.723	-142	-2,92	0,02	0,02	-0,00
SD Sederajat	26.397.699	26.204.141	-193.558	-0,73	100,00	100,00	

Grafik 10. Perubahan Jumlah Peserta Didik SD Sederajat Menurut Bentuk Pendidikan Tahun 2023–2024



Grafik 11. Komposisi Jumlah Peserta Didik SD Sederajat Menurut Bentuk Pendidikan Tahun 2023–2024

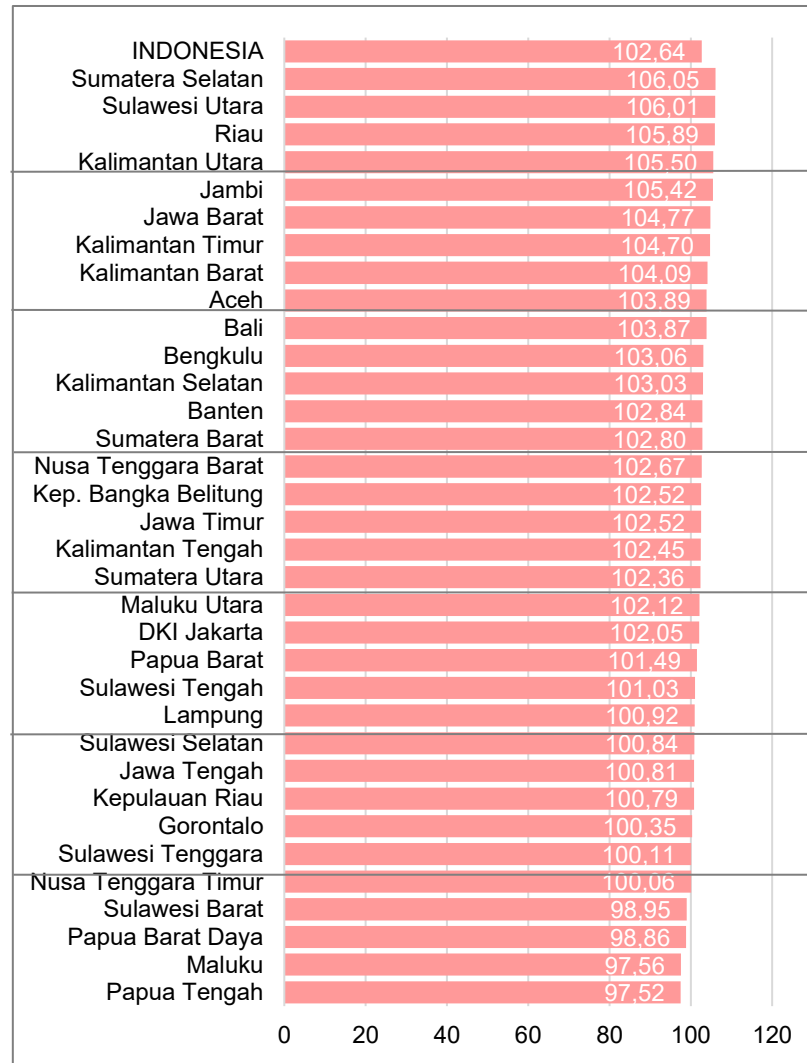


Total peserta didik SD sederajat (SD/ SLB(SD)/ Paket A/ MI/ Salafiyah Ula/ Bimas Non Islam) pada tahun 2024 turun sebesar 310.601 peserta didik dari tahun 2023, kemudian peserta didik usia 7 – 12 tahun turun sebesar 193.558 dari tahun 2023. Berdasarkan bentuk pendidikan, peningkatan hanya terdapat pada SDLB dan Kesetaraan Paket A, baik dari total peserta didik maupun peserta didik usia 7 – 12 tahun.

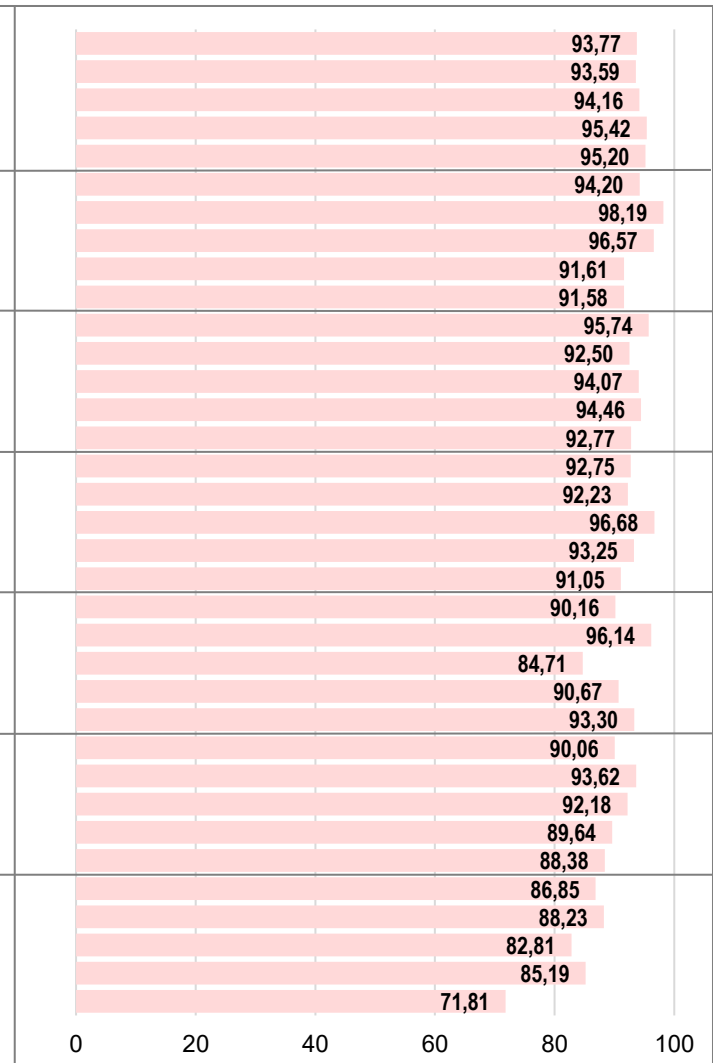
Pada Grafik 10 terlihat total peserta didik tahun 2024 pada SDLB naik sebesar 790 peserta didik dan Kesetaraan Paket A naik sebesar 23.130 peserta didik dari tahun 2023, sedangkan pada bentuk pendidikan lainnya terdapat penurunan. Adapun penurunan total peserta didik terbesar berada pada MI dengan penurunan sebesar 277.978 peserta didik pada tahun 2024.

Pada Grafik 11 terlihat bahwa peserta didik SD sederajat sebagian besar berada pada SD. Pada tahun 2024 terdapat pergeseran komposisi peserta didik dibandingkan dengan tahun 2023. Total peserta didik SD tahun 2024 sebesar 83,73% atau naik 0,76% dari tahun 2023, sedangkan total peserta didik MI tahun 2024 sebesar 15,13% atau turun 0,79% dari tahun 2023. Sementara itu, bentuk pendidikan lainnya mengalami sedikit perubahan komposisi atau relatif tidak ada perubahan.

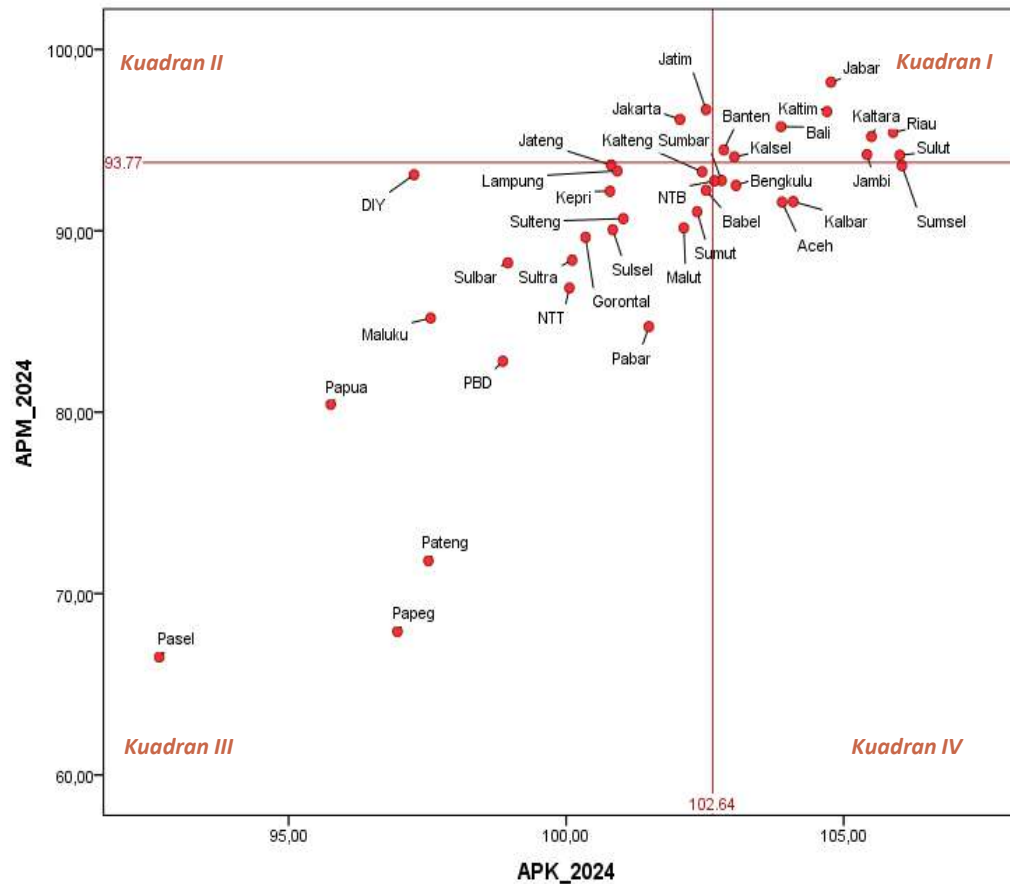
Grafik 12. APK SD Sederajat Menurut Provinsi Tahun 2024



Grafik 13. APM SD Sederajat Menurut Provinsi Tahun 2024



Grafik 14. Sebaran 34 Provinsi Menurut Kuadran APK dengan APM SD Sederajat Tahun 2024



Kuadran I:
9 provinsi yang capaian APK tahun 2024 dan capaian APM tahun 2024 di atas capaian nasional.

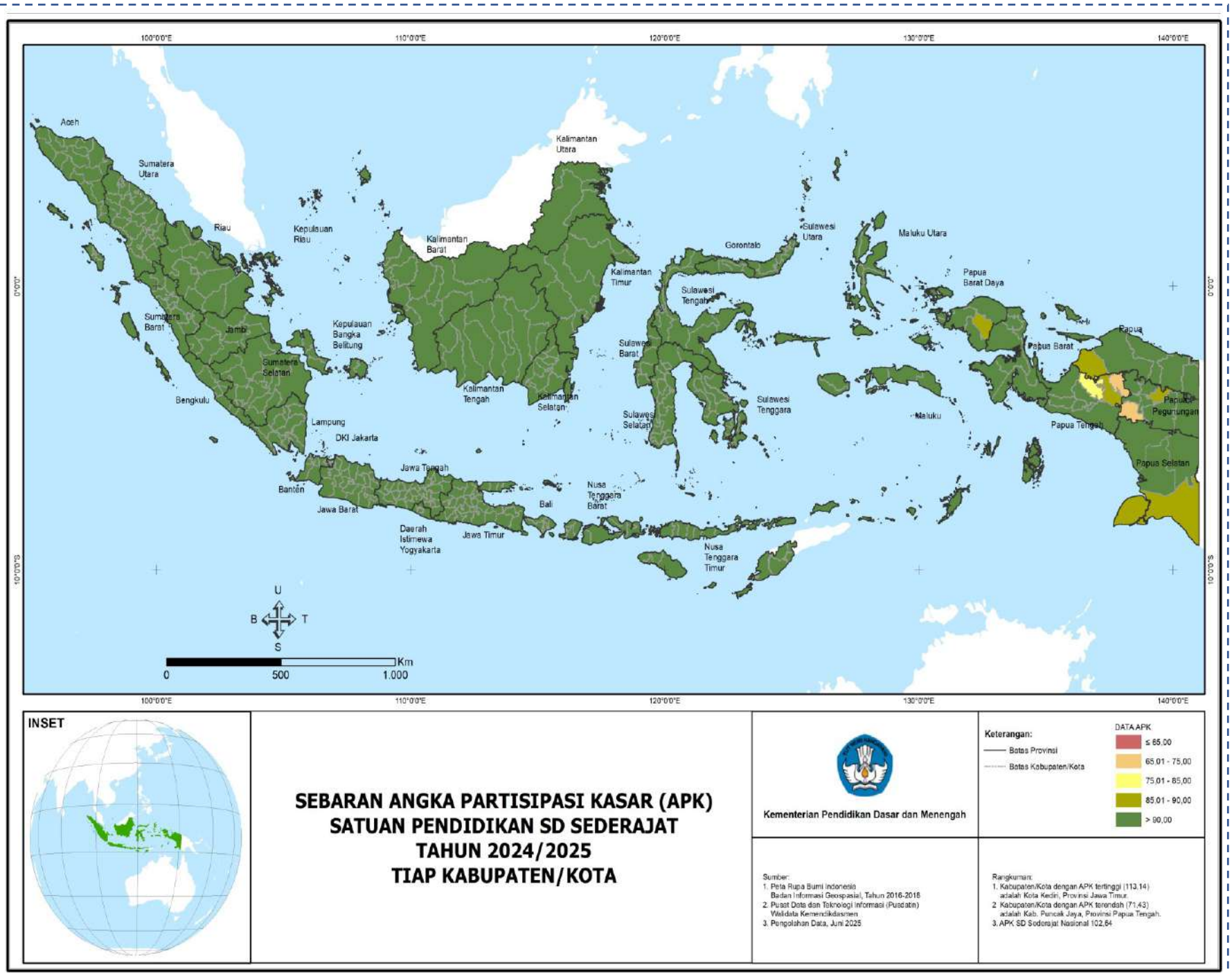
Kuadran II:
2 provinsi yang capaian APK tahun 2024 di bawah capaian nasional, namun capaian APM tahun 2024 di atas capaian nasional.

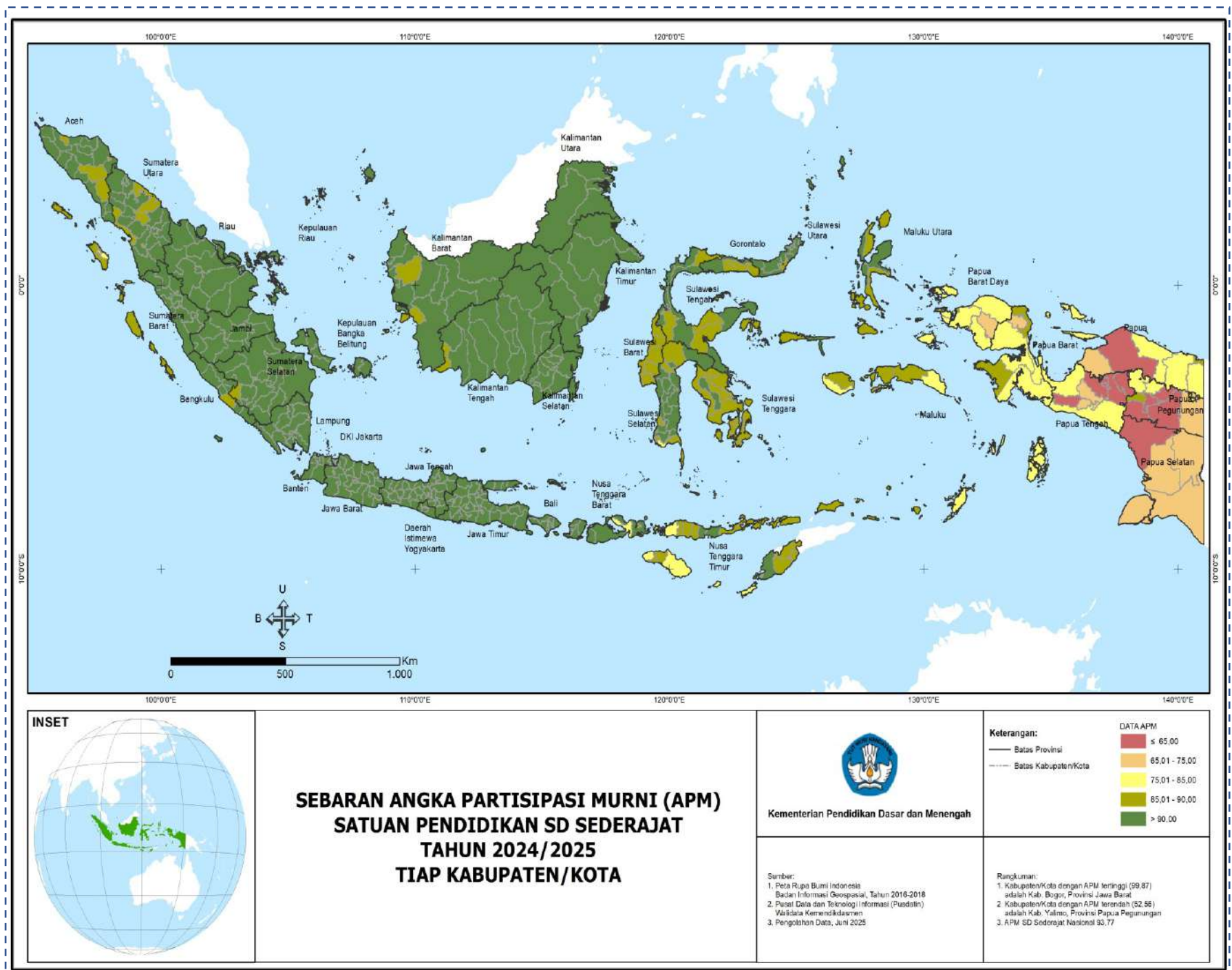
Kuadran III:
21 provinsi yang capaian APK tahun 2024 dan capaian APM tahun 2024 di bawah capaian nasional.

Kuadran IV:
6 provinsi yang capaian APK tahun 2024 di atas capaian nasional, namun capaian APM tahun 2024 di bawah capaian nasional.

Provinsi Sumatera Barat, Nusa Tenggara Barat, Bengkulu, Aceh, Kalimantan Barat, dan Sumatera Selatan merupakan provinsi yang masuk dalam Kuadran IV, di mana capaian APK-nya di atas kondisi nasional namun capaian APM-nya di bawah kondisi nasional. Hal ini menunjukkan bahwa penduduk usia 7 - 12 tahun di enam provinsi ini yang masuk dalam sistem pendidikan secara proporsi masih di bawah provinsi lain.

Kemudian untuk Prov. Jawa Barat, penduduk usia 7 - 12 tahun yang masuk dalam sistem pendidikan memiliki proporsi yang tinggi dibandingkan dengan provinsi lain.





Tabel 7. Statistik Deskriptif APK dan APM SD Sederajat Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2023–2024

Kategori	APK 2023				APK 2024			
	Minimum	Maximum	Mean	Std. Dev.	Minimum	Maximum	Mean	Std. Dev.
Kabupaten	63,66	142,13	100,25	6,91	71,43	112,36	101,59	4,18
Kota	86,66	118,12	101,66	4,64	97,08	113,14	102,82	2,66
Kabupaten+Kota	63,66	142,13	100,52	6,56	71,43	113,14	101,82	3,97

Kategori	APM 2023				APM 2024			
	Minimum	Maximum	Mean	Std. Dev.	Minimum	Maximum	Mean	Std. Dev.
Kabupaten	50,87	99,61	88,83	7,61	52,56	99,87	90,42	7,22
Kota	77,31	99,27	92,58	4,11	85,27	99,54	93,86	3,40
Kabupaten+Kota	50,87	99,61	89,55	7,23	52,56	99,87	91,08	6,80

Rata-rata APK dan APM kabupaten/kota tahun 2024 naik dari tahun 2023.

Standar deviasi APK kabupaten/kota pada tahun 2024 sebesar 3,97 atau turun sebesar 2,59 dari standard deviasi APK tahun 2023. Hal ini menunjukkan adanya penurunan variasi atau kesenjangan APK antar kabupaten/kota.

Sementara itu, standar deviasi APM kabupaten/kota menurun dari 7,23 pada tahun 2023 menjadi 6,80 pada tahun 2024.

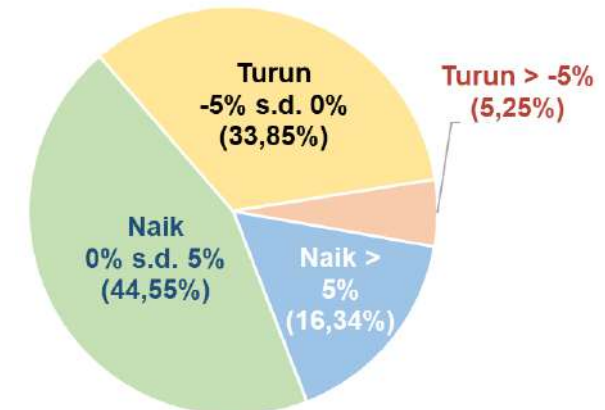
Tabel 8. Jumlah Kabupaten/Kota Menurut Perubahan APK SD Sederajat Tahun 2023–2024

Kategori	Perubahan APK Kabupaten/Kota				Jumlah
	Naik > 5%	Naik 0% s.d. 5%	Turun -5% s.d. 0%	Turun > -5%	
Kabupaten	66	188	141	21	416
Kota	18	41	33	6	98
Kabupaten+Kota	84	229	174	27	514

Dari 416 kabupaten, capaian APK tahun 2024 yang turun lebih dari 5% sebanyak 21 kabupaten, turun tidak lebih dari 5% sebanyak 141 kabupaten, naik hingga 5% sebanyak 188 kabupaten, dan sebanyak 66 kabupaten dengan kenaikan lebih dari 5% dari capaian APK tahun 2023.

Dari 98 kota, capaian APK tahun 2024 yang turun lebih dari 5% sebanyak 6 kota, turun tidak lebih dari 5% sebanyak 33 kota, naik hingga 5% sebanyak 41 kota, dan terdapat 18 kota dengan kenaikan lebih dari 5% dari capaian APK tahun 2023.

Grafik 15. Persentase Kabupaten/Kota Menurut Perubahan APK SD Sederajat Tahun 2023–2024



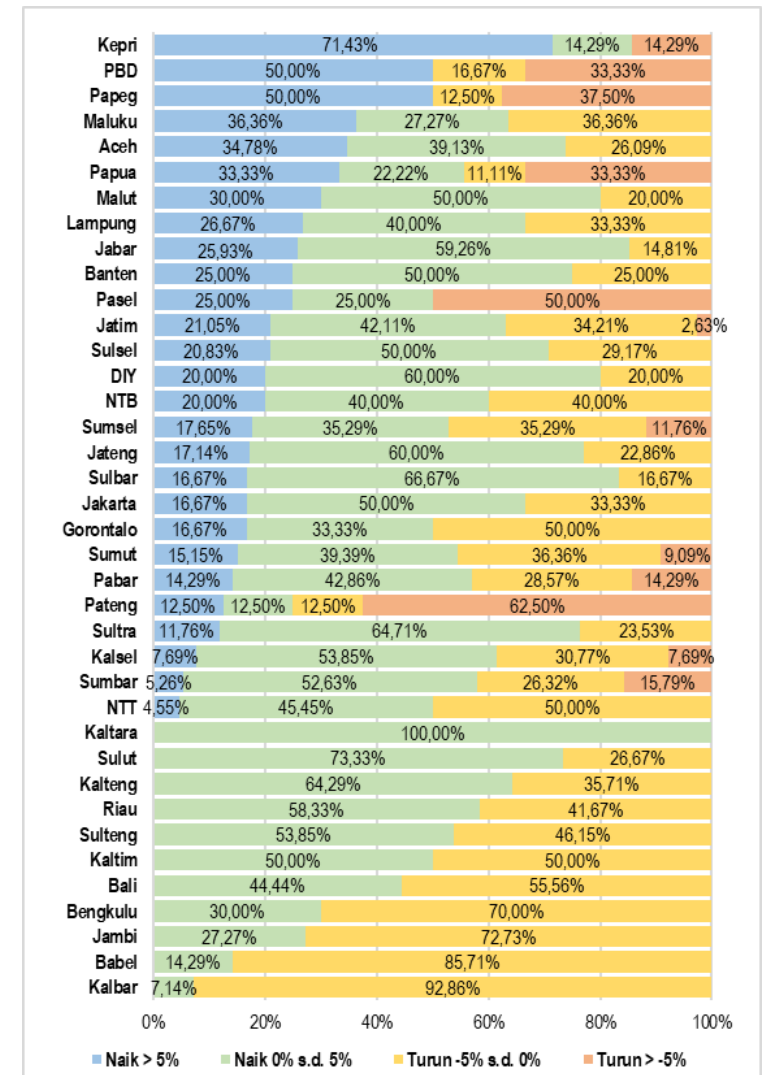
Secara nasional, lebih dari setengah kabupaten/kota yang mengalami kenaikan APK pada tahun 2024. Sekitar 44,55% kabupaten/kota dengan capaian APK naik tidak lebih dari 5% dan sekitar 16,34% dengan capaian APK naik lebih dari 5% dari capaian APK tahun 2023.

Provinsi dengan persentase kabupaten/kota yang mengalami penurunan APK tahun 2023 terbanyak adalah Kalimantan Barat yaitu 13 kabupaten/kota. Sedangkan provinsi dengan persentase kabupaten/kota yang mengalami peningkatan terbanyak adalah Kalimantan Utara dengan seluruh kabupaten/kotanya naik dengan persentase tidak lebih dari 5%.

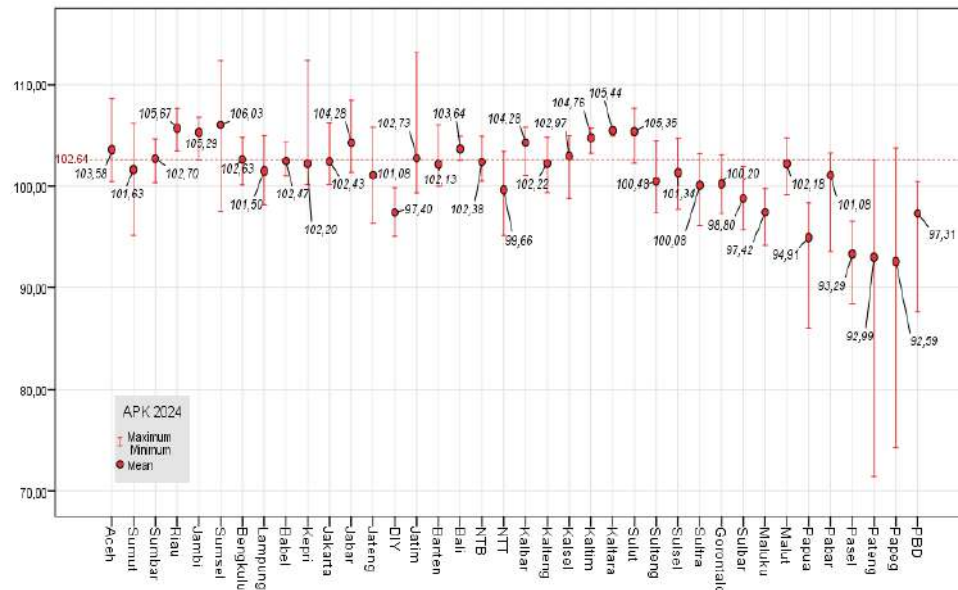
Tabel 9. Jumlah Kabupaten/Kota Menurut Perubahan APK SD Sederajat Tahun 2023–2024 Tiap Provinsi

No	Provinsi	Perubahan APK Kabupaten/Kota			
		Naik > 5%	Naik 0% s.d. 5%	Turun -5% s.d. 0%	Turun > -5%
1	Aceh	8	9	6	-
2	Sumatera Utara	5	13	12	3
3	Sumatera Barat	1	10	5	3
4	Riau	-	7	5	-
5	Jambi	-	3	8	-
6	Sumatera Selatan	3	6	6	2
7	Bengkulu	-	3	7	-
8	Lampung	4	6	5	-
9	Kep. Bangka Belitung	-	1	6	-
10	Kepulauan Riau	5	1	-	1
11	DKI Jakarta	1	3	2	-
12	Jawa Barat	7	16	4	-
13	Jawa Tengah	6	21	8	-
14	DI Yogyakarta	1	3	1	-
15	Jawa Timur	8	16	13	1
16	Banten	2	4	2	-
17	Bali	-	4	5	-
18	Nusa Tenggara Barat	2	4	4	-
19	Nusa Tenggara Timur	1	10	11	-
20	Kalimantan Barat	-	1	13	-
21	Kalimantan Tengah	-	9	5	-
22	Kalimantan Selatan	1	7	4	1
23	Kalimantan Timur	-	5	5	-
24	Kalimantan Utara	-	5	-	-
25	Sulawesi Utara	-	11	4	-
26	Sulawesi Tengah	-	7	6	-
27	Sulawesi Selatan	5	12	7	-
28	Sulawesi Tenggara	2	11	4	-
29	Gorontalo	1	2	3	-
30	Sulawesi Barat	1	4	1	-
31	Maluku	4	3	4	-
32	Maluku Utara	3	5	2	-
33	Papua	3	2	1	3
34	Papua Barat	1	3	2	1
35	Papua Selatan	1	1	-	2
36	Papua Tengah	1	1	1	5
37	Papua Pegunungan	4	-	1	3
38	Papua Barat Daya	3	-	1	2
Indonesia		84	229	174	27

Grafik 16. Persentase Kabupaten/Kota Menurut Perubahan APK SD Sederajat Tahun 2023–2024 Tiap Provinsi



Grafik 17. Gap APK SD Sederajat Kabupaten/Kota Tahun 2024 Tiap Provinsi

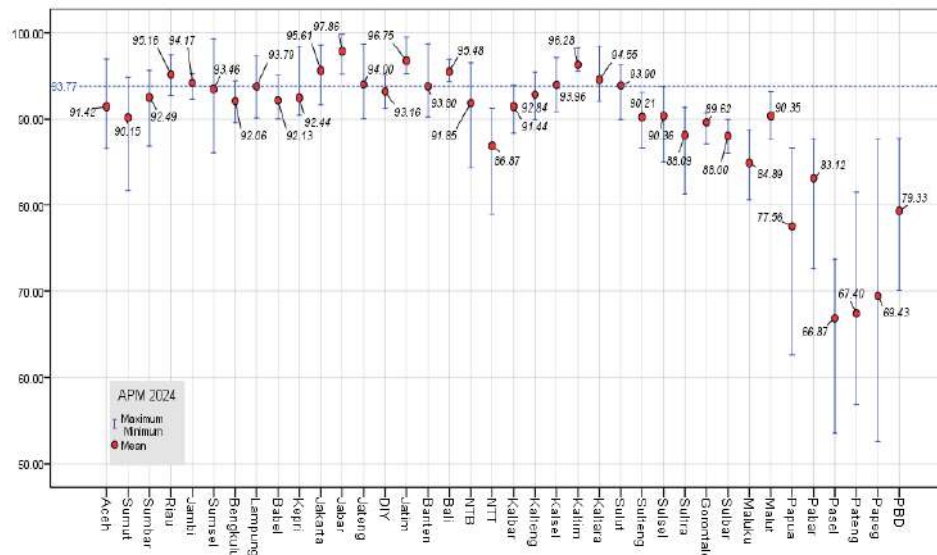


Perbandingan *gap* capaian APK kabupaten/kota 2024 menurut provinsi

Dua provinsi yang memiliki *gap* capaian APK kabupaten/kota tahun 2024 yang cukup tinggi jika dibandingkan dengan provinsi lain yaitu **Papua Tengah** dan **Papua Pegunungan**.

Sedangkan, provinsi yang memiliki capaian *gap* yang rendah, yaitu **Bali**, **Kalimantan Timur**, dan **Kalimantan Utara**.

Grafik 18. Gap APM SD Sederajat Kabupaten/Kota Tahun 2024 Tiap Provinsi

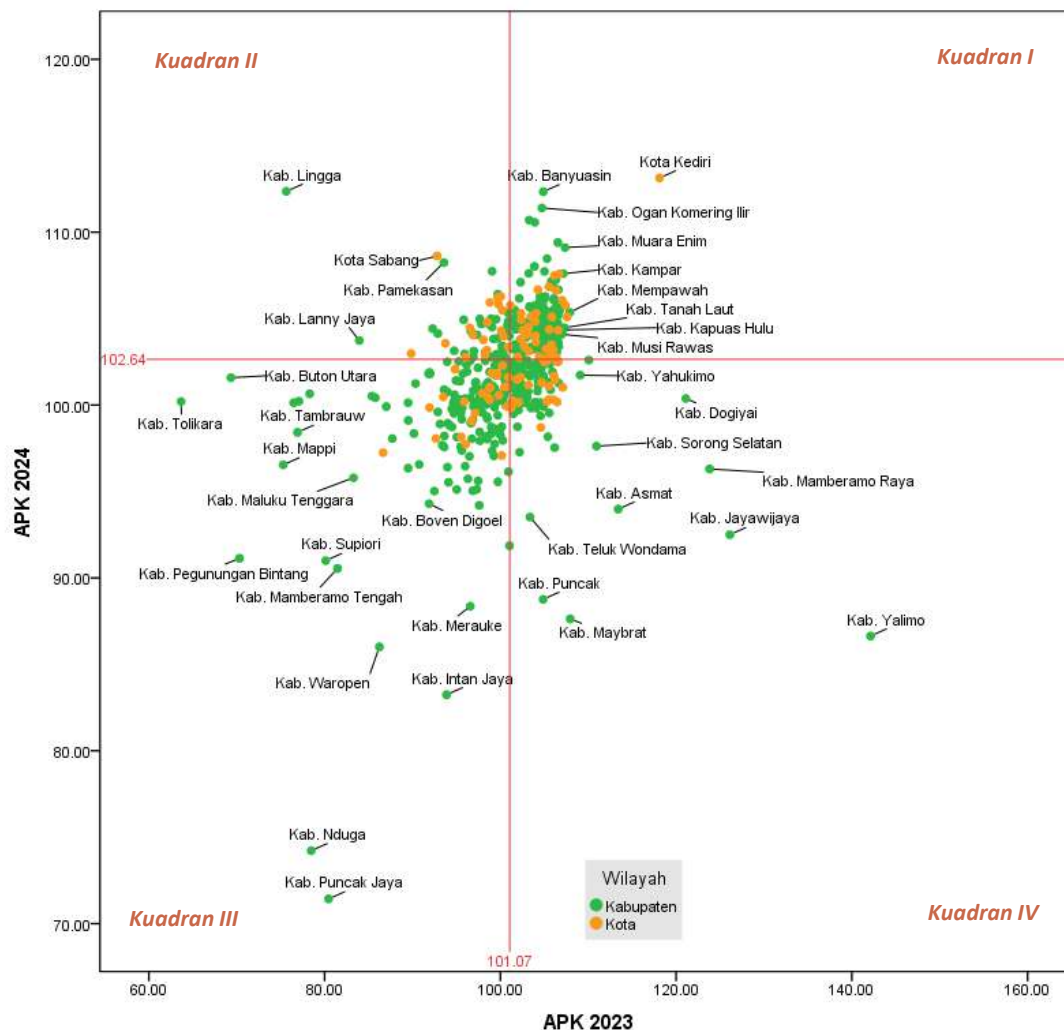


Perbandingan *gap* capaian APM kabupaten/kota 2024 menurut provinsi

Lima provinsi yang memiliki *gap* capaian APM kabupaten/kota tahun 2024 yang cukup tinggi jika dibandingkan dengan provinsi lain yaitu **Papua**, **Papua Selatan**, **Papua Tengah**, dan **Papua Pegunungan**.

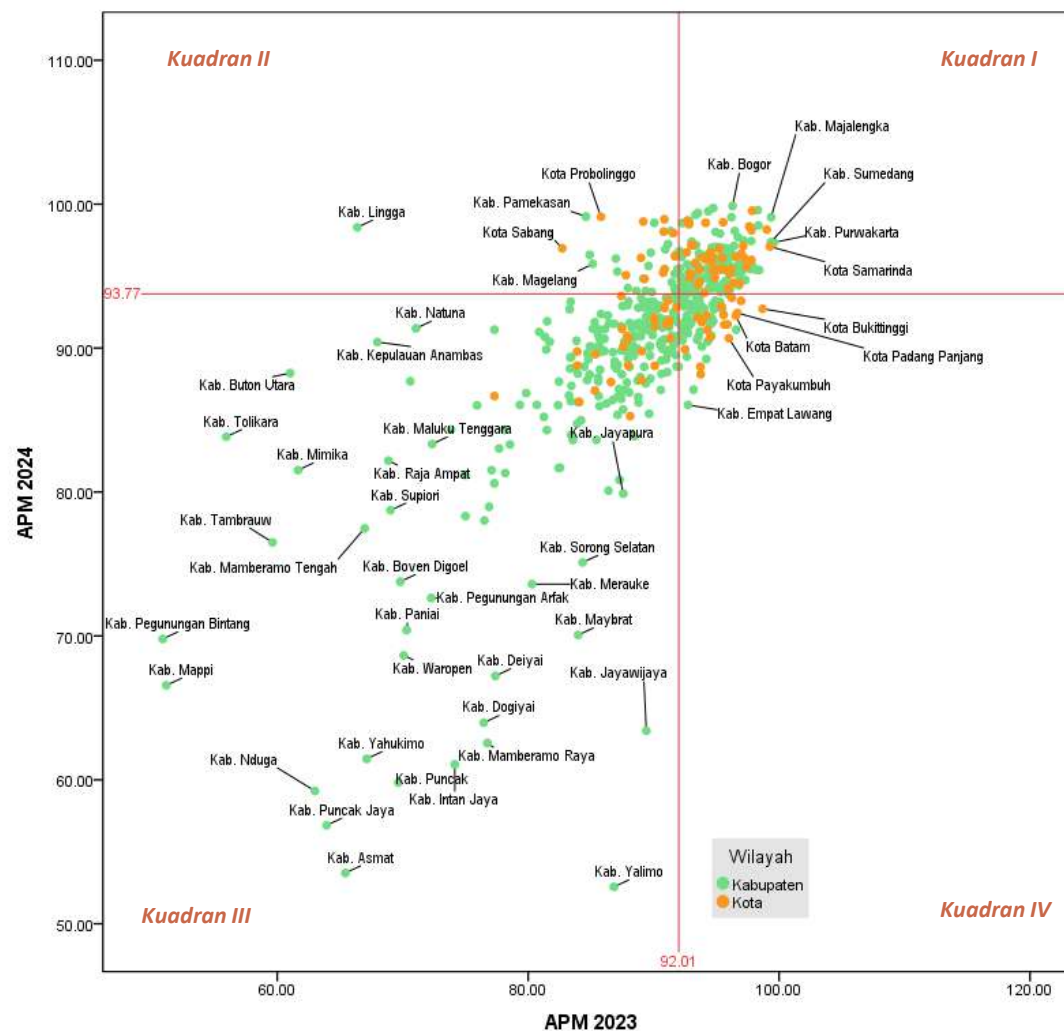
Sedangkan provinsi yang memiliki capaian *gap* rendah yaitu **Jambi**, **Kalimantan Timur**, **Bali**, dan **Gorontalo**.

Grafik 19. Sebaran Kabupaten/Kota Menurut Kuadran APK SD Sederajat Tahun 2023 dengan APK SD Sederajat Tahun 2024



Nama kabupaten/kota yang tertulis pada grafik hanya karena menyesuaikan dengan ukuran grafik

Grafik 20. Sebaran Kabupaten/Kota Menurut Kuadran APM SD Sederajat Tahun 2023 dengan APM SD Sederajat Tahun 2024



Nama kabupaten/kota yang tertulis pada grafik hanya karena menyesuaikan dengan ukuran grafik

Kuadran I:
152 kabupaten/kota yang capaian APM tahun 2023 dan capaian APM tahun 2024 di atas capaian APM nasional.

Kuadran II:
35 kabupaten/kota yang capaian APM tahun 2023 di bawah capaian APM nasional, namun capaian APM tahun 2024 di atas capaian APM nasional.

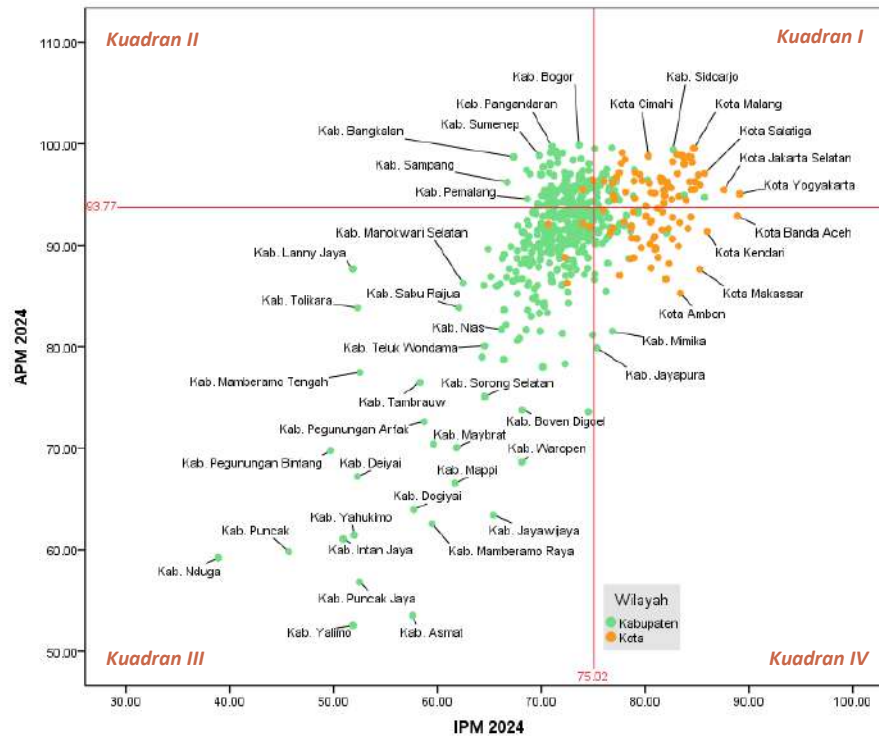
Kuadran III:
249 kabupaten/kota yang capaian APM tahun 2023 dan capaian APM tahun 2024 di bawah capaian APM nasional.

Kuadran IV:
78 kabupaten/kota yang capaian APM tahun 2023 di atas capaian APM nasional, namun capaian APM tahun 2024 di bawah capaian APM nasional.

IPM VS APK-APM SD/MI & SEDERAJAT



Grafik 21. Sebaran Kabupaten/Kota Menurut Kuadran IPM 2024 dengan APM SD Sederajat 2024

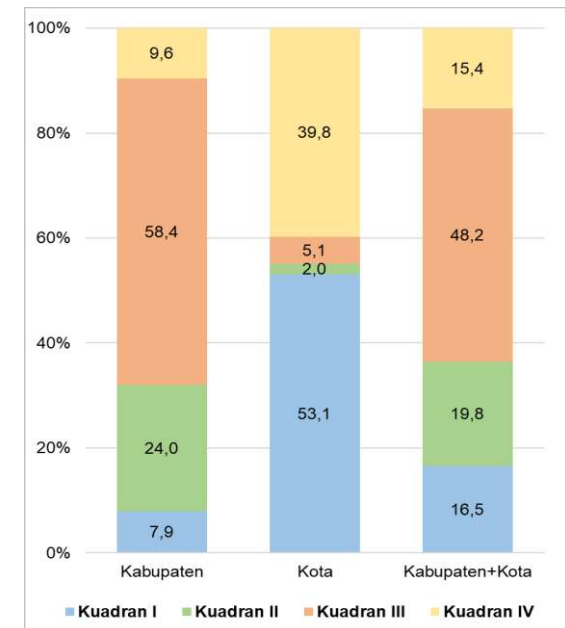


Nama kabupaten/kota yang tertulis pada grafik hanya karena menyesuaikan dengan ukuran grafik

Tabel 10. Jumlah Kabupaten/Kota Menurut Kuadran IPM 2024 dengan APM SD Sederajat Tahun 2024

Kuadran	Kabupaten		Kota		Kabupaten+Kota	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
Kuadran I	33	7,9	52	53,1	85	16,5
Kuadran II	100	24,0	2	2,0	102	19,8
Kuadran III	243	58,4	5	5,1	248	48,2
Kuadran IV	40	9,6	39	39,8	79	15,4
Jumlah	416	100,0	98	100,0	514	100,0

Grafik 22. Persentase Kabupaten/Kota Menurut Kuadran IPM 2024 dengan APM SD Sederajat 2024



Kuadran I:

85 (16,5%) kabupaten/kota yang capaian IPM 2024 dan capaian APM 2024 di atas capaian nasional.

Kuadran II:

102 (19,8%) kabupaten/kota yang capaian IPM 2024 di bawah capaian nasional dan capaian APM 2024 di capaian nasional.

Kuadran III:

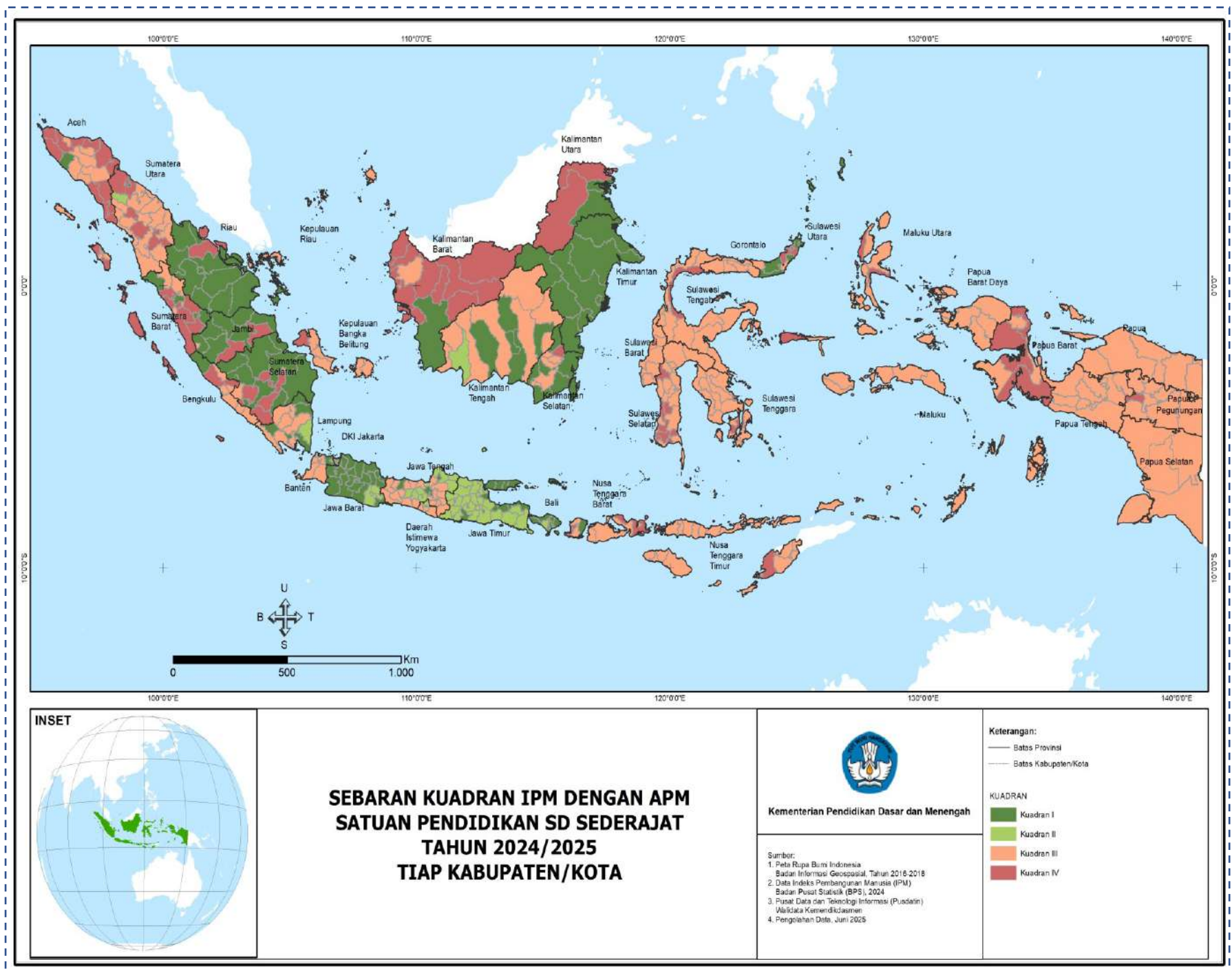
248 (48,2%) kabupaten/kota yang capaian IPM 2024 dan APM 2024 di bawah capaian nasional.

Kuadran IV:

79 (15,4%) kabupaten/kota yang capaian IPM 2024 di atas capaian nasional, namun APM 2024 di bawah capaian nasional.

Tabel 11. Jumlah Kabupaten/Kota Menurut Kuadran IPM 2024 dengan APM SD Sederajat 2024 Tiap Provinsi

No	Provinsi	Kabupaten				Kota				Total
		Kuadran I	Kuadran II	Kuadran III	Kuadran IV	Kuadran I	Kuadran II	Kuadran III	Kuadran IV	
1	Aceh	1	-	12	5	1	-	1	3	23
2	Sumatera Utara	1	-	15	9	1	-	1	6	33
3	Sumatera Barat	1	2	8	1	1	-	-	6	19
4	Riau	3	6	-	1	2	-	-	-	12
5	Jambi	-	7	2	-	1	-	-	1	11
6	Sumatera Selatan	-	7	6	-	1	1	-	2	17
7	Bengkulu	-	1	7	1	1	-	-	-	10
8	Lampung	-	6	7	-	1	-	-	1	15
9	Kep. Bangka Belitung	-	-	6	-	1	-	-	-	7
10	Kepulauan Riau	-	1	1	3	-	-	-	2	7
11	DKI Jakarta	-	-	-	1	5	-	-	-	6
12	Jawa Barat	1	17	-	-	8	1	-	-	27
13	Jawa Tengah	2	9	12	6	6	-	-	-	35
14	DI Yogyakarta	1	-	1	2	1	-	-	-	5
15	Jawa Timur	9	20	-	-	9	-	-	-	38
16	Banten	1	-	3	-	2	-	-	2	8
17	Bali	6	2	-	-	1	-	-	-	9
18	Nusa Tenggara Barat	-	1	6	1	1	-	-	1	10
19	Nusa Tenggara Timur	-	-	21	-	-	-	-	1	22
20	Kalimantan Barat	-	1	11	-	-	-	1	1	14
21	Kalimantan Tengah	1	4	8	-	1	-	-	-	14
22	Kalimantan Selatan	1	5	5	-	1	-	-	1	13
23	Kalimantan Timur	4	3	-	-	3	-	-	-	10
24	Kalimantan Utara	-	2	2	-	1	-	-	-	5
25	Sulawesi Utara	1	6	2	2	3	-	-	1	15
26	Sulawesi Tengah	-	-	12	-	-	-	-	1	13
27	Sulawesi Selatan	-	-	18	3	-	-	-	3	24
28	Sulawesi Tenggara	-	-	14	1	-	-	-	2	17
29	Gorontalo	-	-	5	-	-	-	-	1	6
30	Sulawesi Barat	-	-	6	-	-	-	-	-	6
31	Maluku	-	-	8	1	-	-	1	1	11
32	Maluku Utara	-	-	8	-	-	-	1	1	10
33	Papua	-	-	7	1	-	-	-	1	9
34	Papua Barat	-	-	6	1	-	-	-	-	7
35	Papua Selatan	-	-	4	-	-	-	-	-	4
36	Papua Tengah	-	-	7	1	-	-	-	-	8
37	Papua Pegunungan	-	-	8	-	-	-	-	-	8
38	Papua Barat Daya	-	-	5	-	-	-	-	1	6
INDONESIA		33	100	243	40	52	2	5	39	514

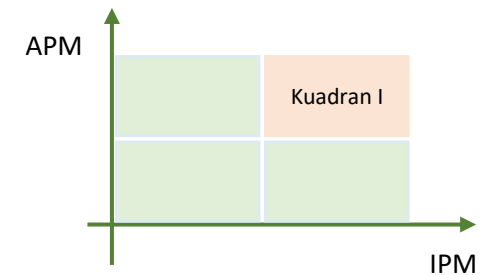


Kuadran I : Kabupaten/Kota yang capaian IPM 2024 dan capaian APM 2024 di atas capaian nasional

Tabel 12. Jumlah Kabupaten/Kota Kuadran I IPM dengan APM SD Sederajat Menurut Klasifikasi Faktor IPM Tahun 2024

No	Klasifikasi IPM	Kabupaten	Kota	Kabupaten+Kota
1	Tiga Faktor di Atas Capaian Nasional	9	42	51
2	Masalah Eko	2	2	4
3	Masalah Kes	1	2	3
4	Masalah Kes dan Eko	2	-	2
5	Masalah Pend (RLS)	5	-	5
6	Masalah Pend (HLS)	7	5	12
7	Masalah Pend	4	-	4
8	Masalah Pend (RLS), Eko, dan Kes	-	-	-
9	Masalah Pend (RLS) dan Kes	-	-	-
10	Masalah Pend (RLS) dan Eko	1	-	1
11	Masalah Pend (HLS), Eko, dan Kes	-	-	-
12	Masalah Pend (HLS) dan Kes	1	-	1
13	Masalah Pend (HLS) dan Eko	-	1	1
14	Masalah Pend dan Eko	-	-	-
15	Masalah Pend dan Kes	1	-	1
16	Masalah pada Tiga Faktor	-	-	-
	Jumlah	33	52	85

Sebagian besar permasalahan dari faktor IPM adalah Harapan Lama Sekolah (HLS), Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan masalah ekonomi. Kabupaten/kota yang memiliki masalah HLS ada sebanyak 7 kabupaten dan 4 kota. Kabupaten yang memiliki masalah RLS sebanyak 5 kabupaten. Sedangkan kabupaten/kota yang memiliki masalah ekonomi ada sebanyak 2 kabupaten dan 2 kota.



Kabupaten/kota yang termasuk dalam Kuadran I yaitu memiliki capaian IPM 2024 dan capaian APM 2024 di atas capaian nasional ada sebanyak 85 yang terdiri dari 33 kabupaten dan 52 kota.

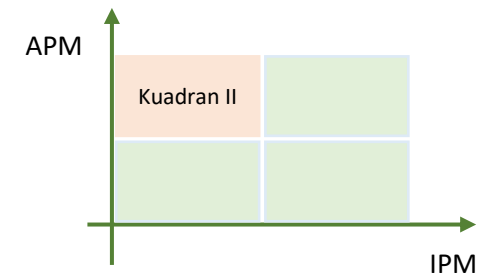
Ada 51 kabupaten/kota yaitu 9 kabupaten dan 42 kota yang capaian ketiga faktor IPM-nya di atas capaian nasional. Sementara itu, pada kabupaten/kota lainnya masih terdapat masalah karena capaian faktor IPM-nya berada di bawah capaian nasional.

Kuadran II : Kabupaten/Kota yang capaian IPM 2024 di bawah capaian nasional dan capaian APM 2024 di atas capaian nasional

Tabel 13. Jumlah Kabupaten/Kota Kuadran II IPM dengan APM SD Sederajat Menurut Klasifikasi Faktor IPM Tahun 2024

No	Klasifikasi IPM	Kabupaten	Kota	Kabupaten+Kota
1	Tiga Faktor di Atas Capaian Nasional	-	-	-
2	Masalah Eko	-	-	-
3	Masalah Kes	-	-	-
4	Masalah Kes dan Eko	4	1	5
5	Masalah Pend (RLS)	1	-	1
6	Masalah Pend (HLS)	-	-	-
7	Masalah Pend	10	-	10
8	Masalah Pend (RLS), Eko, dan Kes	5	-	5
9	Masalah Pend (RLS) dan Kes	-	-	-
10	Masalah Pend (RLS) dan Eko	4	1	5
11	Masalah Pend (HLS), Eko, dan Kes	5	-	5
12	Masalah Pend (HLS) dan Kes	1	-	1
13	Masalah Pend (HLS) dan Eko	3	-	3
14	Masalah Pend dan Eko	40	-	40
15	Masalah Pend dan Kes	4	-	4
16	Masalah pada Tiga Faktor	23	-	23
	Jumlah	100	2	102

Terdapat 23 kabupaten dengan masalah pada ketiga faktor, 40 kabupaten dengan masalah pada pendidikan dan ekonomi, dan 10 kabupaten dengan masalah pada pendidikan.



Kabupaten/kota yang termasuk dalam Kuadran II yaitu memiliki capaian IPM 2024 di bawah capaian nasional dan capaian APM 2024 di atas capaian nasional ada sebanyak 102 yang terdiri dari 100 kabupaten dan 2 kota.

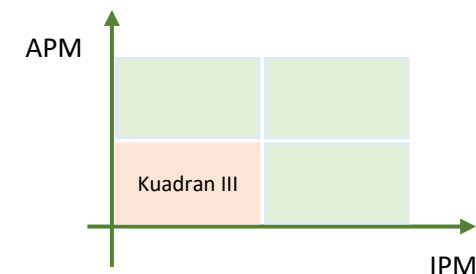
Semua kabupaten/kota pada Kuadran II memiliki masalah dalam capaian faktor IPM-nya karena berada di bawah capaian nasional.

Berdasarkan klasifikasi, permasalahan yang banyak dialami oleh daerah kabupaten adalah permasalahan pendidikan dan ekonomi, dan masalah pada ketiga faktor (pendidikan, kesehatan, dan ekonomi).

Kuadran III : Kabupaten/Kota yang capaian IPM 2024 dan capaian APM 2024 di bawah capaian nasional

Tabel 14. Jumlah Kabupaten/Kota Kuadran III IPM dengan APM SD Sederajat Menurut Klasifikasi Faktor IPM Tahun 2024

No	Klasifikasi IPM	Kabupaten	Kota	Kabupaten+Kota
1	Tiga Faktor di Atas Capaian Nasional	-	-	-
2	Masalah Eko	2	-	2
3	Masalah Kes	-	-	-
4	Masalah Kes dan Eko	26	2	28
5	Masalah Pend (RLS)	1	-	1
6	Masalah Pend (HLS)	-	-	-
7	Masalah Pend	3	1	4
8	Masalah Pend (RLS), Eko, dan Kes	43	1	44
9	Masalah Pend (RLS) dan Kes	2	-	2
10	Masalah Pend (RLS) dan Eko	11	1	12
11	Masalah Pend (HLS), Eko, dan Kes	27	-	27
12	Masalah Pend (HLS) dan Kes	3	-	3
13	Masalah Pend (HLS) dan Eko	-	-	-
14	Masalah Pend dan Eko	19	-	19
15	Masalah Pend dan Kes	13	-	13
16	Masalah pada Tiga Faktor	93	-	93
	Jumlah	243	5	248



Kabupaten/kota yang termasuk dalam Kuadran III yaitu memiliki capaian IPM 2024 dan APM 2024 di bawah capaian nasional ada sebanyak 248 yang terdiri dari 243 kabupaten dan 5 kota.

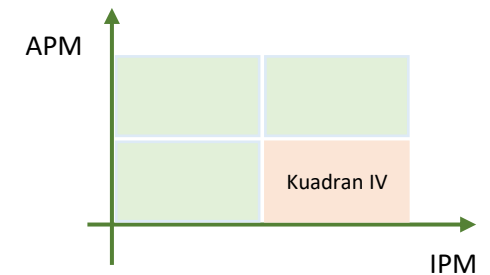
Semua kabupaten/kota pada Kuadran III memiliki masalah dalam capaian APM dan faktor IPM-nya karena berada di bawah capaian nasional.

Berdasarkan klasifikasi, permasalahan yang banyak dialami oleh daerah kabupaten adalah masalah pada ketiga faktor (pendidikan, kesehatan, dan ekonomi) yaitu ada sebanyak 93 kabupaten yang ketiga faktor IPM-nya berada di bawah capaian nasional.

Kuadran IV : Kabupaten/Kota yang capaian IPM 2024 di atas capaian nasional dan capaian APM 2024 di bawah capaian nasional

Tabel 15. Jumlah Kabupaten/Kota Kuadran IV IPM dengan APM SD Sederajat Menurut Klasifikasi Faktor IPM Tahun 2024

No	Klasifikasi IPM	Kabupaten	Kota	Kabupaten+Kota
1	Tiga Faktor di Atas Capaian Nasional	10	22	32
2	Masalah Eko	4	4	8
3	Masalah Kes	4	8	12
4	Masalah Kes dan Eko	9	2	11
5	Masalah Pend (RLS)	1	-	1
6	Masalah Pend (HLS)	4	2	6
7	Masalah Pend	2	-	2
8	Masalah Pend (RLS), Eko, dan Kes	1	-	1
9	Masalah Pend (RLS) dan Kes	1	-	1
10	Masalah Pend (RLS) dan Eko	1	-	1
11	Masalah Pend (HLS), Eko, dan Kes	-	-	-
12	Masalah Pend (HLS) dan Kes	2	-	2
13	Masalah Pend (HLS) dan Eko	1	1	2
14	Masalah Pend dan Eko	-	-	-
15	Masalah Pend dan Kes	-	-	-
16	Masalah pada Tiga Faktor	-	-	-
	Jumlah	40	39	79



Kabupaten/kota yang termasuk dalam Kuadran IV yaitu memiliki capaian IPM 2024 di atas capaian nasional dan capaian APM 2024 di bawah capaian nasional ada sebanyak 79 yang terdiri dari 40 kabupaten dan 39 kota.

Ada 32 kabupaten/kota yaitu 10 kabupaten dan 22 kota yang capaian ketiga faktor IPM-nya di atas capaian nasional. Sementara itu, pada kabupaten/kota lainnya masih terdapat masalah karena capaian faktor IPM-nya berada di bawah capaian nasional. Masalah yang terdapat pada daerah kabupaten maupun kota bervariasi.

Rangkuman

Tabel 16. Jumlah Kabupaten/Kota Menurut Kuadran IPM dengan APM SD Sederajat dan Klasifikasi Faktor IPM Tahun 2024

Kuadran	Tiga Faktor di Atas Rerata		Di Bawah Rerata Ekonomi atau Kesehatan		Di Bawah Rerata Pendidikan (HLS atau RLS)		Di Bawah Rerata Pendidikan dan Faktor Lain		Tiga Faktor di Bawah Rerata		Total	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
Kuadran I	51	9,9	9	1,8	21	4,1	4	0,8	-	-	85	16,5
Kuadran II	-	-	5	1,0	11	2,1	63	12,3	23	4,5	102	19,8
Kuadran III	-	-	30	5,8	5	1,0	120	23,3	93	18,1	248	48,2
Kuadran IV	32	6,2	31	6,0	9	1,8	7	1,4	-	-	79	15,4
Jumlah	83	16,1	75	14,6	46	8,9	194	37,7	116	22,6	514	100,0

Kuadran 1 : 85 (16,5%) kabupaten/kota yang capaian IPM 2024 dan capaian APM 2024 di atas capaian nasional

- 51 kabupaten/kota (9,9%) Faktor Pendidikan Masyarakat, Ekonomi dan Kesehatan di atas capaian nasional
- 9 kabupaten/kota (1,8%) Faktor Kesehatan dan Ekonomi di bawah capaian nasional
- 21 kabupaten/kota (4,1%) Faktor Pendidikan Masyarakat (HLS atau RLS) di bawah capaian nasional
- 4 kabupaten/kota (0,8%) Faktor Pendidikan Masyarakat dan Faktor lain di bawah capaian nasional

Kuadran 2 : 102 (19,8%) kabupaten/kota yang capaian IPM 2024 di bawah capaian nasional dan capaian APM 2024 di atas capaian nasional

- 5 kabupaten/kota (1,0%) Faktor Kesehatan dan Ekonomi di bawah capaian nasional
- 11 kabupaten/kota (4,1%) Faktor Pendidikan Masyarakat (HLS atau RLS) di bawah capaian nasional
- 63 kabupaten/kota (12,3%) Faktor Pendidikan Masyarakat dan Faktor lain di bawah capaian nasional
- 23 kabupaten/kota (4,5%) ketiga faktor di bawah capaian nasional

Kuadran 3 : 248 (48,2%) kabupaten/kota yang capaian IPM 2024 dan capaian APM 2024 di bawah capaian nasional

- 30 kabupaten/kota (5,8%) Faktor Kesehatan dan Ekonomi di bawah capaian nasional
- 5 kabupaten/kota (1,0%) Faktor Pendidikan Masyarakat (HLS atau RLS) di bawah capaian nasional
- 120 kabupaten/kota (23,3%) Faktor Pendidikan Masyarakat dan Faktor lain di bawah capaian nasional
- 93 kabupaten/kota (18,1%) ketiga faktor di bawah capaian nasional

Kuadran 4 : 79 (15,4%) kabupaten/kota yang capaian IPM 2023 di atas capaian nasional dan capaian APM 2023 di bawah capaian nasional

- 32 kabupaten/kota (6,2%) Faktor Pendidikan Masyarakat, Ekonomi dan Kesehatan di atas capaian nasional
- 31 kabupaten/kota (6,0%) Faktor Kesehatan dan Ekonomi di bawah capaian nasional
- 9 kabupaten/kota (1,8%) Faktor Pendidikan Masyarakat (HLS atau RLS) di bawah capaian nasional
- 7 kabupaten/kota (1,4%) Faktor Pendidikan Masyarakat dan Faktor lain di bawah capaian nasional

Bervariasinya capaian partisipasi masyarakat dalam mendapatkan akses pendidikan, dan bervariasinya latar belakang masyarakat di masing-masing wilayah, memerlukan suatu strategi dalam implementasi kebijakan pembinaan pendidikan yang disesuaikan dengan kondisi masyarakatnya (pendidikan masyarakat, ekonomi masyarakat dan kesehatan masyarakat) untuk mewujudkan pemerataan pendidikan yang berkualitas.

Daftar Pustaka

- Arsani, A. M., Ario, B., & Ramadhan, A. F. (2020). Impact of education on poverty and health: Evidence from Indonesia. *Economics Development Analysis Journal*, 9(1), 87-96.
- Bappenas. (2019). *Indonesia 2045: Berdaulat, Maju, Adil, dan Makmur*. Jakarta: Kementerian PPN/Bappenas.
- Becker, G. S. (1962). Investment in Human Capital: A Theoretical Analysis. *Journal of Political Economy*, 70(5), 9–49.
- BPS. (2024). *Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Indonesia 2024*.
- Kemendikbudristek. (2024). *Laporan Kinerja 2024*.
- Nurlina, N., Ridha, A., & Asnidar, A. (2024). Analisis Determinan Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia Tahun 1990-2021. *Jurnal Samudra Ekonomi dan Bisnis*, 14(2), 239-250.
- OECD. (2018). *Aktif Bersama Indonesia*.
- Rakasiwi, L. S., & Kautsar, A. (2021). Pengaruh Faktor Demografi dan Sosial Ekonomi terhadap Status Kesehatan Individu di Indonesia. *Kajian Ekonomi Dan Keuangan*, 5(2), 146-157.
- Republik Indonesia. (2020). *Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024*.
- Schultz, T. W. (1961). Investment in Human Capital. *American Economic Association*, 51(1), 1–17.
- Septadarman, A. C., & Rambe, R. A. (2024). Analysis of the Influence of Population Growth, Education, and Health on Poverty in Indonesia from 2018 to 2023. *East Asian Journal of Multidisciplinary Research*, 3(1), 129-142.
- Sitanggang, D. A., & Jasmina, T. (2024). Pengaruh Bantuan Operasional Sekolah terhadap Pemenuhan Akses Pendidikan Menengah di Indonesia. *Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara dan Kebijakan Publik*, 8(4), 307-320.
- Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2012). *Economic Developement*. In Pearson.
- UN. (2016). *Transforming our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development*. United Nations.
- UNDP. (1990). *Human Development Report 1990: Concept and Measurement of Human Development*. New York.
- UNDP. (2024). *Human Development Report 2024-24: Breaking the gridlock: Reimagining cooperation in a polarized world*. New York.

LAMPIRAN **IPM & APK-APM** SD/MI SEDERAJAT

Note:

Klasifikasi IPM :

- 1 = Tiga Faktor di Bawah Capaian Nasional
- 2 = Di Bawah Capaian Nasional Pendidikan dan Faktor Lain
- 3 = Di Bawah Capaian Nasional Pendidikan (HLS atau RLS)
- 4 = Di Bawah Capaian Nasional Ekonomi atau Kesehatan
- 5 = Tiga Faktor di Atas Capaian Nasional

No	Kabupaten / Kota	Angka Partisipasi Kasar 2024	Angka Partisipasi Murni 2024	Usia Harapan Hidup 2024	Harapan Lama Sekolah 2024	Rata-Rata Lama Sekolah 2024	Pengeluaran Rill per Kapita per Tahun yang Disesuaikan 2024	Indeks Pembangunan Manusia 2024	Kuadran IPM - APM	Klasifikasi IPM
		(persen)	(persen)	(tahun)	(tahun)	(tahun)	(ribu rupiah)			
	Aceh									
1	Kab. Simeulue	100,42	86,60	69,69	14,53	9,89	8.106	70,95	III	4
2	Kab. Aceh Singkil	104,05	92,80	69,96	14,36	8,72	9.862	71,76	III	2
3	Kab. Aceh Selatan	104,38	92,57	70,49	14,71	8,92	9.190	71,82	III	4
4	Kab. Aceh Tenggara	104,28	89,34	72,75	14,47	10,10	8.876	73,59	III	4
5	Kab. Aceh Timur	106,41	91,71	72,24	13,08	8,48	9.889	71,29	III	1
6	Kab. Aceh Tengah	102,26	91,33	73,04	15,03	10,03	11.805	77,27	IV	4
7	Kab. Aceh Barat	106,17	93,97	72,03	14,93	9,99	10.548	75,45	I	4
8	Kab. Aceh Besar	103,52	92,68	73,24	14,77	10,37	10.810	76,57	IV	4
9	Kab. Pidie	104,70	91,31	69,99	14,52	9,04	11.187	73,60	III	4
10	Kab. Bireuen	103,86	91,52	73,82	14,88	9,59	10.150	75,39	IV	4
11	Kab. Aceh Utara	105,50	93,05	72,75	14,75	9,11	9.374	73,35	III	4
12	Kab. Aceh Barat Daya	101,50	91,55	70,63	13,69	8,78	9.559	71,16	III	2
13	Kab. Gayo Lues	101,42	88,72	69,92	14,59	8,44	9.967	71,75	III	2
14	Kab. Aceh Tamiang	104,14	90,78	73,79	14,51	9,30	9.529	74,00	III	4
15	Kab. Nagan Raya	102,15	90,54	72,67	14,18	9,25	9.523	73,10	III	4
16	Kab. Aceh Jaya	103,12	91,81	70,89	14,06	9,02	11.007	73,40	III	4
17	Kab. Bener Meriah	101,11	91,77	73,00	13,73	10,13	12.360	76,58	IV	4
18	Kab. Pidie Jaya	102,56	88,22	73,31	15,01	9,59	11.274	76,39	IV	4
19	Kota Banda Aceh	102,53	92,90	75,25	17,94	13,10	18.100	88,85	IV	5
20	Kota Sabang	108,62	96,93	73,52	14,97	11,22	12.625	79,50	I	4
21	Kota Langsa	103,77	89,57	74,11	15,71	11,28	13.133	80,96	IV	4
22	Kota Lhokseumawe	101,83	90,84	74,93	15,55	11,31	12.694	80,89	IV	5
23	Kota Subulussalam	104,08	92,10	69,80	15,31	8,43	8.491	70,64	III	2
	Sumatera Utara									
24	Kab. Nias	95,12	81,69	71,89	13,31	6,40	7.698	66,13	III	2
25	Kab. Mandailing Natal	100,16	90,57	71,88	13,87	9,11	10.644	73,44	III	4
26	Kab. Tapanuli Selatan	101,44	90,07	71,77	13,72	9,56	12.213	75,18	IV	4
27	Kab. Tapanuli Tengah	100,95	87,61	71,96	13,50	8,92	11.128	73,34	III	4
28	Kab. Tapanuli Utara	103,48	91,91	74,36	13,74	10,31	12.382	77,48	IV	5
29	Kab. Toba	98,34	88,70	74,54	13,60	10,77	12.960	78,44	IV	5
30	Kab. Labuhanbatu	100,24	90,43	73,13	13,26	9,50	12.102	75,20	IV	4
31	Kab. Asahan	99,91	89,24	73,65	12,65	8,85	12.301	74,17	III	2
32	Kab. Simalungun	102,41	91,81	74,30	13,09	9,73	12.119	75,88	IV	2
33	Kab. Dairi	101,37	90,18	74,38	13,53	9,89	11.355	75,88	IV	4
34	Kab. Karo	100,79	94,47	74,39	13,26	10,12	13.278	77,49	I	5
35	Kab. Deli Serdang	103,39	92,12	73,81	13,40	10,29	13.279	77,56	IV	4
36	Kab. Langkat	104,27	90,88	74,39	13,28	8,74	12.080	74,85	III	2
37	Kab. Nias Selatan	103,14	86,05	71,77	12,92	6,52	7.730	65,87	III	1
38	Kab. Humbang Hasundutan	101,66	92,09	74,27	13,46	10,13	8.844	73,33	III	4
39	Kab. Pakpak Bharat	100,45	88,50	72,95	13,91	9,73	9.158	73,09	III	4
40	Kab. Samosir	104,53	93,00	74,35	13,52	9,61	9.634	73,77	III	4
41	Kab. Serdang Bedagai	99,54	87,11	73,39	12,65	9,12	12.015	74,15	III	2

No	Kabupaten / Kota	Angka Partisipasi Kasar 2024	Angka Partisipasi Murni 2024	Usia Harapan Hidup 2024	Harapan Lama Sekolah 2024	Rata-Rata Lama Sekolah 2024	Pengeluaran Riil per Kapita per Tahun yang Disesuaikan 2024	Indeks Pembangunan Manusia 2024	Kuadran IPM - APM	Klasifikasi IPM
		(persen)	(persen)	(tahun)	(tahun)	(tahun)	(ribu rupiah)			
42	Kab. Batu Bara	100,85	88,21	72,97	13,12	8,51	11.373	73,14	III	1
43	Kab. Padang Lawas utara	102,88	91,75	71,74	13,54	9,82	10.925	74,16	III	4
44	Kab. Padang Lawas	100,09	90,10	71,67	13,87	9,63	9.821	73,10	III	4
45	Kab. Labuhanbatu Selatan	101,80	92,70	72,71	13,53	9,19	12.353	75,11	IV	4
46	Kab. Labuhanbatu Utara	100,09	90,58	74,23	13,58	9,14	12.839	76,20	IV	5
47	Kab. Nias Utara	102,89	89,07	72,30	13,37	7,05	7.189	66,42	III	2
48	Kab. Nias Barat	102,01	85,97	72,55	12,99	7,26	6.740	65,66	III	1
49	Kota Sibolga	99,52	87,05	74,19	13,43	10,45	12.713	77,52	IV	5
50	Kota Tanjung balai	103,36	93,49	74,18	13,15	9,69	12.264	75,95	IV	2
51	Kota Pematangsiantar	104,05	93,63	75,03	14,61	11,82	13.349	81,17	IV	5
52	Kota Tebing Tinggi	103,44	91,93	74,29	13,13	10,87	13.900	78,68	IV	3
53	Kota Medan	106,22	94,81	75,09	14,79	11,79	16.069	83,23	I	5
54	Kota Binjai	103,81	91,66	74,45	14,18	11,20	12.015	78,67	IV	4
55	Kota Padang Sidempuan	98,70	88,70	73,73	14,62	11,13	11.964	78,61	IV	4
56	Kota Gunungsitoli	102,77	88,80	74,23	13,79	8,76	9.056	72,30	III	2
	Sumatera Barat									
57	Kab. Kepulauan Mentawai	102,96	86,87	71,21	12,91	8,03	7.192	66,67	III	1
58	Kab. Pesisir Selatan	103,32	91,79	73,44	13,37	8,81	10.211	72,87	III	2
59	Kab. Solok	103,93	93,41	72,52	13,56	7,91	10.988	72,29	III	2
60	Kab. Sijunjung	103,36	93,05	72,89	12,76	8,62	11.395	72,88	III	1
61	Kab. Tanah Datar	103,47	94,35	74,26	15,05	9,29	11.223	76,49	I	4
62	Kab. Padang Pariaman	102,77	91,68	73,88	14,20	8,42	11.756	74,90	III	2
63	Kab. Agam	103,38	93,35	74,39	14,16	9,23	10.686	75,08	IV	4
64	Kab. Lima puluh Kota	102,62	91,78	73,42	13,42	8,13	10.648	72,51	III	2
65	Kab. Pasaman	102,49	91,61	72,36	13,52	8,14	9.194	70,61	III	2
66	Kab. Solok Selatan	104,40	93,70	72,50	13,07	8,85	11.240	73,17	III	2
67	Kab. Dharmasraya	104,67	95,64	74,25	12,89	8,98	12.254	74,82	II	2
68	Kab. Pasaman Barat	103,93	94,15	72,75	13,72	8,99	9.888	72,78	II	4
69	Kota Padang	100,99	92,78	75,20	16,57	11,63	15.458	84,38	IV	5
70	Kota Solok	102,81	93,84	74,85	14,37	11,37	12.995	80,06	I	5
71	Kota Sawahlunto	101,30	91,26	74,12	13,86	10,53	11.187	76,68	IV	4
72	Kota Padang Panjang	100,31	92,44	74,48	15,47	12,00	11.840	80,60	IV	4
73	Kota Bukittinggi	101,02	92,73	75,62	15,28	11,65	14.297	82,61	IV	5
74	Kota Payakumbuh	100,31	90,69	75,08	14,57	10,89	14.260	80,76	IV	5
75	Kota Pariaman	103,21	92,26	74,37	14,80	11,06	13.784	80,49	IV	5
	Riau									
76	Kab. Kuantan Singingi	105,45	94,92	72,96	13,38	9,14	11.182	74,00	II	4
77	Kab. Indragiri Hulu	106,17	94,68	73,63	12,60	8,43	11.333	72,75	II	1
78	Kab. Indragiri Hilir	106,28	94,88	72,39	12,21	7,32	11.050	70,07	II	1
79	Kab. Pelalawan	104,70	95,29	74,63	12,91	8,96	12.575	75,25	I	3
80	Kab. Siak	105,91	95,36	73,98	12,89	9,92	13.080	76,52	I	2
81	Kab. Kampar	107,60	97,48	74,61	13,61	9,58	12.034	76,29	I	4
82	Kab. Rokan Hulu	106,07	95,79	73,67	12,94	8,94	10.586	73,07	II	2

No	Kabupaten / Kota	Angka Partisipasi Kasar 2024	Angka Partisipasi Murni 2024	Usia Harapan Hidup 2024	Harapan Lama Sekolah 2024	Rata-Rata Lama Sekolah 2024	Pengeluaran Rill per Kapita per Tahun yang Disesuaikan 2024	Indeks Pembangunan Manusia 2024	Kuadran IPM - APM	Klasifikasi IPM
		(persen)	(persen)	(tahun)	(tahun)	(tahun)	(ribu rupiah)			
83	Kab. Bengkalis	103,47	92,69	74,21	13,44	9,74	12.321	76,37	IV	4
84	Kab. Rokan Hilir	106,67	95,92	73,87	12,89	8,53	10.447	72,46	II	1
85	Kab. Kepulauan Meranti	104,59	94,11	72,25	12,87	8,12	8.988	69,64	II	1
86	Kota Pekanbaru	106,06	96,26	75,89	15,84	11,96	15.212	84,26	I	5
87	Kota Dumai	105,10	94,49	73,50	13,35	10,29	12.847	77,03	I	4
	Jambi									
88	Kab. Kerinci	105,82	95,32	73,39	13,92	8,60	11.441	74,33	II	2
89	Kab. Merangin	105,18	94,64	74,13	12,26	8,40	11.425	72,65	II	1
90	Kab. Sarolangun	105,53	93,60	73,65	12,60	8,35	12.679	73,76	III	2
91	Kab. Batang Hari	106,79	95,27	74,74	12,97	8,35	10.872	73,12	II	2
92	Kab. Muaro Jambi	103,95	93,02	74,75	13,37	8,70	10.007	73,11	III	2
93	Kab. Tanjung Jabung Timur	106,28	94,89	74,37	12,21	7,70	10.328	70,77	II	2
94	Kab. Tanjung Jabung Barat	105,38	94,27	73,41	12,68	8,32	10.696	72,01	II	1
95	Kab. Tebo	105,44	94,22	73,62	12,93	8,04	11.415	72,67	II	1
96	Kab. Bungo	105,52	94,14	74,02	12,67	8,60	12.820	74,44	II	2
97	Kota Jambi	105,76	94,15	75,12	15,55	11,51	13.388	81,77	I	5
98	Kota Sungai Penuh	102,50	92,31	74,29	14,84	10,48	11.499	77,93	IV	4
	Sumatera Selatan									
99	Kab. Ogan Komering Ulu	104,75	92,75	73,59	13,00	8,86	11.339	73,70	III	2
100	Kab. Ogan Komering Ilir	111,40	99,26	74,23	11,98	7,19	12.305	71,48	II	2
101	Kab. Muara Enim	109,11	95,49	74,49	12,02	8,27	12.291	73,10	II	2
102	Kab. Lahat	104,16	91,78	73,58	12,45	8,69	11.255	72,83	III	1
103	Kab. Musi Rawas	104,09	94,08	74,16	12,23	7,57	11.058	71,21	II	2
104	Kab. Musi Banyuasin	109,40	96,41	74,42	12,33	7,95	11.424	72,27	II	2
105	Kab. Banyuasin	112,34	98,69	74,47	12,34	7,48	11.277	71,55	II	2
106	Kab. Ogan Komering Ulu Selatan	103,05	91,86	73,44	11,82	8,25	9.680	70,00	III	1
107	Kab. Ogan Komering Ulu Timur	107,25	96,61	74,51	12,49	8,08	12.623	73,64	II	3
108	Kab. Ogan Ilir	104,14	90,56	73,43	12,42	8,09	12.093	72,67	III	1
109	Kab. Empat Lawang	97,54	86,05	70,93	12,11	7,68	10.889	69,63	III	1
110	Kab. Penukal Abab Lematang Ilir	107,73	91,45	74,02	12,50	7,27	9.604	69,63	III	1
111	Kab. Musi Rawas Utara	110,57	94,82	73,17	11,90	7,51	11.198	70,45	II	1
112	Kota Palembang	100,17	88,19	75,77	14,46	10,93	16.150	82,29	IV	5
113	Kota Prabumulih	102,74	90,72	74,87	13,41	10,36	13.982	78,68	IV	5
114	Kota Pagar Alam	106,63	95,49	73,88	13,50	9,44	10.245	74,00	II	4
115	Kota Lubuklinggau	107,49	94,60	74,97	13,69	9,94	14.672	78,98	I	5
	Bengkulu									
116	Kab. Bengkulu Selatan	100,14	90,45	73,05	13,66	9,42	11.040	74,53	III	4
117	Kab. Rejang Lebong	103,64	92,40	73,87	14,20	8,81	11.385	75,04	IV	2
118	Kab. Bengkulu Utara	104,30	93,37	73,23	12,92	8,32	11.715	73,10	III	1
119	Kab. Kaur	102,46	91,54	72,97	13,15	8,47	9.742	71,53	III	1
120	Kab. Seluma	100,11	89,51	72,90	13,33	8,14	9.474	70,98	III	2
121	Kab. Mukomuko	104,02	93,90	73,95	12,87	8,57	11.665	73,65	II	1
122	Kab. Lebong	102,35	91,14	72,81	12,91	8,41	12.362	73,54	III	2

No	Kabupaten / Kota	Angka Partisipasi Kasar 2024	Angka Partisipasi Murni 2024	Usia Harapan Hidup 2024	Harapan Lama Sekolah 2024	Rata-Rata Lama Sekolah 2024	Pengeluaran Rill per Kapita per Tahun yang Disesuaikan 2024	Indeks Pembangunan Manusia 2024	Kuadran IPM - APM	Klasifikasi IPM
		(persen)	(persen)	(tahun)	(tahun)	(tahun)	(ribu rupiah)			
123	Kab. Kepahiang	102,10	93,29	72,41	13,16	8,37	10.620	72,05	III	1
124	Kab. Bengkulu Tengah	102,33	90,56	72,56	13,47	7,71	10.672	71,67	III	2
125	Kota Bengkulu	104,83	94,44	74,69	16,07	11,84	15.542	83,95	I	5
	Lampung									
126	Kab. Lampung Barat	102,79	96,58	73,96	12,30	8,56	10.965	72,41	II	1
127	Kab. Tanggamus	99,56	90,82	74,08	12,33	7,38	10.524	70,54	III	1
128	Kab. Lampung Selatan	103,08	94,46	74,46	12,65	7,78	11.133	72,15	II	2
129	Kab. Lampung Timur	100,71	94,15	74,19	12,98	8,20	11.262	73,05	II	2
130	Kab. Lampung Tengah	98,48	92,65	74,38	13,17	7,97	12.595	74,16	III	3
131	Kab. Lampung Utara	100,84	92,82	74,12	12,56	8,38	9.837	71,42	III	1
132	Kab. Way Kanan	101,90	93,41	74,31	12,44	7,75	10.439	71,17	III	2
133	Kab. Tulang Bawang	104,99	97,23	74,02	12,30	7,65	12.122	72,24	II	1
134	Kab. Pesawaran	100,90	91,75	74,00	12,63	8,00	9.190	70,24	III	1
135	Kab. Pringsewu	104,42	96,48	74,56	12,93	8,53	11.543	73,84	II	2
136	Kab. Mesuji	104,96	97,40	73,90	11,82	7,21	9.454	68,59	II	1
137	Kab. Tulang Bawang Barat	98,73	91,74	74,23	12,12	7,80	9.646	70,04	III	2
138	Kab. Pesisir Barat	100,13	91,12	73,93	12,16	8,73	9.550	71,04	III	1
139	Kota Bandar Lampung	98,16	90,12	74,79	14,73	10,99	13.667	80,46	IV	5
140	Kota Metro	102,87	96,12	75,43	14,79	11,01	13.092	80,41	I	5
	Kep. Bangka Belitung									
141	Kab. Bangka	101,76	91,43	73,24	13,12	8,45	13.205	74,66	III	2
142	Kab. Belitung	102,26	91,64	72,76	12,09	9,05	14.449	74,96	III	2
143	Kab. Bangka Barat	104,19	93,75	72,08	11,79	7,48	13.199	71,36	III	2
144	Kab. Bangka Tengah	101,06	90,03	73,77	12,15	7,24	13.677	72,54	III	2
145	Kab. Bangka Selatan	102,36	92,13	71,74	11,71	6,93	12.718	70,01	III	2
146	Kab. Belitung Timur	101,28	90,80	73,79	11,69	8,99	12.610	73,62	III	2
147	Kota Pangkalpinang	104,37	95,14	75,26	13,30	10,67	16.750	80,90	I	5
	Kepulauan Riau									
148	Kab. Karimun	100,52	91,28	74,79	12,62	8,91	13.287	75,49	IV	3
149	Kab. Bintan	101,24	91,86	74,89	13,45	9,15	15.078	77,96	IV	5
150	Kab. Natuna	100,65	91,37	74,38	13,94	9,20	15.560	78,60	IV	5
151	Kab. Lingga	112,36	98,39	73,76	12,65	7,60	12.906	73,05	II	2
152	Kab. Kepulauan Anambas	100,13	90,42	73,77	13,06	7,53	12.983	73,47	III	2
153	Kota Batam	100,20	92,24	75,19	13,56	11,21	19.668	83,32	IV	5
154	Kota Tanjungpinang	100,30	91,53	74,91	14,18	10,67	16.663	81,58	IV	5
	DKI Jakarta									
155	Kab. Kepulauan Seribu	101,18	91,60	75,03	12,67	9,26	14.110	76,69	IV	3
156	Kota Jakarta Selatan	100,15	95,46	76,23	13,94	11,95	25.573	87,57	I	5
157	Kota Jakarta Timur	101,05	96,27	75,59	14,07	11,99	19.193	84,76	I	5
158	Kota Jakarta Pusat	106,28	98,60	76,57	13,31	11,61	18.661	83,75	I	5
159	Kota Jakarta Barat	101,61	95,48	75,98	13,14	11,24	22.119	84,40	I	3
160	Kota Jakarta Utara	104,32	96,23	75,17	12,70	10,85	20.032	82,13	I	3

No	Kabupaten / Kota	Angka Partisipasi Kasar 2024	Angka Partisipasi Murni 2024	Usia Harapan Hidup 2024	Harapan Lama Sekolah 2024	Rata-Rata Lama Sekolah 2024	Pengeluaran Rill per Kapita per Tahun yang Disesuaikan 2024	Indeks Pembangunan Manusia 2024	Kuadran IPM - APM	Klasifikasi IPM
		(persen)	(persen)	(tahun)	(tahun)	(tahun)	(ribu rupiah)			
	Jawa Barat									
161	Kab. Bogor	108,47	99,87	74,90	12,75	8,39	11.563	73,63	II	2
162	Kab. Sukabumi	104,17	97,71	74,85	12,39	7,34	9.815	70,18	II	2
163	Kab. Cianjur	103,77	97,02	74,80	12,04	7,33	9.026	68,89	II	2
164	Kab. Bandung	104,92	98,07	75,23	12,74	9,15	11.392	74,59	II	2
165	Kab. Garut	103,32	96,99	74,87	12,17	7,85	9.168	69,91	II	2
166	Kab. Tasikmalaya	101,37	96,94	74,06	12,64	7,97	8.965	69,98	II	1
167	Kab. Ciamis	101,98	96,86	75,26	14,30	8,10	10.085	73,64	II	2
168	Kab. Kuningan	104,31	98,14	75,22	12,27	7,90	10.418	71,56	II	2
169	Kab. Cirebon	105,47	96,92	74,98	12,42	7,65	11.529	72,30	II	2
170	Kab. Majalengka	104,09	99,09	74,98	12,27	7,53	10.842	71,37	II	2
171	Kab. Sumedang	103,47	97,36	75,29	13,02	8,74	11.589	74,57	II	2
172	Kab. Indramayu	104,63	97,15	74,82	12,32	6,95	11.010	70,72	II	2
173	Kab. Subang	105,11	99,09	75,08	12,11	7,46	11.894	72,05	II	2
174	Kab. Purwakarta	103,63	97,34	74,92	12,25	8,14	13.099	73,99	II	3
175	Kab. Karawang	104,65	98,52	75,16	12,21	8,05	12.942	73,82	II	3
176	Kab. Bekasi	106,12	99,59	75,33	13,18	9,76	12.500	76,80	I	3
177	Kab. Bandung Barat	104,06	98,14	75,06	12,00	8,24	9.583	70,77	II	2
178	Kab. Pangandaran	105,34	99,73	75,11	12,31	8,10	9.654	71,03	II	2
179	Kota Bogor	104,30	97,15	75,80	13,51	10,71	13.154	79,03	I	5
180	Kota Sukabumi	105,93	98,09	75,11	13,62	10,38	12.252	77,69	I	4
181	Kota Bandung	102,77	97,99	75,83	14,25	11,07	18.795	83,75	I	5
182	Kota Cirebon	105,84	95,24	75,48	13,17	10,53	12.869	78,09	I	3
183	Kota Bekasi	104,80	98,86	76,14	14,14	11,79	16.775	83,55	I	5
184	Kota Depok	104,47	98,95	75,82	14,11	11,59	16.640	83,05	I	5
185	Kota Cimahi	103,57	98,79	75,55	13,85	11,52	13.278	80,30	I	5
186	Kota Tasikmalaya	101,70	96,30	75,31	13,50	9,63	11.431	76,03	I	4
187	Kota Banjar	103,17	96,38	74,99	13,28	8,83	11.811	75,01	II	2
	Jawa Tengah									
188	Kab. Cilacap	100,76	92,26	74,97	12,69	7,40	11.868	72,55	III	2
189	Kab. Banyumas	100,83	93,45	74,34	13,34	7,91	12.960	74,52	III	3
190	Kab. Purbalingga	100,19	91,58	74,19	12,03	7,36	11.343	70,97	III	2
191	Kab. Banjarnegara	100,61	93,84	74,70	11,83	6,87	10.595	69,62	II	2
192	Kab. Kebumen	100,89	92,36	75,22	13,39	7,87	10.176	72,48	III	2
193	Kab. Purworejo	100,42	92,82	75,64	13,55	8,65	11.584	75,16	IV	2
194	Kab. Wonosobo	100,10	94,23	74,25	11,81	6,90	11.980	70,63	II	2
195	Kab. Magelang	101,89	95,85	74,68	12,62	7,83	10.926	72,10	II	2
196	Kab. Boyolali	97,75	91,94	76,44	12,67	8,17	14.195	75,96	IV	3
197	Kab. Klaten	98,03	92,94	77,31	13,43	9,29	13.513	78,16	IV	5
198	Kab. Sukoharjo	99,14	93,49	78,01	13,92	10,01	12.758	79,30	IV	5
199	Kab. Wonogiri	96,35	90,51	76,82	12,61	7,68	10.634	72,54	III	2
200	Kab. Karanganyar	96,46	91,98	77,91	13,73	9,26	12.732	78,11	IV	5
201	Kab. Sragen	98,38	92,89	76,18	12,93	7,88	13.890	75,53	IV	3

No	Kabupaten / Kota	Angka Partisipasi Kasar 2024	Angka Partisipasi Murni 2024	Usia Harapan Hidup 2024	Harapan Lama Sekolah 2024	Rata-Rata Lama Sekolah 2024	Pengeluaran Rill per Kapita per Tahun yang Disesuaikan 2024	Indeks Pembangunan Manusia 2024	Kuadran IPM - APM	Klasifikasi IPM
		(persen)	(persen)	(tahun)	(tahun)	(tahun)	(ribu rupiah)			
202	Kab. Grobogan	98,95	90,05	75,25	12,48	7,29	11.548	72,02	III	2
203	Kab. Blora	101,73	94,33	74,92	12,60	7,26	10.926	71,42	II	2
204	Kab. Rembang	101,42	94,17	74,98	12,30	7,73	11.830	72,53	II	2
205	Kab. Pati	100,63	94,14	76,56	12,98	7,82	11.829	74,10	II	2
206	Kab. Kudus	104,51	94,81	77,07	13,28	9,35	12.533	77,21	I	5
207	Kab. Jepara	102,27	95,47	76,21	12,86	8,27	11.729	74,32	II	2
208	Kab. Demak	101,73	92,93	75,79	13,36	8,28	11.591	74,57	III	2
209	Kab. Semarang	103,05	96,49	76,15	13,06	8,16	13.377	75,67	I	3
210	Kab. Temanggung	100,17	95,49	75,94	12,62	7,53	10.519	71,86	II	2
211	Kab. Kendal	101,82	93,74	74,73	13,00	7,74	13.277	74,34	III	3
212	Kab. Batang	101,85	93,21	75,01	12,17	7,08	10.919	70,73	III	2
213	Kab. Pekalongan	101,61	93,13	74,25	12,46	7,48	11.701	71,95	III	2
214	Kab. Pemalang	102,94	94,57	74,23	12,02	6,56	10.017	68,65	II	2
215	Kab. Tegal	100,54	92,96	74,25	12,96	7,36	10.972	71,70	III	2
216	Kab. Brebes	100,79	92,86	74,18	12,45	6,41	11.389	70,18	III	2
217	Kota Magelang	102,28	95,98	77,54	14,62	11,43	13.619	82,15	I	5
218	Kota Surakarta	105,49	98,70	77,91	15,07	11,25	16.291	84,41	I	5
219	Kota Salatiga	103,65	97,09	78,27	15,46	11,48	17.096	85,72	I	5
220	Kota Semarang	100,68	95,94	78,23	15,57	11,05	16.990	85,24	I	5
221	Kota Pekalongan	105,76	96,65	74,79	12,89	9,34	14.547	77,21	I	3
222	Kota Tegal	103,97	97,15	75,01	13,25	9,28	14.358	77,50	I	5
	DI Yogyakarta									
223	Kab. Kulon Progo	97,57	93,24	75,49	14,49	9,20	10.990	76,18	IV	4
224	Kab. Bantul	95,04	91,23	74,80	15,63	9,81	16.851	82,05	IV	5
225	Kab. Gunungkidul	95,53	91,55	74,91	13,40	7,35	10.630	72,14	III	2
226	Kab. Sleman	99,00	94,72	75,48	16,79	11,33	17.586	85,71	I	5
227	Kota Yogyakarta	99,85	95,06	75,73	17,66	12,12	20.603	89,10	I	5
	Jawa Timur									
228	Kab. Pacitan	101,87	95,28	74,74	12,69	7,90	10.099	71,49	II	2
229	Kab. Ponorogo	101,81	96,63	75,28	13,78	7,80	11.065	73,70	II	2
230	Kab. Trenggalek	100,64	96,39	75,35	12,63	7,92	10.872	72,47	II	2
231	Kab. Tulungagung	103,40	99,50	75,20	13,36	8,68	11.966	75,13	I	2
232	Kab. Blitar	100,08	95,91	75,32	12,67	7,87	12.020	73,44	II	2
233	Kab. Kediri	100,60	95,75	75,07	13,63	8,26	12.388	75,18	I	3
234	Kab. Malang	100,80	95,68	75,34	13,49	7,80	11.190	73,53	II	2
235	Kab. Lumajang	101,35	95,44	74,57	12,41	7,27	10.124	70,31	II	2
236	Kab. Jember	100,81	95,81	74,17	13,50	6,54	10.700	70,93	II	2
237	Kab. Banyuwangi	100,55	95,64	74,13	13,14	7,78	13.320	74,30	II	2
238	Kab. Bondowoso	102,50	95,31	73,31	13,33	6,53	11.689	71,22	II	2
239	Kab. Situbondo	104,72	96,86	73,36	13,20	6,93	11.216	71,22	II	1
240	Kab. Probolinggo	105,75	97,95	73,93	12,64	6,31	12.258	70,85	II	1
241	Kab. Pasuruan	102,27	96,20	74,61	12,78	7,46	11.617	72,36	II	2
242	Kab. Sidoarjo	104,50	99,40	75,63	15,22	10,91	15.710	82,67	I	5

No	Kabupaten / Kota	Angka Partisipasi Kasar 2024	Angka Partisipasi Murni 2024	Usia Harapan Hidup 2024	Harapan Lama Sekolah 2024	Rata-Rata Lama Sekolah 2024	Pengeluaran Rill per Kapita per Tahun yang Disesuaikan 2024 (ribu rupiah)	Indeks Pembangunan Manusia 2024	Kuadran IPM - APM	Klasifikasi IPM
		(persen)	(persen)	(tahun)	(tahun)	(tahun)				
243	Kab. Mojokerto	99,83	95,31	74,95	12,99	9,13	13.903	76,69	I	3
244	Kab. Jombang	100,54	95,96	74,64	13,61	8,78	12.454	75,67	I	3
245	Kab. Nganjuk	99,87	95,57	74,64	13,18	8,25	13.376	75,24	I	3
246	Kab. Madiun	101,58	96,46	74,79	13,27	8,20	12.668	74,81	II	3
247	Kab. Magetan	102,03	96,47	75,42	14,08	8,69	12.915	76,77	I	3
248	Kab. Ngawi	102,56	96,75	75,21	12,89	7,84	12.414	73,91	II	3
249	Kab. Bojonegoro	101,96	97,01	74,91	13,18	7,59	11.204	72,75	II	2
250	Kab. Tuban	99,37	95,43	74,95	12,54	7,53	11.579	72,31	II	2
251	Kab. Lamongan	102,29	97,01	75,07	14,03	8,48	12.419	75,90	I	3
252	Kab. Gresik	102,35	97,44	74,48	13,98	10,03	14.356	78,93	I	5
253	Kab. Bangkalan	107,74	98,70	73,43	11,98	6,01	9.841	67,33	II	1
254	Kab. Sampang	110,70	96,22	73,66	12,55	5,08	9.782	66,72	II	1
255	Kab. Pamekasan	108,24	99,14	73,66	13,69	7,17	9.811	70,85	II	2
256	Kab. Sumenep	108,02	98,84	73,86	13,59	6,10	10.156	69,78	II	2
257	Kota Kediri	113,14	95,44	75,94	15,71	10,92	13.670	81,88	I	5
258	Kota Blitar	101,05	96,63	75,20	14,81	10,82	14.933	81,44	I	5
259	Kota Malang	104,53	99,54	75,54	15,79	11,14	17.791	84,68	I	5
260	Kota Probolinggo	102,98	99,12	74,31	13,98	9,72	13.405	77,79	I	5
261	Kota Pasuruan	100,25	96,33	74,86	13,67	9,94	14.664	78,90	I	5
262	Kota Mojokerto	99,92	95,41	75,99	14,13	11,38	14.842	81,76	I	5
263	Kota Madiun	102,55	98,18	75,67	14,54	12,11	17.518	84,51	I	5
264	Kota Surabaya	100,19	95,49	76,02	14,87	10,89	19.666	84,69	I	5
265	Kota Batu	100,56	96,37	75,36	14,58	9,87	14.253	79,69	I	5
Banten										
266	Kab. Pandeglang	100,28	90,88	74,22	13,74	7,16	9.574	70,88	III	2
267	Kab. Lebak	99,98	90,24	73,99	12,11	6,61	9.631	68,33	III	1
268	Kab. Tangerang	105,99	96,96	75,34	12,88	9,06	13.254	76,19	I	3
269	Kab. Serang	102,39	92,28	74,91	12,87	7,88	11.767	73,28	III	2
270	Kota Tangerang	100,47	96,27	75,50	13,90	11,14	15.641	81,53	I	5
271	Kota Cilegon	101,03	93,28	75,03	13,23	10,39	14.294	78,83	IV	5
272	Kota Serang	101,61	91,73	75,31	12,83	8,93	14.603	76,90	IV	3
273	Kota Tangerang Selatan	105,30	98,74	75,80	14,70	11,86	17.028	84,16	I	5
Bali										
274	Kab. Jembrana	103,31	95,21	75,07	13,05	8,70	12.638	75,32	I	3
275	Kab. Tabanan	102,48	94,86	75,67	13,29	9,57	15.297	78,83	I	5
276	Kab. Badung	103,23	94,90	75,90	14,23	11,14	18.556	83,73	I	5
277	Kab. Gianyar	104,80	96,43	75,72	14,11	9,84	15.577	80,23	I	5
278	Kab. Klungkung	103,18	94,35	74,90	13,13	8,74	12.358	75,15	I	3
279	Kab. Bangli	102,79	95,16	74,23	12,53	7,58	12.148	72,51	II	2
280	Kab. Karangasem	104,43	95,66	74,17	12,91	6,70	11.176	70,91	II	2
281	Kab. Buleleng	103,65	95,81	74,71	13,30	7,69	14.377	75,35	I	3
282	Kota Denpasar	104,93	96,91	75,80	14,13	11,53	20.763	85,11	I	5

No	Kabupaten / Kota	Angka Partisipasi Kasar 2024	Angka Partisipasi Murni 2024	Usia Harapan Hidup 2024	Harapan Lama Sekolah 2024	Rata-Rata Lama Sekolah 2024	Pengeluaran Rill per Kapita per Tahun yang Disesuaikan 2024	Indeks Pembangunan Manusia 2024	Kuadran IPM - APM	Klasifikasi IPM
		(persen)	(persen)	(tahun)	(tahun)	(tahun)	(ribu rupiah)			
	Nusa Tenggara Barat									
283	Kab. Lombok Barat	103,34	91,28	72,64	13,99	6,88	12.431	72,70	III	2
284	Kab. Lombok Tengah	101,16	92,73	71,59	13,89	6,73	11.531	71,19	III	2
285	Kab. Lombok Timur	103,47	95,45	71,95	14,07	7,36	10.571	71,48	II	2
286	Kab. Sumbawa	101,38	92,98	72,67	13,34	8,59	10.349	72,36	III	2
287	Kab. Dompu	102,28	84,30	71,76	13,84	9,04	9.971	72,59	III	4
288	Kab. Bima	104,93	90,44	71,88	13,66	8,30	9.418	70,99	III	2
289	Kab. Sumbawa Barat	100,45	93,47	72,97	13,68	8,99	12.841	75,52	IV	4
290	Kab. Lombok Utara	101,33	92,47	71,52	13,02	6,40	10.272	68,64	III	1
291	Kota Mataram	104,01	96,56	74,83	15,68	9,58	16.514	81,64	I	5
292	Kota Bima	101,48	88,77	73,15	15,08	10,96	12.362	78,91	IV	4
	Nusa Tenggara Timur									
293	Kab. Sumba Barat	99,55	85,22	71,37	13,40	7,17	8.243	67,70	III	2
294	Kab. Sumba Timur	97,03	83,97	71,57	12,87	7,77	10.280	70,28	III	1
295	Kab. Kupang	103,42	91,25	69,53	13,90	7,62	8.508	68,26	III	2
296	Kab. Timor Tengah Selatan	100,12	88,71	71,22	12,62	7,21	7.755	66,22	III	1
297	Kab. Timor Tengah Utara	98,27	86,47	71,02	13,36	8,17	7.242	67,27	III	2
298	Kab. Belu	100,38	86,71	74,30	12,32	7,50	8.159	68,13	III	2
299	Kab. Alor	100,44	89,48	70,88	12,48	8,61	7.806	67,70	III	1
300	Kab. Lembata	98,90	88,62	73,35	12,47	8,27	8.238	68,95	III	1
301	Kab. Flores Timur	100,22	89,74	73,91	12,96	8,06	8.505	69,79	III	1
302	Kab. Sikka	102,15	89,20	74,24	13,67	6,99	9.019	69,96	III	2
303	Kab. Ende	102,44	90,60	72,87	13,83	8,29	10.009	72,24	III	2
304	Kab. Ngada	95,11	86,15	74,43	12,75	8,83	9.585	72,04	III	2
305	Kab. Manggarai	99,49	85,73	72,44	13,73	7,91	8.204	69,35	III	2
306	Kab. Rote Ndao	95,61	83,63	69,81	13,23	7,83	7.365	66,40	III	2
307	Kab. Manggarai Barat	98,44	83,61	72,86	12,54	8,21	8.195	68,68	III	1
308	Kab. Sumba Tengah	100,32	86,05	69,46	13,14	7,23	6.743	64,46	III	1
309	Kab. Sumba Barat Daya	101,31	78,97	69,20	13,11	6,39	7.358	64,27	III	1
310	Kab. Nagekeo	100,03	90,14	72,51	12,69	8,23	8.986	69,70	III	1
311	Kab. Manggarai Timur	98,74	86,21	72,98	12,66	7,96	6.561	66,03	III	1
312	Kab. Sabu Raijua	95,56	83,87	66,65	13,19	6,99	6.207	62,06	III	1
313	Kab. Malaka	102,45	86,91	71,47	12,83	7,14	6.879	65,13	III	1
314	Kota Kupang	102,50	89,91	74,95	16,54	11,64	14.001	83,21	IV	5
	Kalimantan Barat									
315	Kab. Sambas	103,39	91,68	74,32	12,76	6,76	11.538	71,20	III	2
316	Kab. Bengkayang	105,36	91,78	74,42	12,22	7,41	10.208	70,30	III	2
317	Kab. Landak	101,91	88,33	74,13	12,54	7,46	8.868	69,13	III	1
318	Kab. Mempawah	105,36	91,02	74,34	12,90	7,21	9.163	69,63	III	2
319	Kab. Sanggau	105,30	93,24	74,15	11,88	7,47	9.728	69,40	III	2
320	Kab. Ketapang	105,17	93,90	73,72	11,97	7,68	10.472	70,34	II	1
321	Kab. Sintang	104,71	90,14	74,35	12,32	7,65	9.657	70,13	III	2
322	Kab. Kapuas Hulu	104,34	91,98	73,49	12,23	8,03	8.470	68,77	III	1

No	Kabupaten / Kota	Angka Partisipasi Kasar 2024	Angka Partisipasi Murni 2024	Usia Harapan Hidup 2024	Harapan Lama Sekolah 2024	Rata-Rata Lama Sekolah 2024	Pengeluaran Rill per Kapita per Tahun yang Disesuaikan 2024 (ribu rupiah)	Indeks Pembangunan Manusia 2024	Kuadran IPM - APM	Klasifikasi IPM
		(persen)	(persen)	(tahun)	(tahun)	(tahun)				
323	Kab. Sekadau	104,68	91,91	74,12	11,93	7,23	8.511	67,74	III	1
324	Kab. Melawi	105,76	90,88	73,82	11,37	7,66	9.596	68,81	III	1
325	Kab. Kayong Utara	103,64	89,86	72,54	12,20	6,54	9.016	67,05	III	1
326	Kab. Kubu Raya	104,87	91,97	73,42	13,90	7,05	10.132	71,14	III	2
327	Kota Pontianak	101,09	91,63	75,46	15,06	10,47	16.212	82,22	IV	5
328	Kota Singkawang	104,32	91,79	74,75	12,95	8,22	12.945	74,68	III	3
Kalimantan Tengah										
329	Kab. Kotawaringin Barat	101,69	94,73	73,29	12,78	8,77	14.095	75,35	I	2
330	Kab. Kotawaringin Timur	104,14	95,47	74,38	12,89	8,18	13.042	74,47	II	3
331	Kab. Kapuas	101,79	90,87	72,86	13,01	7,93	12.265	72,98	III	1
332	Kab. Barito Selatan	104,82	94,32	72,79	13,00	9,22	12.508	74,76	II	2
333	Kab. Barito Utara	99,83	90,06	73,65	12,55	8,92	11.150	73,17	III	2
334	Kab. Sukamara	99,40	89,96	74,37	12,17	8,18	9.809	70,83	III	2
335	Kab. Lamandau	101,24	92,14	73,59	12,53	8,82	12.278	73,95	III	1
336	Kab. Seruyan	101,62	92,90	73,29	12,04	8,01	10.474	70,66	III	1
337	Kab. Katingan	99,97	90,75	74,14	12,99	8,95	11.691	74,37	III	2
338	Kab. Pulang Pisau	104,84	95,17	73,24	12,52	8,42	11.207	72,36	II	1
339	Kab. Gunung Mas	104,46	94,03	73,58	12,10	9,37	11.902	73,88	II	2
340	Kab. Barito Timur	102,29	93,38	72,21	12,88	9,54	12.576	74,81	III	2
341	Kab. Murung Raya	102,35	91,42	73,44	12,05	7,94	11.503	71,58	III	1
342	Kota Palangka Raya	102,70	94,52	74,49	15,13	11,66	15.188	82,53	I	5
Kalimantan Selatan										
343	Kab. Tanah Laut	104,47	95,49	74,64	12,43	7,94	12.595	73,42	II	3
344	Kab. Kotabaru	104,98	95,71	73,88	12,08	7,56	12.929	72,42	II	2
345	Kab. Banjar	101,26	90,85	73,55	13,04	7,95	13.683	74,41	III	2
346	Kab. Barito Kuala	104,56	95,06	72,52	12,56	7,92	11.168	71,40	II	1
347	Kab. Tapin	104,51	95,82	74,72	12,34	8,15	13.163	74,06	II	3
348	Kab. Hulu Sungai Selatan	101,12	91,92	72,82	12,48	8,09	14.150	73,95	III	2
349	Kab. Hulu Sungai Tengah	100,98	91,21	72,60	12,31	8,35	13.176	73,33	III	2
350	Kab. Hulu Sungai Utara	98,75	91,46	72,49	13,21	7,78	10.981	71,74	III	2
351	Kab. Tabalong	104,12	97,09	74,76	12,92	9,15	13.097	75,97	I	3
352	Kab. Tanah Bumbu	104,76	96,28	74,44	12,61	8,43	13.026	74,50	II	3
353	Kab. Balangan	103,99	92,16	73,87	13,09	8,13	12.325	73,83	III	1
354	Kota Banjarmasin	103,37	95,19	75,07	14,01	10,35	15.714	80,53	I	5
355	Kota Banjarbaru	101,68	93,28	75,11	14,86	11,00	14.927	81,65	IV	5
Kalimantan Timur										
356	Kab. Paser	105,08	95,87	74,10	13,38	8,92	12.181	75,13	I	4
357	Kab. Kutai Barat	104,62	95,80	73,93	13,36	8,89	11.903	74,76	II	4
358	Kab. Kutai Kartanegara	105,50	95,73	74,33	13,65	9,27	12.957	76,57	I	5
359	Kab. Kutai Timur	104,66	96,34	74,55	13,02	9,47	12.490	75,90	I	3
360	Kab. Berau	105,13	96,25	73,66	13,37	9,57	14.101	77,17	I	4
361	Kab. Penajam Paser Utara	105,10	96,38	74,27	12,87	8,57	13.100	74,94	II	3
362	Kab. Mahakam Ulu	105,68	95,54	73,64	12,78	8,50	9.126	70,79	II	1

No	Kabupaten / Kota	Angka Partisipasi Kasar 2024	Angka Partisipasi Murni 2024	Usia Harapan Hidup 2024	Harapan Lama Sekolah 2024	Rata-Rata Lama Sekolah 2024	Pengeluaran Rill per Kapita per Tahun yang Disesuaikan 2024	Indeks Pembangunan Manusia 2024	Kuadran IPM - APM	Klasifikasi IPM
		(persen)	(persen)	(tahun)	(tahun)	(tahun)	(ribu rupiah)			
363	Kota Balikpapan	105,11	98,23	75,87	14,25	10,99	16.854	82,62	I	5
364	Kota Samarinda	103,47	97,05	75,51	15,40	10,95	16.160	83,11	I	5
365	Kota Bontang	103,25	95,65	75,03	13,73	10,97	18.394	82,49	I	5
	Kalimantan Utara									
366	Kab. Malinau	105,75	92,07	73,27	13,35	9,63	11.190	74,72	III	4
367	Kab. Bulungan	105,49	94,84	73,87	13,25	9,23	10.581	73,83	II	4
368	Kab. Tana Tidung	104,95	93,97	73,51	12,61	9,24	8.707	70,95	II	2
369	Kab. Nunukan	105,70	93,42	73,13	12,69	8,39	8.265	69,27	III	1
370	Kota Tarakan	105,31	98,45	74,27	14,22	10,37	12.451	78,03	I	5
	Sulawesi Utara									
371	Kab. Bolaang Mongondow	104,81	94,42	72,16	11,65	8,38	11.507	71,14	II	1
372	Kab. Minahasa	107,62	93,20	75,22	14,19	10,23	13.681	79,26	IV	5
373	Kab. Kepulauan Sangihe	107,10	96,33	74,70	12,61	8,65	12.409	74,43	II	3
374	Kab. Kepulauan Talaud	103,65	94,68	73,51	12,67	9,96	9.512	72,83	II	2
375	Kab. Minahasa Selatan	104,31	92,43	74,35	13,02	9,43	12.529	75,79	IV	3
376	Kab. Minahasa Utara	107,15	95,43	74,70	13,08	10,35	12.412	77,05	I	3
377	Kab. Bolaang Mongondow Utara	102,57	90,61	73,63	12,39	8,61	10.170	71,66	III	1
378	Kab. Kepulauan Siau Tagulandang	104,53	94,19	74,67	12,04	9,43	9.062	71,55	II	2
379	Kab. Minahasa Tenggara	105,07	94,48	73,36	12,60	9,14	11.511	73,68	II	2
380	Kab. Bolaang Mongondow Selatan	105,01	93,90	70,94	12,34	8,28	10.114	69,92	II	1
381	Kab. Bolaang Mongondow Timur	102,23	89,98	73,45	11,91	8,29	10.191	70,68	III	1
382	Kota Manado	107,59	94,90	75,24	14,20	11,46	15.301	81,86	I	5
383	Kota Bitung	106,84	94,91	74,43	12,67	9,96	13.539	76,90	I	3
384	Kota Tomohon	105,12	92,85	75,57	14,38	11,03	13.045	80,06	IV	5
385	Kota Kotamobagu	106,67	96,13	74,97	13,05	10,35	12.074	76,86	I	2
	Sulawesi Tengah									
386	Kab. Banggai Kepulauan	97,37	86,67	67,54	13,11	8,70	8.375	67,65	III	1
387	Kab. Banggai	100,87	90,89	72,26	13,35	8,81	10.772	72,86	III	2
388	Kab. Morowali	101,32	91,39	71,09	13,39	9,38	12.281	74,36	III	4
389	Kab. Poso	100,32	91,69	73,02	13,75	9,54	9.948	73,65	III	4
390	Kab. Donggala	101,32	90,65	70,74	12,62	8,00	9.117	68,71	III	1
391	Kab. Tolitoli	100,47	90,47	71,31	13,17	8,91	8.918	70,38	III	2
392	Kab. Buol	97,35	87,08	71,30	13,18	9,20	9.051	70,89	III	2
393	Kab. Parigi Moutong	104,50	93,11	68,72	12,52	8,05	10.846	69,48	III	1
394	Kab. Tojo Una-Una	100,68	89,28	71,05	12,43	8,56	8.863	69,04	III	1
395	Kab. Sigi	100,68	89,14	71,33	13,13	9,04	9.254	70,90	III	2
396	Kab. Banggai Laut	101,28	91,54	71,04	13,04	8,65	8.776	69,65	III	1
397	Kab. Morowali Utara	98,64	89,22	72,35	12,44	9,13	10.032	71,64	III	2
398	Kota Palu	101,45	91,65	73,91	16,52	11,75	15.941	84,12	IV	4
	Sulawesi Selatan									
399	Kab. Kepulauan Selayar	100,32	86,03	73,48	12,84	8,49	10.235	71,98	III	1
400	Kab. Bulukumba	98,62	87,74	74,18	13,45	8,52	11.807	74,43	III	2
401	Kab. Bantaeng	103,13	87,99	72,85	12,79	7,26	12.719	72,20	III	2

No	Kabupaten / Kota	Angka Partisipasi Kasar 2024	Angka Partisipasi Murni 2024	Usia Harapan Hidup 2024	Harapan Lama Sekolah 2024	Rata-Rata Lama Sekolah 2024	Pengeluaran Rill per Kapita per Tahun yang Disesuaikan 2024	Indeks Pembangunan Manusia 2024	Kuadran IPM - APM	Klasifikasi IPM
		(persen)	(persen)	(tahun)	(tahun)	(tahun)	(ribu rupiah)			
402	Kab. Jeneponto	98,74	84,98	74,00	12,14	7,01	10.158	69,45	III	1
403	Kab. Takalar	104,00	89,82	73,69	12,50	7,73	11.679	72,06	III	1
404	Kab. Gowa	103,75	91,37	74,19	13,71	8,53	10.700	73,71	III	2
405	Kab. Sinjai	103,82	90,84	73,04	13,27	7,82	10.665	71,81	III	2
406	Kab. Maros	103,32	93,69	73,77	13,51	8,05	12.209	74,04	III	2
407	Kab. Pangkajene dan Kepulauan	101,66	89,59	73,11	12,81	8,47	12.643	73,87	III	2
408	Kab. Barru	104,68	93,25	72,75	13,63	8,80	12.058	74,51	III	2
409	Kab. Bone	98,95	90,09	73,46	13,02	7,55	10.084	70,81	III	1
410	Kab. Soppeng	102,76	93,71	73,77	13,22	8,45	10.547	72,76	III	2
411	Kab. Wajo	101,68	93,13	73,47	13,32	7,46	13.608	73,98	III	2
412	Kab. Sidenreng Rappang	101,39	92,69	74,45	13,03	8,21	13.209	74,81	III	3
413	Kab. Pinrang	100,75	91,35	74,63	13,28	8,53	13.010	75,43	IV	3
414	Kab. Enrekang	101,81	93,22	74,07	13,88	9,11	12.138	75,83	IV	4
415	Kab. Luwu	102,61	92,19	73,52	13,43	8,81	11.121	73,86	III	2
416	Kab. Tana Toraja	104,73	92,92	74,85	14,10	8,77	8.319	71,94	III	2
417	Kab. Luwu Utara	99,11	89,90	73,87	12,61	8,37	12.866	74,04	III	2
418	Kab. Luwu Timur	101,88	90,85	74,55	13,18	8,94	13.867	76,44	IV	3
419	Kab. Toraja Utara	98,19	87,01	75,03	13,43	8,54	9.292	72,31	III	2
420	Kota Makassar	97,74	87,64	75,33	15,62	11,57	18.386	85,23	IV	5
421	Kota Parepare	100,46	89,78	74,63	14,55	10,88	14.928	80,97	IV	5
422	Kota Palopo	98,06	88,79	74,19	15,13	11,16	14.369	81,25	IV	5
	Sulawesi Tenggara									
423	Kab. Buton	99,71	87,87	70,47	13,89	8,63	8.401	69,72	III	2
424	Kab. Muna	103,23	89,83	71,64	14,17	8,71	9.107	71,50	III	2
425	Kab. Konawe	100,02	88,76	72,85	13,05	9,69	11.415	74,50	III	2
426	Kab. Kolaka	96,14	85,44	73,68	13,04	9,38	13.534	76,20	IV	2
427	Kab. Konawe Selatan	97,95	87,54	71,80	12,79	8,76	10.250	71,51	III	1
428	Kab. Bombana	99,35	87,96	71,03	11,91	8,10	9.692	68,85	III	1
429	Kab. Wakatobi	98,21	81,32	70,88	13,53	8,53	10.739	72,03	III	2
430	Kab. Kolaka Utara	99,82	89,40	70,67	12,22	8,82	11.650	71,75	III	1
431	Kab. Buton Utara	101,58	88,26	71,40	13,32	9,24	8.746	70,75	III	4
432	Kab. Konawe Utara	98,15	87,78	70,60	13,13	9,61	10.658	72,71	III	2
433	Kab. Kolaka Timur	100,69	90,77	73,23	12,71	8,43	9.012	70,32	III	1
434	Kab. Konawe Kepulauan	99,92	86,31	70,29	12,55	9,46	7.996	68,77	III	2
435	Kab. Muna Barat	102,31	89,71	71,23	12,74	8,09	8.458	68,37	III	1
436	Kab. Buton Tengah	100,14	87,38	70,47	13,22	7,35	8.434	67,58	III	2
437	Kab. Buton Selatan	99,18	88,17	70,22	13,36	7,75	8.386	68,04	III	2
438	Kota Kendari	102,89	91,34	75,47	16,92	12,55	15.651	85,97	IV	5
439	Kota Baubau	102,07	89,76	74,67	15,53	11,03	11.755	79,61	IV	4
	Gorontalo									
440	Kab. Boalemo	99,84	89,79	71,43	12,49	7,31	10.401	69,34	III	1
441	Kab. Gorontalo	100,59	89,64	70,99	13,22	7,95	10.645	70,96	III	2
442	Kab. Pohuwato	99,82	90,38	69,63	12,48	7,78	11.618	70,19	III	1

No	Kabupaten / Kota	Angka Partisipasi Kasar 2024	Angka Partisipasi Murni 2024	Usia Harapan Hidup 2024	Harapan Lama Sekolah 2024	Rata-Rata Lama Sekolah 2024	Pengeluaran Rill per Kapita per Tahun yang Disesuaikan 2024	Indeks Pembangunan Manusia 2024	Kuadran IPM - APM	Klasifikasi IPM
		(persen)	(persen)	(tahun)	(tahun)	(tahun)	(ribu rupiah)			
443	Kab. Bone Bolango	97,27	87,09	70,40	13,69	8,52	11.717	72,82	III	2
444	Kab. Gorontalo Utara	100,59	90,12	69,88	12,50	7,40	10.476	68,83	III	1
445	Kota Gorontalo	103,11	90,67	73,55	14,59	10,41	13.860	79,18	IV	4
	Sulawesi Barat									
446	Kab. Majene	101,11	89,98	70,39	13,72	9,46	10.909	73,25	III	4
447	Kab. Polewali Mandar	98,05	88,58	71,08	13,50	7,72	9.536	69,88	III	2
448	Kab. Mamasa	98,06	86,02	72,27	12,60	8,13	8.415	68,68	III	1
449	Kab. Mamuju	101,91	88,83	72,13	13,29	8,35	10.440	71,86	III	2
450	Kab. Pasangkayu	95,73	86,39	70,41	12,09	8,13	12.190	71,04	III	1
451	Kab. Mamuju Tengah	97,93	88,17	70,05	12,68	7,94	9.250	68,53	III	1
	Maluku									
452	Kab. Kepulauan Tanimbar	95,02	80,60	70,20	12,34	9,92	7.091	67,69	III	2
453	Kab. Maluku Tenggara	95,79	83,33	70,93	12,91	9,84	8.553	70,58	III	2
454	Kab. Maluku Tengah	98,62	86,62	71,01	14,67	9,79	11.183	75,10	IV	4
455	Kab. Buru	98,83	88,58	70,34	13,24	9,02	11.261	72,55	III	4
456	Kab. Kepulauan Aru	96,56	83,02	70,40	12,37	9,21	8.488	69,00	III	2
457	Kab. Seram Bagian Barat	97,06	85,36	71,18	13,70	9,59	9.706	72,54	III	4
458	Kab. Seram Bagian Timur	99,60	84,32	68,73	12,92	9,00	10.049	70,28	III	2
459	Kab. Maluku Barat Daya	99,77	88,72	69,65	12,71	9,13	7.600	67,68	III	2
460	Kab. Buru Selatan	94,20	81,66	70,28	12,85	8,48	8.474	68,54	III	1
461	Kota Ambon	97,08	85,27	73,14	16,08	12,24	15.196	83,37	IV	4
462	Kota Tual	99,06	86,26	71,72	14,02	10,67	8.238	72,48	III	4
	Maluku Utara									
463	Kab. Halmahera Barat	104,77	93,21	70,72	13,25	8,59	8.426	69,20	III	2
464	Kab. Halmahera Tengah	102,78	89,47	70,48	13,52	9,20	9.140	70,94	III	4
465	Kab. Kepulauan Sula	102,52	91,33	68,80	12,98	9,17	8.020	68,19	III	2
466	Kab. Halmahera Selatan	101,82	88,69	70,54	13,04	8,42	8.210	68,43	III	1
467	Kab. halmahera Utara	101,93	89,38	71,95	13,69	8,67	8.607	70,52	III	2
468	Kab. Halmahera Timur	102,31	91,31	71,70	12,89	8,88	8.999	70,35	III	2
469	Kab. Pulau Morotai	99,21	87,69	71,16	13,02	7,73	7.523	66,91	III	1
470	Kab. Pulau Taliabu	103,41	89,63	67,25	12,88	7,99	7.226	64,88	III	1
471	Kota Ternate	101,86	90,64	72,87	15,92	12,08	14.731	82,59	IV	4
472	Kota Tidore Kepulauan	101,17	92,13	72,52	14,49	10,12	9.269	74,01	III	4
	Papua									
473	Kab. Jayapura	91,86	79,89	70,48	14,59	10,57	10.848	75,32	IV	4
474	Kab. Kepulauan Yapen	97,59	78,02	70,85	12,82	9,71	8.409	70,12	III	2
475	Kab. Biak Numfor	98,35	81,18	70,92	14,24	10,55	10.600	74,95	III	4
476	Kab. Sarmi	98,17	80,84	69,91	12,38	9,61	7.499	67,89	III	2
477	Kab. Keerom	97,68	81,52	69,95	12,52	8,58	9.967	69,87	III	1
478	Kab. Waropen	86,01	68,65	69,72	12,85	9,42	7.569	68,13	III	2
479	Kab. Supiori	91,00	78,73	69,62	13,20	9,21	6.474	66,37	III	2
480	Kab. Mamberamo Raya	96,30	62,56	68,95	12,04	6,49	5.298	59,48	III	1
481	Kota Jayapura	97,24	86,67	71,99	15,27	12,07	15.408	81,98	IV	4

No	Kabupaten / Kota	Angka Partisipasi Kasar 2024	Angka Partisipasi Murni 2024	Usia Harapan Hidup 2024	Harapan Lama Sekolah 2024	Rata-Rata Lama Sekolah 2024	Pengeluaran Rill per Kapita per Tahun yang Disesuaikan 2024	Indeks Pembangunan Manusia 2024	Kuadran IPM - APM	Klasifikasi IPM
		(persen)	(persen)	(tahun)	(tahun)	(tahun)	(ribu rupiah)			
	Papua Barat									
482	Kab. Fakfak	99,51	87,67	71,57	14,79	9,32	8.159	71,52	III	4
483	Kab. Kaimana	103,21	84,76	69,20	12,51	8,97	9.242	69,20	III	2
484	Kab. Teluk Wondama	93,52	80,09	65,50	11,91	7,38	8.887	64,52	III	1
485	Kab. Teluk Bintuni	102,80	83,30	68,05	12,62	8,67	10.592	69,79	III	1
486	Kab. Manokwari	102,86	87,16	72,51	13,79	8,67	13.008	75,15	IV	2
487	Kab. Manokwari Selatan	103,27	86,25	68,26	12,78	7,17	6.139	62,45	III	1
488	Kab. Pegunungan Arfak	102,40	72,64	67,79	11,80	5,72	5.722	58,71	III	1
	Papua Selatan									
489	Kab. Merauke	88,36	73,60	71,41	14,48	9,37	11.077	74,53	III	4
490	Kab. Boven Digoel	94,29	73,77	69,17	11,67	9,42	8.616	68,16	III	2
491	Kab. Mappi	96,54	66,57	66,34	11,29	7,16	7.068	61,66	III	1
492	Kab. Asmat	93,98	53,53	68,05	9,71	5,82	6.262	57,63	III	1
	Papua Tengah									
493	Kab. Mimika	100,22	81,52	73,06	13,16	10,72	12.487	76,85	IV	2
494	Kab. Dogiyai	100,38	63,97	66,59	10,63	4,98	6.755	57,72	III	1
495	Kab. Deiyai	102,60	67,22	66,66	9,86	3,29	5.509	52,29	III	1
496	Kab. Nabire	96,41	78,32	70,06	12,82	10,42	9.856	72,28	III	2
497	Kab. Paniai	100,88	70,41	69,64	10,54	4,81	7.470	59,61	III	1
498	Kab. Intan Jaya	83,24	61,07	66,74	7,70	3,28	6.463	50,92	III	1
499	Kab. Puncak	88,76	59,81	66,82	5,60	2,39	6.363	45,70	III	1
500	Kab. Puncak Jaya	71,43	56,84	67,91	7,53	4,42	6.091	52,47	III	1
	Papua Pegunungan									
501	Kab. Nduga	74,22	59,23	63,90	4,45	1,92	4.597	38,88	III	1
502	Kab. Jayawijaya	92,50	63,41	69,98	12,85	5,99	8.534	65,38	III	1
503	Kab. Lanny Jaya	103,73	87,69	67,29	9,44	3,83	5.026	51,84	III	1
504	Kab. Tolikara	100,20	83,84	67,22	9,03	3,69	5.653	52,31	III	1
505	Kab. Mamberamo Tengah	90,55	77,47	68,99	9,78	3,70	4.943	52,50	III	1
506	Kab. Yalimo	86,64	52,56	66,12	9,80	3,55	5.226	51,85	III	1
507	Kab. Yahukimo	101,73	61,46	66,51	8,05	4,35	5.747	51,97	III	1
508	Kab. Pegunungan Bintang	91,13	69,79	66,10	7,01	3,51	6.196	49,69	III	1
	Papua Barat Daya									
509	Kab. Raja Ampat	100,42	82,18	67,12	12,12	8,40	8.761	66,60	III	1
510	Kab. Sorong	99,91	84,35	70,08	14,08	8,74	8.283	69,69	III	2
511	Kab. Sorong Selatan	97,62	75,10	67,23	13,29	7,76	6.928	64,54	III	2
512	Kab. Maybrat	87,63	70,06	65,97	13,51	7,44	5.824	61,83	III	2
513	Kab. Tambrauw	98,42	76,50	65,89	12,45	5,89	5.489	58,31	III	1
514	Kota Sorong	99,84	87,77	73,19	14,43	11,57	14.368	80,55	IV	4



Pusat Data dan Teknologi Informasi
Sekretariat Jenderal
Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah
Jl. RE Martadinata No.KM. 15.5, Cipayung, Ciputat,
Kota Tangerang Selatan, Banten. 15411